

REFLEKSI EMPAT SETENGAH ABAD DINAMIKA EKONOMI DAN BUDAYA BANYUMAS

Perjalanan Banyumas selama empat setengah abad ini ibarat sebuah sungai besar. Hulu sungai (masa awal Mancanegara Kilèn) menghasilkan air jernih dengan arus egaliter yang kuat. Namun, ketika sungai itu memasuki dataran rendah (masa kolonial dan Orde Baru), ia disedot untuk mengairi ladang industri ekstraktif dan tercemar oleh limbah pertumbuhan yang terpusat di satu muara (Purwokerto), meninggalkan ketimpangan dan krisis lingkungan. Tugas kontemporer adalah membersihkan kembali sungai tersebut hingga hilir, memastikan setiap anak sungai menerima manfaat air yang jernih dan mengalirkan semangat Cablaka sebagai fondasi hidup bersama.



PENERBIT
DIGDAYA BOOK
Kadang Normatif Kadang Progresif
www.digdaya.com
Alamat Redaksi:
Perumahan Granada Residence No. A12
Ngabean, Kec. Boja, Kab. Kendal



9

786347

408211

NON-FIKSI

DINAMIKA EKONOMI DAN BUDAYA BANYUMAS



Aditya Hera Nurmoko & Nanang Riyanto

Refleksi Empat Setengah Abad Dinamika Ekonomi dan Budaya Banyumas

Oleh

Aditya Hera Nurmoko

Annang Riyanto



**Refleksi Empat Setengah Abad Dinamika Ekonomi
dan Budaya Banyumas**

Penulis

Aditya Hera Nurmoko & Annang Riyanto

ISBN

978-634-7408-21-1

Perancang Sampul & Ilustrator

Syafni Nur Rakhman

Layouter & Editor

Dwi Adi Pramono

Diterbitkan oleh

Penerbit Digdaya Book

Redaksi

Oemah Belajar Digdaya

Perumahan Granada Residence No. A12

Ngabean, Kec. Boja, Kab. Kendal

Telepon: 083869603185

laman web: digdayabook.com

Penerbit Digdaya Book (PDB)

Cetakan Pertama, Desember 2025

xiii + 347 halaman: 14 x 20 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan tanpa seizin penerbit

Sambutan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu..

Sebagai putra daerah, panggilan untuk berbuat bagi Banyumas tidak pernah padam. Panggilan ini berakar pada jati diri kultural kita yang unik dan lugas. Kita adalah pewaris **filosofi Cablaka**, keterusterangan yang jujur, tanpa basa-basi, atau *thokmelong*. Sifat ini lahir dari sejarah kita sebagai **Mancanegara Kilèn** (wilayah terluar) yang jauh dari kontrol feodal Keraton (*adoh ratu*), memungkinkan kita memiliki **otonomi sosial dan egaliter**. Identitas ini, diperkuat oleh **Dialek Ngapak** yang kini bangkit menjadi simbol kebanggaan digital, adalah modal kultural kita yang tak ternilai.

Namun, buku ini lahir dari sebuah keprihatinan kami (Adiya, Adi dan Anang) yang mendalam. Kami yang tergabung dalam Lembaga Tunas Literasi Nusantara Banyumas mencoba untuk berkarya untuk Banyumas.

Jati diri luhur kita yang egaliter kini dikepung oleh **Paradoks Egalitarianisme Struktural**. Meskipun Banyumas mencatat kemajuan makroekonomi yang impresif, analisis kritis menunjukkan bahwa manfaat

pertumbuhan ini **tidak inklusif**. Ketimpangan struktural dan spasial yang persisten, sebuah warisan pahit dari sentralisme masa lalu, ditandai dengan **lonjakan Gini Ratio yang mengkhawatirkan** (mendekati batas ketimpangan tinggi). Ketidakadilan ini diperparah oleh krisis internal, seperti memudarnya gotong royong dan adanya **13.000 Anak Tidak Sekolah (ATS)** yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi struktural. Situasi ini membuat kami untuk berpikir, sekaligus berpikir dan menuangkan karya dalam bentuk buku yang berkontribusi untuk Banyumas.

Maka, buku ini adalah **panggilan sekaligus deklarasi**. Ia bertujuan untuk menelaah pergulatan sejarah Banyumas, dari fondasi petani merdeka yang menguasai hampir 80% lahan hingga tekanan kolonial dan Orde Baru, bukan untuk mengenang kegagalan, melainkan untuk merumuskan **cetak biru menuju masa depan yang adil**.

Melalui analisis komprehensif ini, kita berupaya menemukan **Pilar Transformasi Strategis** yang baru: menciptakan **Keadilan Spasial** dan **Industrialisasi yang Inklusif**, serta **menginternalisasi nilai *Cablaka* sebagai etika tata kelola yang transparan**.

Tujuan akhir dari buku ini adalah untuk secara nyata mewujudkan **Visi Banyumas Emas Berjiwa Jujur 2045**, di

mana kemakmuran ekonomi berkorelasi signifikan dengan penurunan ketimpangan struktural, sehingga **semangat wong cilik dapat dimenangkan kembali** dari cengkeraman ketidakadilan yang diwariskan sejarah.

Semoga karya ini menjadi sumbangsih nyata dalam perjuangan kita bersama untuk **memajukan dan membanggakan Banyumas**.

Banyumas, Oktober 2025.

Hormat Kami Penulis,

Aditya Hera Nurmoko

Annang Riyanto

Sekapur Sirih

Tego Suwarto
(Pemerhati Budaya)

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,
Rahayu.*

Sebagai warga yang memilih Banyumas sebagai tanah tumpah darah, saya menyaksikan dengan penuh apresiasi terhadap karya-karya putra daerah yang dengan tekun merawat jati diri budaya lokal. Semangat yang tercermin dalam buku ini sungguh menginspirasi.

Cablaka sebagai filosofi lokal-dengan kelugasan dan ketulusannya merupakan kekayaan budaya yang patut dilestarikan. Watak egaliter yang tumbuh dari sejarah Banyumas sebagai Mancanegara Kilèn telah membentuk masyarakat yang mandiri dan berkarakter. Kebanggaan akan Dialek Ngapak yang kini menguat di ruang digital semakin memperkaya khazanah budaya kita.

Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian yang dalam dari Adiya Hera N, Adi, dan Anang-para pegiat Lembaga Tunas Literasi Nusantara Banyumas dan Komunitas Literasi

ASNAWI Kemranjen. Sebagai warga Banyumas, saya melihat ini sebagai kontribusi berharga dalam membaca perkembangan daerah.

Temuan tentang Paradoks Egalitarianisme Struktural patut menjadi perhatian bersama. Di balik kemajuan ekonomi yang terlihat, ketimpangan yang ditunjukkan oleh Rasio Gini yang meningkat dan masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) perlu menjadi bahan refleksi kita semua. Melemahnya semangat gotong royong adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama.

Buku ini menawarkan jalan keluar melalui tiga pilar transformasi:

1. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan
2. Industrialisasi yang inklusif
3. Penguatan nilai Cablaka dalam tata kelola

Semua ini mengerucut pada visi Banyumas Emas Berjiwa Jujur 2045, cita-cita yang patut kita dukung bersama.

Sebagai bagian dari masyarakat Banyumas, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terwujudnya karya ini: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Camat Kemranjen, Kepala Desa Karangjati, serta para pegiat literasi di Komunitas ASNAWI dan Kemranjen.

Dedikasi Bapak Sugiyatno, Pak Narto, Mas Koko, Indaryanto, Gembes, Beny Sonet, Seger, Kyai Farkhan, Yahya, Ismi Rose, Sipras, Tedi, dan banyak lagi patut dihargai.

Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi memajukan Banyumas tercinta.

Banyumas, 1 November 2025

Kata Pengantar

Ika Suprihatin, S.STP.

(Camat Kemranjen)

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul Refleksi Empat Setengah Abad Dinamika Ekonomi dan Budaya Banyumas ini dapat hadir di tengah-tengah masyarakat. Buku ini merupakan ikhtiar intelektual yang patut diapresiasi, karena tidak sekadar merekam jejak sejarah, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungi perjalanan panjang Banyumas sebagai ruang hidup yang dibentuk oleh dinamika ekonomi, kebudayaan, serta kearifan lokal yang terus bertumbuh dari generasi ke generasi.

Empat setengah abad bukanlah rentang waktu yang singkat. Di dalamnya terhampar kisah tentang perubahan struktur ekonomi masyarakat, pergeseran pola produksi dan perdagangan, serta transformasi budaya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kekuasaan, kolonialisme, modernisasi, hingga globalisasi. Banyumas tumbuh bukan hanya sebagai wilayah administratif, tetapi sebagai entitas sosial-budaya yang memiliki karakter khas:

egaliter, lugas, dan berakar kuat pada nilai-nilai kerakyatan. Buku ini berhasil menangkap denyut itu dengan jernih dan bernas.

Sebagai Camat Kemranjen, saya memandang buku ini memiliki relevansi yang sangat penting, khususnya bagi penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Refleksi sejarah ekonomi dan budaya yang disajikan dalam buku ini memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan tidak boleh dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakatnya. Kemranjen, sebagai bagian integral dari Banyumas, turut mengalami dinamika tersebut, mulai dari perubahan lanskap agraris, tumbuhnya aktivitas ekonomi rakyat, hingga bertahannya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi penyangga kohesi sosial.

Buku ini juga mengingatkan kita bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukan semata-mata soal pertumbuhan ekonomi, melainkan tentang bagaimana kesejahteraan dapat dirasakan secara adil, berakar pada identitas lokal, dan selaras dengan nilai budaya masyarakat. Dalam konteks ini, refleksi historis menjadi kompas moral dan strategis agar kebijakan hari ini tidak tercerabut dari pengalaman masa lalu, serta mampu menjawab tantangan masa depan dengan bijaksana.

Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam lahirnya buku ini. Semoga kehadiran buku Refleksi Empat Setengah Abad Dinamika Ekonomi dan Budaya Banyumas dapat menjadi sumber pengetahuan, bahan diskusi, serta inspirasi bagi akademisi, birokrat, pelaku budaya, dan masyarakat luas dalam merawat sekaligus memajukan Banyumas.

Akhir kata, semoga buku ini memberi manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya kolektif kita dalam memahami jati diri Banyumas, masa lalunya, realitas kekiniannya, dan arah masa depannya.

Banyumas, 5 November 2025.

Daftar Isi

Sambutan.....	iii
Sekapur Sirih.....	vi
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi	xii
BAB 1 Dari Pasir Luhur ke Mancanegara Kilèn, Fondasi Historis dan Identitas Budaya Banyumas (Abad ke-16 hingga Awal Kolonial)	1
BAB 2 Kisah Tanah Banyumas: Dari Sapi Perah Kolonial Menuju Ketangguhan Rakyat (Abad Ke-19—Awal Abad Ke-20)	22
BAB 3 Perubahan Sosial Budaya Masa Kolonial	40
BAB 4 Banyumas dalam Pusaran Perjuangan Kemerdekaan (1930-an - 1949)	86
BAB 5 Masa Awal Kemerdekaan dan Fondasi Pembangunan Banyumas (1950-an - Orde Lama)	115
BAB 6 Era Modernisasi Dan Industrialisasi Orde Baru Di Banyumas (1966-1998): Transisi Ekonomi, Konsekuensi Spasial, Dan Warisan Ketimpangan	124
BAB 7 Dinamika Ekonomi Kontemporer Banyumas (Pasca-1998 - Kini): Menguak Resiliensi, Kesenjangan, dan Visi Hijau	145

BAB 8 Perkembangan Sosial Kontemporer Kabupaten Banyumas: Paradox IPM Tinggi dan Jurang Kesenjangan Struktural	159
BAB 9 Budaya Banyumas Di Era Modern: Negosiasi Identitas, Komodifikasi Seni, dan Resiliensi Kultural.....	181
BAB 10 Banyumas dalam Arus Globalisasi.....	207
BAB 11 Evaluasi Komprehensif Empat Setengah Abat Dinamika Banyumas (Abad Ke-16 – Kontemporer)	234
BAB 12 Gagasan untuk Pembangunan Ekonomi Banyumas di Masa Depan Cetak Biru Menuju Pembangunan Inklusif dan Berbasis Kultural.....	257
BAB 13 Gagasan untuk Pengembangan Sosial dan Budaya Banyumas di Masa Depan.....	275
BAB 14 Kesimpulan.....	302
Daftar Pustaka	310
Tentang Penulis.....	335

BAB 1

Dari Pasir Luhur ke Mancanegara Kilèn, Fondasi Historis dan Identitas Budaya Banyumas (Abad ke-16 hingga Awal Kolonial)

Menjelajahi Fondasi Banyumas yang Lestari

Periode antara abad ke-16 hingga awal era kolonial merupakan rentang waktu yang fundamental dan titik krusial dalam sejarah pembentukan identitas Banyumas yang lestari (Purwoko, 2017).¹ Kajian ini memusatkan perhatian pada era tersebut, menelaah bagaimana wilayah yang secara geopolitik berada di pinggiran ini mampu mengkristalkan identitasnya yang khas sebelum mengalami transformasi signifikan akibat intervensi kolonial intensif yang dimulai sekitar tahun 1830 (Nurwanti et al., 2015; Sukardi, 2015).² Fokus pada periode ini memungkinkan

¹ Analisis interpretif yang mendalam mengenai pembentukan identitas dan karakter masyarakat Banyumas. Karya ini menjadi fondasi utama penentuan periode kajian (Abad ke-16 hingga Awal Kolonial) dan menjelaskan korelasi antara posisi mancanegara dengan egaliterisme sosial dan ekonomi (Sistem Perlimaan).

² Memberikan konteks historis mengenai batasan waktu akhir kajian (awal kolonial) dan informasi mengenai kesuburan tanah agraris Banyumas serta komoditas yang diusahakan sebelum era Tanam Paksa

identifikasi elemen-elemen inti yang bersifat *endogen*, yang mendefinisikan karakter “wong Banyumas.”

Pada masa ini, terjadi pembentukan pemerintahan formal melalui pendirian Kadipaten pada tahun 1582, pengukuhan ciri-ciri budaya yang unik seperti dialek Ngapak dan nilai *Cablaka*, serta integrasi pengaruh eksternal—khususnya Islamisasi—secara adaptif dan damai. Analisis historis ini sangat bergantung pada sumber-sumber tradisional seperti *Babad Banyumas*, yang telah dikategorikan menjadi setidaknya 15 versi berbeda oleh para peneliti (Priyadi, 1995a).³ Dengan membedakan fondasi kultural ini dari dampak struktural kolonial pasca-1830, dimungkinkan untuk memahami mengapa masyarakat Banyumas menampilkan semangat egaliter dan ketangguhan sosial yang khas.

(Nurwanti, Y. H., Harnoko, D., & Larasati, T. A., 2015). Kajian tentang dampak intervensi kolonial pasca-1830 yang digunakan sebagai titik batas (*terminus post quem*) untuk mendefinisikan identitas endogen Banyumas sebelum terjadi perubahan struktural kolonial yang intensif (Sukardi, T., 2015).

³ Analisis klasik terhadap 15 versi *Babad Banyumas* yang merupakan sumber historiografi tradisional utama dan vital dalam merekonstruksi sejarah lokal, pendirian Kadipaten, dan tokoh-tokoh kunci Banyumas.

I. Tonggak Pendirian: Politik, Mitos, dan Kristalisasi Entitas (1582 M)

A. Legitimasi Nama dan Wilayah: Dari Kejawar ke "Banyu-Emas"

Akar sejarah Banyumas sebenarnya terentang jauh sebelum abad ke-16, tercermin dari jejak Kerajaan Galuh Purba yang berdiri di sekitar Gunung Slamet pada abad ke-4 Masehi. Namun, identitas spesifik sebagai entitas politik dan budaya baru mengkristal pada era ini, terkait dengan trah Majapahit, Pasirluhur, dan Wirasaba.⁴ Nama "Banyumas" sendiri diselimuti oleh berbagai legenda yang bertujuan memberikan legitimasi dan makna mendalam.

Versi yang dianggap "dinas" (resmi) mengisahkan bahwa nama tersebut muncul pada masa pemerintahan bupati generasi keempat. Narasi ini menceritakan kekeringan panjang di Kejawar—pusat pemerintahan awal—yang berakhir setelah seorang asing (Langlanggati atau Kaligajati) menancapkan tombak, menyebabkan hujan lebat turun. Seruan warga yang gembira, "banyu, banyu, banyu" (air) dan "emas, emas, emas" (emas), kemudian bergabung menjadi "Banyu-emas," lalu disederhanakan

⁴ Studi historis yang menelusuri proses Islamisasi di Banyumas, termasuk saluran penyebaran melalui perdagangan, perkawinan, dan seni budaya, serta konteksnya dalam narasi Babad Banyumas (Nugroho, I. S., Setiani, R. E., & S, D. I. (2024). Islamisasi Banyumas: Studi Historis Berdasarkan Babad Banyumas. *Jurnal Intelektual*, 9(1), 179–198).

menjadi "Banyumas" (I. S. Nugroho et al., 2024; Priyadi, 2003, 2007; Shaleha et al., 2023). Narasi ini secara simbolis mengaitkan wilayah tersebut dengan kemakmuran, kelimpahan, dan intervensi ilahi, memperkuat identitasnya sebagai tanah yang diberkahi. Versi etimologis lainnya, seperti penemuan "kayu mas" atau persinggahan Adipati Mrapat di Sungai Mas, juga melambangkan pencarian kejayaan atau *zaman keemasan* bagi trah Wirasaba (Priyadi, 2003).⁵

B. Raden Joko Kahiman: Pendiri Dinasti dan Visi Kepemimpinan

Tonggak utama pembentukan Banyumas adalah pendirian Kabupaten secara formal pada tahun 1582 Masehi oleh Raden Joko Kahiman, yang kemudian dikenal sebagai Adipati Mrapat. Raden Joko Kahiman, yang berasal dari Pasir Luhur dan menjalani pelatihan di Wirasaba, mendirikan pusat administrasi baru di hutan Mangli, wilayah Kejawar. Tindakan ini merupakan kristalisasi identitas politik yang berbeda.

Etos kepemimpinan yang ditanamkan oleh Adipati Mrapat dihormati dalam sejarah lokal, di mana ia dijuluki

⁵ Analisis mendalam mengenai karakter masyarakat Banyumas, terutama terkait dengan sifat egaliter, keterusterangan (blak-blakan), dan nilai-nilai sosial yang dipengaruhi oleh jarak dari Keraton Mataram

sebagai "SATRIA yang sangat luhur," yang melambangkan semangat juang tangguh, persatuan kuat, dan komitmen mendalam terhadap kesejahteraan rakyatnya. Fondasi filosofis tata kelola ini terangkum dalam Candra Sengkala "BEKTINING MANGGALA TUMATANING PRAJA," yang berarti "Pengabdian Pemimpin bagi Keteraturan Negara". Penanaman nilai ini sejak awal pendirian menekankan bahwa kepemimpinan di Banyumas, meskipun tunduk pada otoritas pusat (Mataram), harus berorientasi pada kesejahteraan lokal.

Tindakan strategis awal Joko Kahiman juga melibatkan pembagian wilayah. Kejawar menjadi pusat inti, sementara Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma, Wirasaba kepada Kyai Ngabei Wargawijaya, dan Banjar Petambakan juga termasuk dalam pembagian awal. Pembagian ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga meletakkan dasar bagi entitas regional yang lebih luas, yang kini dikenal sebagai *Barlingmascakeb* (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen). Perpindahan pusat kekuasaan ke Kejawar/Banyumas, jauh dari Wirasaba yang merupakan pusat lama Mataram, dapat dipahami sebagai upaya politis Adipati Mrapat untuk mendefinisikan kedaulatan lokal dan mengamankan visi *BEKTINING*

MANGGALA TUMATANING PRAJA yang berfokus pada kesejahteraan daerah pinggiran.

II. Geopolitik Perbatasan: Banyumas di Persimpangan Mataram dan Sunda

A. Status Mancanegara Kilèn: Jarak dari Kraton dan Otonomi Relatif

Secara geopolitik, Banyumas memegang status yang unik. Wilayah ini ditetapkan sebagai *mancanegara kilèn* (wilayah terluar bagian barat) dari Kerajaan Mataram, Kartasura, hingga Kasunanan Surakarta. Dalam pola konsentris Kerajaan Mataram Islam, *Mancanegara* adalah wilayah di luar *Negaragung* dan *Kutagara*, meliputi Banyumas, Cilacap, Sumedang, Galuh, dan Priangan.

Status sebagai wilayah perbatasan ini memiliki implikasi politik dan sosial yang mendalam. Jarak fisik yang jauh dari pusat kekuasaan (*kraton*) di Mataram memberikan otonomi dan *keleluasaan relatif* bagi Banyumas dalam memilih pemimpin dan mengelola urusan internal (Purwoko, 2017). Tugas utama bupati lokal adalah menunjukkan kesetiaan kepada raja melalui *upeti* berupa hasil bumi dan menyediakan prajurit (*pancen*) pada masa perang, bukan ketaatan birokratis yang ketat.

Kondisi geopolitik ini diinternalisasi menjadi filosofi sosial, yang dicerminkan dalam ungkapan "perek watu adoh

ratu" (dekat dengan alam/batu dan jauh dari raja). Filosofi ini secara sadar menempatkan masyarakat pada orientasi kelas bawah (*wong cilik*), menjauhkan mereka dari etiket feodal *priyayi* yang kaku. Dalam konteks budaya Jawa, kekuasaan terpusat memaksakan hierarki sosial melalui sistem etika berbahasa (*ungguh-ungguh*). Jarak dari pusat (*adoh ratu*) secara fisik dan psikologis memutus mata rantai kontrol ideologis Kraton, sehingga menciptakan ruang bebas bagi budaya yang lebih egaliter dan terbebas dari etiket feodal yang kaku.

B. Simbol Sinkretisme: Budaya Jawa-Sunda dan Tokoh Carub Bawor

Posisi Banyumas di perbatasan budaya Jawa (yang dipengaruhi Majapahit dan Mataram) dan Sunda (yang dipengaruhi Pajajaran dan Pasir Luhur) telah menghasilkan identitas sinkretis yang khas, tidak sepenuhnya Jawa Keraton maupun Sunda.

Perpaduan budaya ini disimbolkan secara sempurna oleh tokoh *panakawan* **Carub Bawor** dalam pewayangan *gagrag Banyumasan*. Bawor, yang merepresentasikan percampuran pengaruh Sunda-Pasirluhur dan Jawa-Wirasaba, mencerminkan sifat inklusif dan keterusterangan masyarakat Banyumas. Karakteristik Bawor yang berbeda dari *panakawan* Keraton menunjukkan kemampuan

masyarakat Banyumas untuk mempertahankan tatanan sosial yang teratur sambil mempromosikan keterbukaan dan kedekatan antar individu. Proses ini menghasilkan budaya marginal atau *budaya tanggung* yang unik, yang lebih bebas, apa adanya, dan tidak terikat pada hierarki budaya adiluhung Keraton.

III. Struktur Sosial Agraris: Hierarki Feodal dalam Bingkai Egaliterisme Lokal

A. Tatanan Birokrasi dan Kontrol Tanah

Struktur sosial Banyumas pada masa pra-kolonial masih dicirikan oleh sistem feodalisme Jawa, di mana raja (Mataram) adalah pemilik tanah mutlak, dan bangsawan (*priyayi*) atau pejabat birokrasi memperoleh *tanah jabatan* (*apanage* atau *feodum*) sebagai alat untuk memerintah rakyat (Supriyono, 2010). Pejabat lokal seperti bupati di *Mancanegara Kilèn* diangkat berdasarkan *kesetiaan*, dengan kewajiban utama mengumpulkan *upeti* dan menyediakan prajurit.

Meskipun stratifikasi formal yang membedakan *priyayi* dan *wong lumprah* (*wong cilik*) serta *ascribed status* (status berdasarkan darah) tetap berlaku, masyarakat Banyumas menunjukkan kecenderungan egaliter yang kuat. Hal ini didukung oleh jarak dari keraton, yang melemahkan

pengaruh etika feodal yang kaku. Egalitarianisme ini terwujud dalam konsep "basis keluarga inti" yang meluas, di mana tetangga terdekat dianggap sebagai keluarga sendiri, yang diperkuat oleh ungkapan "timbang pager wesi, mendhingan pager tai" (daripada pagar besi, lebih baik pagar tahi/kotoran) yang melambangkan solidaritas kolektif.

B. Fondasi Perekonomian yang Mandiri: Tirta Kamulyan

Perekonomian Banyumas pada periode ini sepenuhnya berlandaskan pada sektor agraris. Wilayah ini dikenal sangat subur, didukung oleh lapisan vulkanis muda dan persawahan yang ideal untuk budidaya padi, tebu, dan indigo (Nurwanti et al., 2015; Sondarika, 2015). Kemandirian pangan didukung oleh sistem irigasi teknis di Sungai Serayu yang disebut **Jalur Tirta Kamulyan**. Berdasarkan *Babad Banyumas Wirjaatmadjan* (1898), sistem ini memungkinkan petani mencapai *3 kali panen padi tahunan* sejak tahun 1585, dengan produktivitas tinggi mencapai 2,8 ton per hektar. Kemampuan produksi yang stabil ini menempatkan Banyumas jauh dari sekadar wilayah subsisten dan mengintegrasikannya ke dalam jaringan perdagangan regional, dibuktikan dengan

keberadaan Pasar Menganti sebagai hub perdagangan menuju Cirebon.

C. Mekanisme Distribusi dan Otonomi Petani

Struktur ekonomi agraris diatur melalui *Sistem Perlimaan* (bagi hasil) pra-kolonial. Sistem ini, yang dianalisis melalui rekonstruksi *Babad Banyumas KBG 526*, menunjukkan alokasi hasil panen yang relatif menguntungkan petani penggarap.

Sistem Perlimaan memberikan alokasi yang relatif besar kepada petani. Petani penggarap menerima 40% (2/5 bagian), sementara *Bekel* (Kepala Desa) menerima 20% (berupa tanah bebas pajak). Sisanya dibagi untuk pejabat regional (Bupati dan Demang) dan Kas Kerajaan (Mataram).⁶

⁶ Purwoko, O. E. (2017). Reclaiming Banyumas Identity an Interpretive Study about Identity and Character of Local Society Based on Literary Studies of History, Attitudes, Behavior, Arts and Culture. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 10(1), 128–141.

Struktur Alokasi Hasil Panen Banyumas (Sistem Perlindungan Pra-Kolonial)

Pihak Penerima	Persentase Alokasi (Rekonstruksi)	Bentuk Alokasi/Kewajiban
Petani Penggarap	40% (2/5 bagian)	Subsistensi dan modal kerja.
Bekel (Kepala Desa)	20% (1/5 bagian)	Tanah bebas pajak, kompensasi administrasi.
Bupati & Pejabat Distrik	32% (Sisa 2/5 dibagi)	Hak <i>memungut</i> pajak hasil agraria/tenaga kerja.
Kas Kerajaan (Mataram)	8%	Upeti wajib (bukti kesetiaan).

Otonomi petani Banyumas diperkuat oleh perbandingan struktur pertanahan dengan wilayah pusat Mataram, seperti Surakarta, berdasarkan data kolonial sekitar tahun 1820.⁷

⁷ Purwoko, O. E. (2017). Reclaiming Banyumas Identity an Interpretive Study about Identity and Character of Local Society Based on

**Perbandingan Struktur Pertanian: Banyumas
(Mancanegara Kilèn) vs. Surakarta (Pusat Mataram)
(Estimasi 1820)**

Parameter	Banyumas	Surakarta
Lahan Dikelola Petani Langsung	78%	35%
Lahan Apanage Bangsawan	15%	50%
Tanah Langsung Milik Kerajaan	7%	15%

Perbedaan mencolok dalam alokasi lahan ini menunjukkan bahwa meskipun Banyumas secara politik tunduk sebagai *mancanegara kilèn*, basis ekonominya dibangun di atas fondasi *petani merdeka* yang menguasai hampir 80% lahan. Rendahnya porsi *apanage* (15%) dan tingginya kendali petani secara langsung merupakan bukti empiris yang mendukung klaim egaliterisme Banyumas. Petani yang makmur dan mampu panen tiga kali setahun memiliki kemandirian finansial yang mengurangi ketergantungan pada patronase *priyayi*. Otonomi ekonomi ini secara langsung berkorelasi dengan otonomi sosial, yang pada gilirannya menghilangkan kebutuhan untuk

Literary Studies of History, Attitudes, Behavior, Arts and Culture.
KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 10(1), 128-141.

mengadopsi etika feodal yang berbelit-belit, sehingga memperkuat karakter budaya yang lugas dan terbuka.

IV. Spirit Banyumasan: Dialek Ngapak dan Nilai Cablaka sebagai Identitas Inti

A. Dialek Ngapak: Manifestasi Bahasa Ngoko Jawadipa dan Egaliterisme

Identitas budaya *wong Banyumasan* ditandai secara menonjol oleh penggunaan **dialek Ngapak** (Isrofiah Laela Khasanah & Heri Kurnia, 2023). Ciri khas dialek ini adalah pengucapan yang *mantap (luged)*, *tegas*, *lugas*, dan yang paling penting, pelafalan konsonan /k/ secara penuh di akhir kata (C. Nugroho & Kusuma, 2023).

Dialek Banyumasan diyakini sebagai *bentuk asli (tulen)* atau **basa ngoko Jawadipa** (bahasa *ngoko* Tanah Jawa), yang merupakan tataran pertama dalam hierarki bahasa Jawa baku. Secara historis, dialek ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa Kuno, Jawa Pertengahan, dan bahasa Sunda. Letak Banyumas yang jauh dari pusat Keraton Jawa (Yogyakarta dan Surakarta) membuat pengaruh *ungguh-ungguh* (tingkat tutur) feodal tidak begitu kuat. Akibatnya, dialek Ngapak bersifat **demokratis dan egaliter**, tidak membedakan lapisan bahasa secara ketat, memungkinkan

komunikasi akrab (*ngoko* atau *ngoko andhap*) antara orang berpangkat tinggi dan masyarakat awam.

Meskipun dialek Ngapak merupakan kebanggaan, terdapat dilema identitas karena stereotip negatif di luar daerah. Dialek ini sering dianggap sebagai bahasa kelas rendahan, bahasa *jongos*, atau dipandang kasar dan lucu. Perasaan *minder* atau malu ini menjadi tantangan pelestarian. Namun, bagi komunitas perantauan, seperti IWAKMAS, dialek Ngapak justru menjadi simbol kebanggaan dan identitas yang dijunjung tinggi, tercermin dalam jargon "Ora Ngapak Ora Dupak" (C. Nugroho & Kusuma, 2023).

B. Cablaka: Keterusterangan, Kebebasan, dan Filsafat Kritis

Inti dari karakter masyarakat Banyumas adalah nilai **Cablaka**. *Cablaka* didefinisikan sebagai cara bertutur yang *apa adanya, terus terang, lugas, tanpa basa-basi*, atau *thokmelong* (jelas dan mencolok) (Priyadi, 2007). Istilah lain yang memiliki makna serupa adalah *blakasuta* dan ungkapan *glogok soar*. Akar kata *cablaka* kemungkinan berasal dari *bocah blaka* atau *cah walaka*, yang berarti "anak yang apa adanya" atau "masih murni," mencerminkan kejujuran yang belum terkontaminasi pengaruh luar.

Sifat *Cablaka* ini merupakan antitesis terhadap sikap *ethok-ethok* (pura-pura) yang sering digunakan dalam

masyarakat Jawa umum untuk menghindari konflik. Bagi Banyumas, *Cablaka* adalah ekspresi jiwa yang bebas, lahir dari posisi marginal mereka yang jauh dari lingkungan keraton, yang mengurangi keterikatan sebagai klien patron feodal.

Manifestasi *Cablaka* sering disalahpahami oleh orang luar sebagai kurang *ungguh-ungguh* (etika), kasar, atau bahkan kurang ajar, terutama karena melibatkan perilaku seperti *glewehan* (bercanda berlebihan), *semblothongan* (semaunya sendiri), dan penggunaan kata *brecuh* (kotor) di antara sesama. Namun, bagi *wong Banyumasan*, ini adalah upaya *menghilangkan sekat sosial* dan menunjukkan keakraban.

Secara filosofis, *Cablaka* memiliki fungsi krusial sebagai mekanisme kritik sosial yang aman. Dalam sistem feodal Mataram, di mana kritik langsung berbahaya, masyarakat *Mancanegara Kilèn* menggunakan bahasa yang lugas (*thokmelong*) dan mengklaim budaya mereka sebagai "kasar" atau "urakan" untuk menciptakan ruang agar dapat berbicara jujur. Kemampuan untuk berbicara *blak-blakan* ini memungkinkan mereka untuk "memberikan penilaian lain terhadap penguasa" (Priyadi, 2003) menjaga integritas moral kolektif tanpa dikenai sanksi formal feodal. Nilai ini erat kaitannya dengan etos kerja keras agraris dan

kesederhanaan (*sikil nggo endhas*), serta nilai kebersamaan (*gemblung-gemblung ari rubung*).

V. Gelombang Transformasi: Islamisasi dan Akulturasi Budaya (Abad ke-16 hingga ke-17)

A. Proses Islamisasi yang Adaptif dan Damai

Islamisasi di Banyumas berlangsung secara dinamis dan adaptif, berbeda dengan beberapa wilayah di mana terjadi konflik terbuka. Proses ini terjadi melalui beberapa saluran utama, sejalan dengan pola penyebaran Islam di Nusantara, termasuk:

1. **Perdagangan:** Pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan Jawa bersosialisasi dan berdakwah.
2. **Perkawinan:** Pernikahan antara pedagang Muslim dan wanita pribumi, terutama dari keluarga bangsawan, berfungsi untuk mempercepat proses Islamisasi di kalangan elit (I. S. Nugroho et al., 2024).
3. **Pendidikan:** Sistem pesantren dan pondok, yang diselenggarakan oleh kiai dan ulama, menjadi jalur utama transmisi ajaran Islam. Sistem pesantren ini diperkirakan merupakan kelanjutan adaptif dari sistem asrama Hindu.

Peran kaum **Tasawuf** dan mistik sangat besar, karena sifat sufi yang *kompromis dan penuh kasih sayang* memudahkan pemaduan ajaran Islam dengan unsur-unsur

kebudayaan pra-Islam. Identitas pendiri Kadipaten Banyumas sendiri yang merupakan campuran dinasti Majapahit, Pasirluhur, dan Pajajaran menunjukkan adanya asimilasi antarsuku yang menonjol, yang memudahkan penerimaan Islam melalui jalur kekuasaan dan perkawinan.

B. Kesenian sebagai Jembatan Spiritual: Calung dan Lengger

Kesenian tradisional digunakan secara efektif sebagai media dakwah. Para wali menyisipkan ajaran Islam ke dalam seni ukir, arsitektur, sastra (*Babad*), wayang, dan gamelan. Di Banyumas, proses inkulturasi ini terlihat jelas melalui adaptasi seni pertunjukan:

1. **Calung:** Instrumen musik yang terbuat dari bambu ini diciptakan secara spesifik oleh Kyai Nurdaiman pada tahun 1755 dengan tujuan untuk mengumpulkan masyarakat saat peringatan Maulud Nabi Muhammad. Penggunaan instrumen lokal untuk perayaan keagamaan menunjukkan bahwa proses adaptasi Islam adalah proyek jangka panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas.
2. **Lengger/Ronggeng:** Kesenian yang awalnya merupakan ritual pemujaan Dewi Kesuburan dengan akar kuno, dipertahankan dan diinkulturasi

sebagai media sosial dan religi, meskipun kadang disalahartikan oleh pihak luar.

3. **Ebeg (Kuda Lumping):** Kesenian ini, yang terkadang diiringi calung, juga melibatkan ritual *ndadi* (kesurupan) dan atraksi aneh, yang menunjukkan sinkretisme spiritualitas lokal dengan kerangka Islamisasi yang fleksibel.

Penggunaan media komunal yang populer ini memastikan bahwa agama baru diterima melalui sarana yang dipahami dan disukai oleh *wong cilik* (petani), bukan melalui diktat teologis yang kaku.

C. Tipologi Islam Lokal: Sinkretisme dan Kebebasan Berbudaya

Proses Islamisasi yang adaptif di Banyumas menghasilkan tipologi Islam yang unik dan terakulturasi, yang memperkaya identitas sosial-budaya tanpa menghilangkan ciri khas lokal. Lingkungan yang jauh dari pusat Keraton Mataram memicu *sifat egaliter dan kebebasan berbudaya* yang khas dalam menyerap ajaran Islam. Meskipun terdapat perdebatan antara kelompok *putihan* (puritan) dan *abangan* (sinkretis), kebebasan berbudaya di *Mancanegara Kilèn* memastikan bahwa adaptasi Islam dilakukan dengan kompromi yang mempertahankan identitas lokal.

Meskipun demikian, masyarakat Banyumas seringkali merasa inferior dibandingkan dengan kebudayaan Keraton yang dianggap *adiluhung*. Namun, kondisi geografis dan kultural yang marginal telah membentuk budaya yang *kritis*, bebas, apa adanya, dan mampu memberikan penilaian alternatif terhadap kekuasaan, sebuah ciri yang dipertahankan melalui mekanisme adaptasi ini.

VI. Refleksi Kritis dan Warisan Identitas (Penutup Bab)

Periode abad ke-16 hingga awal kolonial (sebelum 1830) merupakan kurun waktu di mana identitas Banyumas terbentuk dari kekuatan yang lahir dari marginalitas. Jarak geografis sebagai *Mancanegara Kilèn (adoh ratu)* secara kausal menghasilkan otonomi politik dan *egaliterisme* budaya yang signifikan. Otonomi ini diperkuat oleh kemandirian ekonomi agraria.

Data tentang **Sistem Perlindungan** dan tingginya kendali petani atas lahan (78%) di Banyumas, dibandingkan dengan pusat Mataram, menunjukkan bahwa basis ekonomi masyarakat adalah **petani merdeka** yang tidak terikat erat oleh patronase feodal. Kemandirian ekonomi ini menghilangkan kebutuhan untuk mengadopsi etika feodal yang mahal dan berbelit-belit, sehingga memperkuat budaya yang jujur dan lugas. Keterusterangan masyarakat

diwujudkan dalam **Dialek Ngapak** (sebagai *ngoko Jawadipa* yang demokratis) dan nilai **Cablaka**. *Cablaka* adalah inti karakter Banyumas, berfungsi ganda: sebagai penanda *kejujuran* dan *kebebasan jiwa*, sekaligus sebagai mekanisme *kritik sosial* yang aman terhadap penguasa, di mana keterusterangan (yang dianggap kasar oleh orang luar) berfungsi sebagai ruang untuk berpendapat tanpa sanksi formal.

Warisan identitas yang terbentuk pada periode fundamental ini—dicirikan oleh semangat *SATRIA*, nilai kejujuran *Cablaka*, dan fondasi ekonomi yang mandiri—memberikan landasan kokoh dan resiliensi budaya bagi *wong Banyumas*. Karakter adaptif ini akan menjadi modal penting bagi masyarakat untuk menghadapi tekanan birokrasi dan eksploitasi ekonomi kolonial yang akan meningkat tajam di paruh kedua abad ke-19.

Sebagai penutup refleksi kritis, kekuatan utama bab ini terletak pada penarikan benang merah kausal yang jelas antara status geopolitik Banyumas sebagai *Mancanegara Kilèn* dengan lahirnya egalitarianisme sosial-ekonomi, sebuah tesis yang diperkuat oleh data perbandingan struktur pertanahan dan mekanisme *Sistem Perlimaan*. Selain itu, pendalaman filsafat *Cablaka* sebagai alat kritik sosial yang aman, bukan sekadar kekasaran,

memberikan analisis karakter yang berbobot. Namun, untuk memperkaya kajian ini ke depan, beberapa aspek perlu didalami. Pertama, analisis masih perlu dikonkretkan mengenai interaksi dan penggerusan otonomi lokal oleh VOC/Mataram pada periode antara Perjanjian 1705 hingga 1830, alih-alih hanya berfokus pada batas *terminus post quem* tahun 1830. Kedua, bab ini masih terlalu abstrak dalam pembahasan Islamisasi, yang akan lebih berbobot jika dapat mengidentifikasi atau menyebutkan nama ulama atau pesantren lokal yang signifikan di abad ke-17 atau ke-18 yang menjadi agen transmisi Islam di Banyumas. Terakhir, klaim bahwa Dialek Ngapak adalah *basa ngoko Jawadipa* akan semakin kukuh apabila didukung dengan bukti linguistik atau historis yang eksplisit, yang menghubungkan ciri khas fonetik Ngapak (pelafalan /k/ penuh) dengan status bahasa kuno di periode abad ke-16. Peluang pendalaman ini akan menjadikan pembahasan historis dalam bab ini semakin utuh dan mendalam.

BAB 2

Kisah Tanah Banyumas: Dari Sapi Perah Kolonial Menuju Ketangguhan Rakyat (Abad Ke-19—Awal Abad Ke-20)

I. Garis Tengah yang Berubah: Nasib Banyumas Setelah Perang Diponegoro

A. Lembah Serayu: Jantung Jawa yang Terjepit

Secara geografis, Banyumas memiliki daya tarik sekaligus tantangan. Wilayah yang didirikan sebagai kota pada abad ke-16 oleh Adipati Mrapat ini diberkahi dengan tanah vulkanis muda yang sangat subur, menjadikannya ideal untuk pertanian padi (Priyadi, 2018). Oleh karena itu, wilayah Lembah Serayu ini selalu menjadi incaran raja-raja Jawa (Priyadi, 2018).

Namun, terhimpit di antara Pegunungan Serayu Utara dan Selatan, Banyumas relatif terisolasi dari dunia luar. Kondisi ini, ditambah minimnya akses langsung ke laut dan jaringan jalan yang terbatas, membuatnya kurang strategis secara ekonomi pada masa awal (Comission, 2016; Nurwanti et al., 2015). Sebelum kedatangan Belanda,

Banyumas adalah bagian dari Mancanegara Kulon Kerajaan Mataram Islam. Kehidupan masyarakat desa saat itu didominasi oleh pertanian subsisten—memproduksi untuk kebutuhan sendiri—dengan ikatan komunitas yang kuat, di mana nilai sosial seringkali lebih berharga daripada keuntungan materi (Tanto Sukardi, 2017; T Sukardi, 2015).

B. "Harga Perang": Ketika Banyumas Dijual Murah

Titik balik bagi Banyumas adalah Perang Jawa (1825–1830). Perang ini membuat Pemerintah Hindia Belanda hampir bangkrut, menelan kerugian lebih dari 30 juta gulden (Basundoro et al., 2000). Untuk menambal kas yang kosong, Belanda butuh aset cepat, dan Banyumas diubah menjadi "*sapi perah*" (*cash cow*) kolonial (Nurwanti et al., 2015).

Sebagai kompensasi kerugian perang, Belanda memaksa Kasunanan Surakarta menyerahkan Banyumas dan Dayahluhur pada 22 Juni 1830 (Comission, 2016; Basundoro et al., 2000). Ironisnya, untuk wilayah seluas itu, Belanda hanya membayar uang reparasi sebesar 90.000 gulden (Comission, 2016; Basundoro et al., 2000). Nilai yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa Banyumas bukan dibeli untuk pembangunan, melainkan diambil karena potensi eksploitasinya yang cepat dan intensif (Comission, 2016; Basundoro et al., 2000).

C. Struktur Kekuasaan Baru: Fondasi Eksploitasi

Segera setelah pengambilalihan, Belanda bergerak cepat. Struktur kekuasaan tradisional Kasepuhan dan Kanoman dibubarkan, dan pada 18 September 1830, Karesidenan Banyumas resmi dibentuk, dengan Tuan De Sturler sebagai Residen pertama (Comission, 2016; Nurwanti et al., 2015; T Sukardi, 2015).

Langkah administratif ini bukan sekadar pergantian nama. Belanda segera menginventarisasi luas wilayah, kondisi tanah, dan jumlah penduduk. Tujuannya jelas: untuk perencanaan kota, mempermudah kebijakan, dan yang paling penting, mempermudah penarikan pajak (Comission, 2016; Nurwanti et al., 2015). Pembangunan kantor Residen dan rumah dinas yang megah dengan gaya Empire Style menegaskan dominasi Eropa. Posisi kantor Residen menjadi sangat sentral, berfungsi untuk menggerakkan pemerintahan dan perekonomian "dari dan menuju hinterland" (pedalaman) (Comission, 2016). Ini menunjukkan pedalaman dipandang sebagai sumber daya yang harus diekstraksi untuk menjalankan sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang segera diberlakukan (T Sukardi, 2015; Tanto Sukardi, 2017).

Tahun	Peristiwa Kunci	Implikasi Ekonomi dan Sosial
1825–1830	Perang Diponegoro (Perang Jawa)	Kerugian finansial besar Belanda (30 Juta), memicu kebutuhan sumber pendanaan baru (Basundoro et al., 2000).
22 Juni 1830	Penyerahan Banyumas ke Hindia Belanda	Berakhirnya kekuasaan Mataram, Banyumas menjadi "barang tebusan" untuk eksploitasi intensif (Comission, 2016).
1830–1870	Cultuurstelsel (Tanam Paksa)	Pergeseran paksa ke komoditas ekspor, beban pajak ganda, penyerahan paksa hasil bumi (contingenten)

Tahun	Peristiwa Kunci	Implikasi Ekonomi dan Sosial
		yang tinggi (Nurwanti et al., 2015).
1838	Pendirian Pabrik Gula Kalibagor	Awal revolusi industri gula, penggunaan masif lahan sawah komunal desa.
1870	Agrarische Wet (UU Agraria)	Era Liberal, tanah disewakan ke modal swasta (hingga 75 tahun), munculnya sistem upah rendah (ALEXANDER, 2010; Comission, 2016).
1896	Jaringan Kereta Api SDS Mulai Beroperasi	Pembangunan infrastruktur ekstraktif (rel) dan sentralisasi logistik menuju Cilacap

Tahun	Peristiwa Kunci	Implikasi Ekonomi dan Sosial
		(Basundoro et al., 2000).
1930–1940	Krisis Malaise (Depresi Besar)	Penutupan pabrik gula (14 unit), PHK massal, migrasi darurat (15.000 buruh), kelaparan, dan wabah penyakit (Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015).

II. Era Tebu dan Kopi: Cengkeraman Tanam Paksa (1830–1870)

A. Mesin Uang Belanda: Sistem Tanam Paksa

Sejak 1830, Banyumas menjadi arena eksploitasi intensif melalui Cultuurstelsel. Sistem ini mewajibkan penduduk menanam komoditas yang laku dijual di Eropa, seperti kopi (di lereng Gunung Slamet), nila, tembakau, dan terutama tebu, untuk mendapatkan keuntungan maksimal (Nurwanti et al., 2015; Arinda et al., 2017).

Laporan Residen J.I. van Sevenhoven pada 1832 menggambarkan kekejaman sistem ini: distrik Banyumas diwajibkan menyeter 40% panen padi dan 60% hasil kebun sebagai contingenten dan leverantien (Nurwanti et al., 2015). Akibatnya, rakyat Banyumas terpaksa makan gaplek dan hasil hutan karena kebutuhan pangan mereka dikorbankan demi target setoran (Nurwanti et al., 2015). Hasil bumi ini diangkut melalui Sungai Serayu dan kanal buatan (Kali Yasa atau Kali Gawe) menuju Pelabuhan Cilacap (Tanoyo & Sari, 2022).

B. Revolusi Gula dan Perampasan Tanah

Banyumas cepat menjadi pusat penanaman tebu di Jawa bagian selatan. Penggunaan sawah untuk tebu dimulai pada 1838 dengan berdirinya Pabrik Gula Kalibagor, pabrik gula pertama dan tertua di Karesidenan Banyumas.

Lahan yang dipakai sebagian besar adalah tanah komunal milik desa. Kontrak sewa dilakukan antara pihak perkebunan dan kepala desa, secara efektif merusak hak kepemilikan tanah pribadi yang ada (Tanto Sukardi, 2017). Kontrak ini diperpanjang dari tiga tahun menjadi 20 tahun sejak 1857, mengikat lahan desa dalam eksploitasi jangka panjang (Comission, 2016; Tanto Sukardi, 2017). Meskipun petani membubuhkan cap jari pada kontrak sewa, uang sewa yang diterima rakyat sering habis dipotong untuk

membayar pajak dan berbagai pungutan lainnya, sehingga tidak memberikan manfaat finansial yang berarti (Nurwanti et al., 2015).

C. Eksploitasi Berlapis: Pajak yang Lebih Mahal dari Hasil Panen

Sistem kolonial menjalankan eksploitasi ganda: selain dipaksa menanam komoditas ekspor, rakyat juga dikenai pajak yang jauh lebih berat daripada masa kekuasaan Surakarta (Nurwanti et al., 2015).

Secara teori, petani yang menanam komoditas wajib seharusnya dibebaskan dari pajak tanah (landrent stelsel). Namun, faktanya menunjukkan sebaliknya. Antara 1885 hingga 1890, petani Banyumas diwajibkan membayar pajak tanah sebesar 42,48 gulden per bau, padahal hasil pendapatan mereka dari menanam tebu di tanah itu hanya sekitar 25 gulden per bau (Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015). Pajak yang lebih tinggi daripada pendapatan bersih ini memastikan petani selalu merugi dan terjebak dalam lingkaran utang abadi, memaksa mereka memasuki ekonomi uang kolonial hanya demi bertahan hidup (Nurwanti et al., 2015).

Tahun	Banyumas (ton)	Surakarta (ton)	Rasio (Banyumas:Surakarta)
1870	12,500	85,000	1:6.8
1880	28,700	112,400	1:3.9
1900	41,200	98,500	1:2.4

Meskipun produksi gula Banyumas meningkat hampir empat kali lipat dalam 30 tahun, peningkatan rasio yang drastis ini menunjukkan intensitas eksploitasi yang sangat cepat di wilayah ini (Nurwanti et al., 2015).

III. Era Liberal: Eksploitasi Berwajah Baru (1870–1900)

A. Membuka Pintu bagi Investor Swasta

Tahun 1870, dengan diterapkannya Agrarische Wet (UU Agraria) dan Kebijakan Pintu Terbuka, pengelolaan perkebunan dialihkan dari negara ke tangan modal swasta Eropa (Alexander, 2010; Commission, 2016). Investor diizinkan menyewa tanah hingga 75 tahun melalui hak *erfpacht* (Alexander, 2010).

Ini adalah pergeseran dari eksploitasi berbasis perintah langsung (*Cultuurstelsel*) ke eksploitasi berbasis

mekanisme pasar, yang ternyata jauh lebih sistematis dan efisien dalam mengeruk keuntungan (Barbalet, 1976). Pabrik-pabrik gula baru bermunculan, seperti di Klampok, Bojong, Kalimanah, Purwokerto, dan Majenang (Comission, 2016). Perusahaan-perusahaan swasta ini bertujuan tunggal: mencari keuntungan sebesar-besarnya, mengunci nasib ekonomi Banyumas pada kepentingan pemodal asing dalam jangka waktu yang sangat panjang (Comission, 2016).

B. Lahirnya Kelas Buruh Tani Tanpa Tanah

Ekonomi perkebunan swasta memperdalam stratifikasi sosial di desa (Tanto Sukardi, 2017). Masyarakat terbagi berdasarkan akses ke tanah. Kelompok elite adalah Kuli Kenceng (pemilik sawah luas), dan di bawahnya ada Kuli Kendho (pemilik kecil) (Tanto Sukardi, 2017).

Kelompok paling rentan adalah Mondok atau Numpang, yaitu penduduk yang tidak memiliki sawah dan pekarangan, yang terpaksa menjadi buruh harian di perkebunan atau pabrik. Lahan yang mereka garap kini disebut sawah doleg, istilah yang diambil dari kata Belanda *dagloner* (buruh harian), menggambarkan ironi bahwa petani miskin dipaksa bekerja sebagai buruh bergaji rendah di tanah milik komunal mereka sendiri (Tanto Sukardi, 2017). Penciptaan kelas Mondok ini

merupakan strategi untuk menjamin pasokan tenaga kerja yang terikat dan sangat murah (Tanto Sukardi, 2017).

C. Upah Minim dan Peran Pedagang Tionghoa

Meskipun disebut "tenaga kerja bebas," upah yang diterima buruh pribumi sangatlah rendah, rata-rata hanya beberapa sen, sekitar 20 sen per hari, dengan buruh wanita dibayar lebih rendah (Comission, 2016; Nurwanti et al., 2015). Upah ini hanya cukup untuk bertahan hidup, menjebak mereka dalam kemiskinan (Comission, 2016).

Kebutuhan akan uang tunai untuk membayar pajak memaksa petani/buruh bergantung pada pedagang perantara dan kreditur. Etnis Tionghoa memainkan peran penting di sini, bertindak sebagai pedagang perantara antara petani dan perusahaan ekspor Belanda, serta menyediakan layanan kredit (Comission, 2016; Nurwanti et al., 2015). Ini menciptakan eksploitasi berlapis: buruh dieksploitasi oleh perusahaan gula melalui upah rendah, dan kemudian oleh pedagang perantara, memastikan kekayaan terus mengalir ke luar dari tangan pribumi (Nurwanti et al., 2015).

IV. Modernisasi Ekstraktif dan Pusat Konektivitas

A. Jaringan Kereta Api untuk Ekspor

Pembangunan infrastruktur di Banyumas selama kolonialisme didorong oleh kebutuhan ekstraksi, bukan kesejahteraan rakyat (Basundoro et al., 2000). Pengembangan transportasi modern dimulai oleh SDS (Serajoedal Stoomtram Maatschappij) pada tahun 1896, yang membangun jalur kereta api dari Maos–Purwokerto Timur dan jalur Purwokerto–Wonosobo (Basundoro et al., 2000).

Jalur kereta api Batavia–Kroya, yang rampung pada 1917, menjadi infrastruktur paling vital. Jalur ini meningkatkan kapasitas angkut gula secara drastis, dari sekitar 50 ton per hari (menggunakan gerobak) menjadi lebih dari 300 ton per hari (Basundoro et al., 2000). Peningkatan kapasitas sebesar 600% ini menunjukkan bahwa investasi kolonial didasarkan pada perhitungan keuntungan ekstraksi. Selain komersial, jalur ini juga berfungsi sebagai alat mobilisasi militer cepat, terbukti saat digunakan untuk memadamkan pemberontakan lokal pada 1926 (Basundoro et al., 2000).

B. Cilacap: Gerbang Logistik Kolonial

Pelabuhan Cilacap sangat sentral sebagai satu-satunya pelabuhan samudra di pantai selatan Jawa,

menjadikannya pintu gerbang utama untuk ekstraksi komoditas dari Lembah Serayu (Basundoro et al., 2000; Comission, 2016).

Pada masa awal, untuk mengatasi isolasi, komoditas diangkut melalui Sungai Serayu dan kanal buatan (Kali Yasa) menuju Cilacap (Tanoyo & Sari, 2022). Kehadiran jaringan kereta api SDS pada 1896 semakin memperkuat Cilacap sebagai terminal logistik penting untuk pengangkutan hasil perkebunan, terutama gula, ke pasar global (Basundoro et al., 2000; Comission, 2016). Kantor-kantor dagang pun berpindah ke Purwokerto dan Cilacap (Comission, 2016). Dengan demikian, Banyumas dipaksa terintegrasi dengan ekonomi global melalui jaringan ekstraktif yang dikendalikan oleh Cilacap sebagai titik koneksi (Comission, 2016).

V. Puncak Penderitaan dan Ketangguhan Rakyat

A. Ketika Gula Menjadi Racun: Krisis Malaise 1930-an

Krisis ekonomi global, dikenal sebagai Krisis Malaise (Depresi Besar), memukul Banyumas karena ekonominya terikat erat pada monokultur tebu (Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015). Anjloknya harga gula dunia menyebabkan kolaps total, memaksa penutupan 14 pabrik gula (Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015).

Krisis ini membuktikan bahwa swasembada pangan tradisional telah dihancurkan. Ketika sektor ekspor gagal, masyarakat tidak punya jaring pengaman (Arinda et al., 2017). Terjadi PHK massal, memicu migrasi darurat sekitar 15.000 buruh tani ke kota-kota besar (Arinda et al., 2017). Krisis pangan merajalela; warga terpaksa makan daun-daunan, ares pisang, gaber, atau gelang (Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015). Gizi buruk memicu wabah penyakit mematikan seperti gudig, koreng, patek, borok, influenza, dan malaria (Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015). Banyak keluarga terpaksa menjual barang berharga, bahkan atap rumah, demi bertahan hidup (Nurwanti et al., 2015).

B. Strategi Bertahan Hidup dan Adaptasi Ekonomi

Meskipun menghadapi bencana, masyarakat Banyumas menunjukkan ketahanan (Tanto Sukardi, 2017).

Pertama, upaya tanggap darurat dilakukan melalui program kolonisasi ke Lampung dan Palembang untuk mengurangi beban penduduk, serta pembukaan dapur umum dan proyek padat karya (Arinda et al., 2017). Keberhasilan Bupati Raden Sudjiman Mertadiredja membuka kembali Pabrik Gula Kalibagor pada 1936 menjadi titik harapan (Arinda et al., 2017).

Kedua, sektor kerajinan dan usaha kecil tumbuh menjadi penyelamat dan fondasi ketahanan (Nurwanti et al.,

2015; Tanto Sukardi, 2017). Warga melakukan diversifikasi pekerjaan ke usaha rumah tangga seperti membuat minyak kelapa, gula aren, dan batik (Nurwanti et al., 2015). Sentra kerajinan berkembang: Sokaraja dikenal dengan batik dan minyak kelapa, dan Sumpiuh dengan kerajinan logam (Nurwanti et al., 2015). Batik Banyumas bahkan mencapai masa emasnya pada 1930-an (Nurwanti et al., 2015). Ini menunjukkan bahwa ekonomi rakyat yang informal, yang sering diabaikan kolonial, justru menjadi penyangga vital ketika sistem kapitalis formal ambruk (Tanto Sukardi, 2017).

C. Spektrum Perlawanan: Dari Gerilya Hingga Pembangkangan Budaya

Masyarakat Banyumas merespons eksploitasi dengan perlawanan yang bervariasi. Perlawanan militer awal dipimpin oleh Kyai Ngabehi Singadipa, seorang tokoh lokal dan pengikut Pangeran Diponegoro, yang memimpin perlawanan gerilya (1825–1830) (Fauzi Wahyu Hidayat, 2021; Comission, 2016). Beliau menggunakan strategi cerdik seperti "Umpetan Jroning Kemben" untuk menghindari Belanda, menjadikannya simbol penolakan kuat.

Pada periode eksploitasi yang lebih masif, perlawanan bergeser ke bentuk non-militer atau

pembangkangan budaya. Ini termasuk penolakan masyarakat untuk bekerja pada hari-hari tertentu yang dianggap sakral, sebuah upaya untuk mempertahankan identitas budaya dan menolak sepenuhnya tuntutan kerja kolonial (Nurwanti et al., 2015). Selain itu, kebijakan Belanda yang menjadikan para bupati sebagai pegawai negeri yang digaji menyebabkan elit tradisional kehilangan legitimasi di mata rakyat. Kekosongan ini membuka jalan bagi munculnya elit alternatif, seperti ulama atau cendekiawan independen, yang kelak menjadi basis perlawanan moral bagi gerakan nasionalisme (Comission, 2016).

VI. Refleksi Kritis dan Warisan Kolonial

A. Warisan Struktural: Ketergantungan dan Ketidaksetaraan

Cengkeraman kolonial menciptakan ketergantungan struktural yang mendalam di Banyumas pada pasar eksternal dan modal asing (Nurwanti et al., 2015). Model ekonomi ekstraktif ini secara fundamental mengubah tatanan sosial-ekonomi lokal, dengan warisan pahit berupa penciptaan kelas buruh tani tanpa tanah (Mondok) yang sangat rentan (Tanto Sukardi, 2017).

Transformasi kota-kota, terutama Purwokerto dan Cilacap, menjadi pusat produksi dan distribusi adalah

konsekuensi langsung dari model ekstraktif ini, di mana pembangunan hanya melayani rantai pasokan kolonial (Comission, 2016). Bahkan, kritik internal dari kalangan Belanda sendiri, yang melahirkan gagasan Politik Etis, adalah pengakuan atas ketidakadilan struktural yang ditimbulkan oleh kebijakan ekonomi liberal yang eksploitatif ini (Comission, 2016).

B. Pembelajaran bagi Indonesia Kontemporer

Pengalaman Banyumas menawarkan pembelajaran kritis bagi Indonesia dalam membangun kedaulatan dan ketahanan nasional:

1. **Kedaulatan Ekonomi:** Ketergantungan berlebihan pada satu komoditas ekspor tunggal menciptakan kerentanan struktural yang parah, seperti pada Krisis Malaise (Arinda et al., 2017). Indonesia perlu memperkuat diversifikasi ekonomi dan menjamin ketahanan pangan domestik agar tidak terombang-ambing oleh fluktuasi pasar global.
2. **Pengelolaan Sumber Daya yang Adil:** Sejarah menunjukkan eksploitasi sistematis sumber daya alam dan manusia untuk keuntungan asing (Nurwanti et al., 2015). Penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya memberikan

manfaat inklusif bagi seluruh rakyat, mengatasi ketidaksetaraan yang merupakan warisan kolonial.

3. **Ketahanan Sosial dan Budaya:** Kekuatan ekonomi rakyat dan sektor kerajinan menjadi katup penyelamat saat ekonomi formal kolonial gagal (Tanto Sukardi, 2017). Ini menekankan pentingnya melestarikan nilai-nilai lokal dan memperkuat ikatan sosial sebagai fondasi ketahanan kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan dan globalisasi.

BAB 3

Perubahan Sosial Budaya Masa Kolonial

Periode kolonial di Banyumas, khususnya di bawah kekuasaan Belanda dari sekitar tahun 1830 hingga 1945, membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan dan kompleks. Interaksi antara intervensi kolonial, adaptasi budaya lokal, dan munculnya kesadaran nasional membentuk dinamika baru yang memengaruhi identitas Banyumas. Kedatangan penjajah Eropa, terutama Belanda, menandai titik balik penting dalam lanskap sosial budaya banyumas

Periode ini dimulai setelah Perang Diponegoro (1825-1830) ketika wilayah ini diambil alih dari Kasunanan Surakarta dan berada di bawah kekuasaan Belanda (Nurwanti et al., 2015), membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan dan kompleks. Intervensi kolonial, yang seringkali didorong oleh kepentingan politik dan ekonomi eksploitatif, berinteraksi dengan adaptasi dan resistensi budaya lokal, serta munculnya kesadaran nasional, membentuk dinamika baru yang memengaruhi identitas Banyumas. Kedatangan penjajah Eropa, terutama

Belanda, menandai titik balik penting dalam lanskap sosial budaya wilayah ini. Pengaruh budaya Eropa tidak hanya bersifat adopsi pasif, tetapi juga seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks dan bahkan upaya asimilasi oleh pihak kolonial.

Secara umum, peristiwa masa colonial bisa dilihat di tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Peristiwa-peristiwa di Masa Kolonial Belanda di Banyumas

Tahun	Peristiwa
1830	Pembentukan Karesidenan Banyumas
1839	Pembangunan Pabrik Gula Kalibagor
1886	Pembangunan jalur kereta api Yogyakarta-Cilacap melalui Kalireja
1888	Pembangunan Pabrik Gula Klampok
1896	Pembangunan jalur trem uap SDS Maos-Purwokerto-Banjarnegara
1913	Gandasubrata menjadi Bupati Banyumas
1919	Pembangunan Europeesche Lagere School (ELS) selesai
1927	Pembangunan Hollandsch-Inlandsche School (HIS) selesai
1933	Sudjiman Gandasubrata menjadi Bupati Banyumas

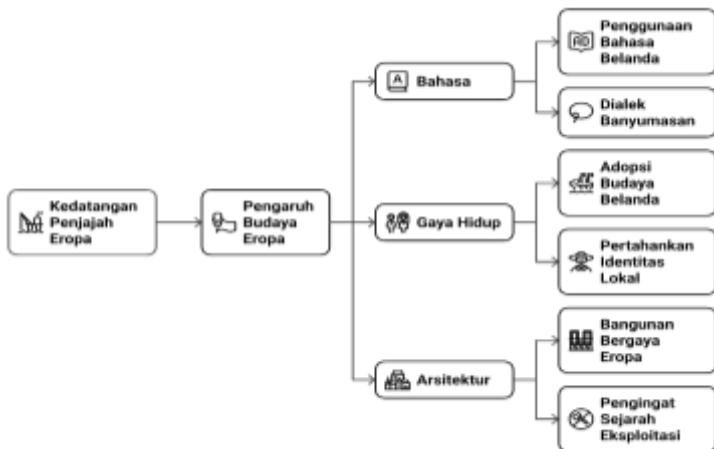
1936	Penggabungan Kabupaten Banyumas dan Purwokerto
1937	Ibu kota Karesidenan Banyumas dipindahkan ke Purwokerto

A. Pengaruh Budaya Eropa

Pengaruh budaya Eropa di Banyumas masa kolonial⁸ termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini termasuk arsitektur dan tata kota, pendidikan, bahasa dan etika sosial, gaya hidup, adat istiadat, dan nilai-nilai, serta infrastruktur. Intervensi kolonial ini tidak bertujuan untuk menghapus kultur lokal secara total, melainkan menciptakan sintesis kompleks yang mencerminkan adanya adaptasi dan asimilasi budaya.

⁸ Periode kolonial Belanda di Banyumas, yang berlangsung sekitar tahun 1830 hingga 1945, bukanlah sekadar masa penjajahan, melainkan sebuah "laboratorium" perubahan yang kompleks. Interaksi antara campur tangan Belanda, adaptasi masyarakat lokal, dan munculnya semangat kebangsaan telah membentuk identitas Banyumas yang baru dan dinamis.

Gambar 3.1
Pengaruh Budaya Kolonial di Banyumas



(Gambar dibuat berdasarkan uraian analisa)

Banyumas, sebagai wilayah yang dikuasai Belanda selama berabad-abad, tidak luput dari pengaruh budaya Eropa. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti:

1. Bahasa

Pada masa kolonial, bahasa Belanda diperkenalkan sebagai bahasa administrasi dan pendidikan di kalangan tertentu di Banyumas (Ummah, 2019). Sekolah-sekolah bergaya Barat, seperti Europeesche Lagere School (ELS)⁹

⁹ Europeesche Lagere School. Sekolah Dasar untuk anak-anak Eropa atau pribumi dari kalangan terkemuka (elit). Didirikan tahun 1893 di Purwokerto.

dan Hollandsch-Inlandsche School (HIS)¹⁰, menggunakan bahasa Belanda sebagai salah satu bahasa pengantar, yang mendorong masyarakat terdidik dan elit lokal menjadi fasih dalam bahasa ini. Meskipun akses pendidikan ini terbatas, penguasaan bahasa Belanda **melambangkan kekuasaan dan modernitas**

Namun, pengaruh ini tidak sepenuhnya menggantikan bahasa lokal. **Dialek Banyumasan tetap menjadi bahasa ibu dan alat komunikasi sehari-hari** bagi sebagian besar masyarakat, berfungsi sebagai **penanda identitas lokal**. Adanya **dualisme dalam penggunaan bahasa** ini mencerminkan dinamika sosial pada masa itu. Meskipun demikian, Banyumas secara historis berinteraksi dengan berbagai kebudayaan, termasuk Jawa Kuna, Jawa Pertengahan, dan Sunda, yang juga memengaruhi dialeknya (Priyadi, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh bahasa adalah proses multiarah, meskipun pengaruh Belanda memiliki dimensi kekuasaan yang unik.

Dalam bidang teknik, hukum, dan pemerintahan, banyak terminologi teknis berasal dari bahasa Belanda, mencakup istilah-istilah hukum dan administratif yang masih digunakan. Di Banyumas, unsur-unsur bahasa

¹⁰ Hollandsch-Inlandsche School. Sekolah Dasar untuk anak pribumi (pribumi) dari kalangan bangsawan atau tokoh terkemuka. Pembangunannya selesai tahun 1927.

Belanda terintegrasi ke dalam dialek lokal, meskipun tidak sebanyak di kota besar. Pengaruh Belanda juga terlihat dalam dokumen sejarah, hukum, dan literatur yang ditulis dalam bahasa Belanda, menjadi referensi penting dalam studi sejarah Indonesia. Dalam sastra, beberapa penulis Indonesia terinspirasi oleh gaya dan tema sastra Belanda. Beberapa peribahasa dan ungkapan dalam bahasa Indonesia, seperti "vooruit" (maju terus) dan "afgelopen" (selesai), memiliki asal-usul dari bahasa Belanda.

Banyak kata serapan dari bahasa Belanda yang masih digunakan hingga kini, seperti 'sepur' (kereta api), 'potlot' (pensil), 'jerigen' (wadah cairan), 'setip' (penghapus), 'pit' (sepeda), 'serbet' (kain lap), dan 'duit' (uang), "kantor" (kantoor), "komputer" (computer), "dokter" (dokter), "sekolah" (school), dan "kursi" (kurie). Dalam bahasa Jawa, kata-kata seperti 'potlot' dari 'potlood' (pensil), 'sepur' dari 'spoor' (jalur kereta), 'pit' dari 'fiets' (sepeda), dan 'setip' dari 'stuf' (penghapus) menunjukkan adopsi langsung dari bahasa Belanda. Pengaruh ini juga terlihat dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata seperti 'abnormal', 'absensi', 'bioskop', 'dosen', 'emosi', 'fakultas', 'gang', 'jas', 'kulkas', 'legendaris', 'lotre', 'masinis', 'mobil', 'nama', 'odol', 'omzet', 'prestasi', 'rak', 'razia', 'sablon', 'tropis', 'ultimatum', dan 'wol'. Selain kosakata, pengaruh

Belanda juga masuk dalam penggunaan sehari-hari, misalnya 'pulpen' dari 'vulpen' (alat tulis) dan 'blek' dari 'blik' (kaleng).

2. Gaya Hidup, Adat Istiadat, dan Nilai-Nilai

Pengaruh kolonial juga merambah ke dalam gaya hidup dan adat istiadat, terutama di kalangan elit pribumi. Keluarga bupati dan kaum *priyayi* mengadopsi beberapa aspek budaya Belanda, seperti penggunaan bahasa Belanda dalam percakapan sehari-hari (selain bahasa Jawa) dan tata krama Barat.¹¹ Dalam hal berpakaian, anak dan cucu Bupati Gandasubrata terlihat mengenakan pakaian bergaya Eropa seperti jas, kemeja, celana, rok, dan gaun untuk kegiatan sehari-hari, menunjukkan adopsi modernitas. Namun, pakaian adat Jawa tetap digunakan pada acara-acara khusus, mengindikasikan adanya **ambivalensi dan upaya mempertahankan identitas lokal**.

Interaksi dengan budaya Eropa juga kemungkinan memperkenalkan norma-norma sosial baru. Namun, nilai-nilai tradisional Jawa seperti *tatakrama* (sopan santun) dan penghormatan kepada yang lebih tua kemungkinan besar tetap dipertahankan, terutama di kalangan masyarakat

¹¹ Etiket Barat adalah aturan sopan santun dan tata krama yang berasal dari kebudayaan Eropa. Kontras dengan nilai tradisional Jawa seperti tatakrama.

pedesaan yang kurang terpapar langsung interaksi dengan Belanda.

3. Arsitektur dan Tata Kota

Pengaruh Eropa sangat jelas terlihat dalam arsitektur dan tata kota di Banyumas. Pemerintah kolonial mendirikan banyak bangunan bergaya Eropa, terutama di daerah seperti Menganti dan Kedung Uter. Bangunan pemerintahan, rumah-rumah orang Belanda, sekolah, stasiun kereta api, dan *societeit*¹² (tempat pertemuan/hiburan) menunjukkan perpaduan gaya Eropa dengan elemen tradisional Jawa (Nurwanti et al., 2015). Contoh spesifik termasuk Gedung Balai Kota Lama Banyumas dan bangunan-bangunan tua di Kota Lama Banyumas dengan pintu tinggi, jendela besar, dan veranda luas.

Di Purwokerto, perkembangan kota yang pesat setelah dibukanya jalur kereta api melibatkan pembangunan bangunan-bangunan kolonial. Bangunan-bangunan kolonial ini kini menjadi objek pelestarian, tetapi juga merupakan **peringat visual dari sejarah eksploitasi**

Gaya arsitektur Eropa mulai diterapkan dalam pembangunan berbagai gedung, seperti kantor

¹² Tempat pertemuan, klub, atau hiburan eksklusif bagi orang Eropa atau elit. Di Banyumas, ada Societeit Slamet (untuk Eropa) dan Panti Soemitro (untuk elit pribumi). Tempat rekreasi eksklusif.

pemerintahan, sekolah, dan tempat ibadah. Bangunan-bangunan ini umumnya memiliki ciri khas seperti penggunaan pilar, lengkungan, dan atap yang melengkung.

Pengaruh budaya Eropa di bidang arsitektur di Banyumas masa kolonial Belanda terlihat jelas dalam berbagai bangunan yang didirikan pada masa itu. Berikut beberapa contohnya:

a. Bangunan Pemerintah

Pendapa Kabupaten Banyumas: Bangunan ini didirikan pada tahun 1880 dengan arsitektur bergaya Eropa klasik. Ciri khasnya seperti penggunaan pilar, lengkungan, dan atap yang melengkung.



Sumber: babadbanyumas.com

Kantor Pos Purwokerto: Bangunan ini didirikan pada tahun 1910 dengan arsitektur bergaya Art Deco. Ciri

khasnya seperti penggunaan geometrik yang berani, warna-warna cerah, dan ornamen yang detail.



Sumber Gambar: wikimapia

b. Rumah Ibadah

Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto:

Bangunan ini didirikan pada tahun 1936 dengan arsitektur bergaya Neo-Gotik. Ciri khasnya seperti penggunaan menara runcing, jendela kaca patri, dan lengkungan lancip.



Sumber gambar: katedral-pwt.or.id

Masjid Besar Baiturrahman Purwokerto:

Bangunan ini didirikan pada tahun 1883 dengan arsitektur

yang memadukan gaya Eropa dan Islam. Ciri khasnya seperti penggunaan kubah, menara, dan lengkungan.

C. Sekolah

Sekolah Dasar Negeri 1 Purwokerto (dahulu Europeesche Lagere School): Bangunan ini didirikan pada tahun 1893 dengan arsitektur bergaya Eropa klasik. Ciri khasnya seperti penggunaan pilar, lengkungan, dan atap yang melengkung.



Sumber gambar: sekolah.data.kemdikbud.go.id

SMA Negeri 1 Purwokerto (dahulu Hogere Burgerschool): Bangunan ini didirikan pada tahun 1927 dengan arsitektur bergaya Art Deco. Ciri khasnya seperti penggunaan geometrik yang berani, warna-warna cerah, dan ornamen yang detail.



Sumber gambar: foursquare

d. Stasiun

Stasiun Purwokerto: Bangunan ini didirikan pada tahun 1898 dengan arsitektur bergaya Eropa klasik. Ciri khasnya seperti penggunaan pilar, lengkungan, dan atap yang melengkung.



Sumber gambar: Wikipedia

e. Rumah Pribadi

Rumah Adat Banyumas: Bangunan ini memiliki arsitektur tradisional Banyumas dengan pengaruh Eropa.

Ciri khasnya seperti penggunaan atap limasan, jendela kayu, dan teras yang luas.



Sumber gambar: tripadvisor

4. Seni dan Budaya

Kesenian tradisional di Banyumas tetap bertahan selama masa kolonial, namun terjadi perubahan dalam fungsi dan konteks pertunjukan. Munculnya *societeit* dan hotel menciptakan ruang baru untuk pertunjukan kesenian. *Societeit Slamet* menjadi tempat rekreasi eksklusif bagi orang Eropa, sementara elit pribumi mendirikan *Panti Soemitro* sebagai *societeit* mereka sendiri yang juga menampilkan kesenian Jawa. Di pendapa kabupaten, tarian seperti *srimpi*, *gambyong*, dan *gambiranom* yang dipengaruhi gaya Surakarta dipentaskan, terkadang berdampingan dengan tarian dansa Eropa. Meskipun gaya *lengger* dengan iringan *calung* atau gamelan tetap ada,

tembangnya pun terpengaruh dialek Surakarta (Nurwanti et al., 2015).

Masa kolonial Belanda di Banyumas membawa berbagai perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat, termasuk seni dan budaya. Berikut beberapa perubahan yang terjadi:

a. Munculnya Seni dan Budaya Baru

Munculnya musik keroncong yang terinspirasi dari musik Portugis dan Spanyol, Munculnya tari stambul yang terinspirasi dari tari Turki, Di bidang seni rupa muncul seni lukis dan patung dengan gaya Eropa

b. Pergeseran Nilai Budaya

Penurunan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan kekeluargaan mulai memudar karena pengaruh individualisme Barat.

c. Perkembangan Seni Pertunjukan

Wayang kulit Banyumasan mengalami perkembangan dengan munculnya lakon-lakon baru yang terinspirasi dari cerita rakyat dan sejarah., Ketoprak Banyumasan mengalami perkembangan dengan penggunaan alat musik modern dan cerita yang lebih variatif.

d. Pelestarian Seni dan Budaya

Upaya pelestarian seni dan budaya tradisional Banyumas dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan budayawan. Diadakan berbagai festival budaya untuk mempromosikan seni dan budaya Banyumas, seperti Festival Banyumas dan Festival Wayang Kulit. Lagu Banyumasan "Kembang Jepon" memiliki melodi yang terinspirasi dari musik keroncong. Tari "Lengger" Banyumasan menggunakan kostum yang terinspirasi dari pakaian tradisional Eropa.

Wayang kulit Jawa juga menjadi tempat negosiasi antara kekuatan kolonial dan tradisi adat, menunjukkan bagaimana seni menjadi medium **adaptasi dan asimilasi budaya**, dan berpotensi menjadi media kritik sosial atau perlawanan.

Dampak Perubahan Sosial Budaya Masa Kolonial Belanda di bidang seni yaitu munculnya seni dan budaya baru yang memperkaya khazanah budaya Banyumas, Dampak negatif, terjadinya pergeseran nilai budaya dan penurunan nilai tradisional. Meskipun mengalami berbagai perubahan, seni dan budaya Banyumas tetap lestari hingga saat ini. Hal ini menunjukkan kekayaan dan ketahanan budaya Banyumas dalam menghadapi pengaruh luar.

5. Pendidikan

Sistem pendidikan formal ala Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda membawa pengaruh yang signifikan. Dimulai dengan Politik Etis pada awal abad ke-20, berbagai jenis sekolah didirikan di Banyumas. Tujuan utama pendidikan ini adalah untuk **melatih tenaga kerja setia untuk pemerintahan kolonial** dan memenuhi kebutuhan administrasi. Kurikulum dan sistemnya seringkali disesuaikan dengan kepentingan Belanda. Ada pandangan bahwa pembaruan pendidikan ini merupakan bentuk westernisasi.

Namun, sistem ini secara tidak sengaja juga memelihara **elit terpelajar** di kalangan masyarakat pribumi yang memiliki pengetahuan dan wawasan lebih luas. Akses pendidikan kolonial di Banyumas tidak merata, seringkali didasarkan pada ras, status sosial (anak Eropa, anak priyayi/tokoh terkemuka memiliki prioritas dan gender. Bagi sebagian pribumi yang berhasil mengaksesnya, pendidikan ini membuka peluang mobilitas sosial dan peningkatan status. Elit terpelajar ini kemudian memainkan peran penting dalam pergerakan nasional (Tiyas Septiana, 2023), menunjukkan bagaimana pendidikan yang **awalnya alat kontrol** justru menjadi **pemantik kesadaran**. Bahkan, guru-guru pribumi di sekolah desa dilaporkan menyelipkan

ajaran nasionalisme. Pendidikan ini juga menjadi cikal bakal sistem pendidikan modern di Indonesia.

6. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dampak fisik paling nyata dari kolonialisme. Banyak jalan raya, jembatan, dan jalur kereta api (trem) dibangun di Karesidenan Banyumas. Pembangunan ini seringkali didorong oleh kebutuhan untuk **mendukung kelancaran eksploitasi ekonomi** dan akses kolonial dalam mengeruk hasil bumi Indonesia. Infrastruktur ini memfasilitasi pemasaran produk daerah secara nasional maupun internasional dan menggantikan peran angkutan tradisional seperti perahu di Sungai Serayu. Sayangnya, pembangunan ini seringkali melibatkan pengerahan tenaga kerja paksa yang menimbulkan kesengsaraan. Infrastruktur peninggalan kolonial ini banyak yang masih digunakan hingga saat ini.

7. Pelapisan Sosial

Masa kolonial mempertegas pelapisan sosial berdasarkan ras dan status. Masyarakat Banyumas terbagi menjadi tiga lapisan utama: golongan Eropa, golongan perdagangan (terutama Tionghoa), dan golongan pribumi (mayoritas). Adanya **diskriminasi sosial ekonomi** sangat terasa, dengan gaya hidup orang Eropa yang eksklusif dan

memiliki tempat rekreasi sendiri (*societeit*). Kekuasaan bupati lokal dipertahankan tetapi sangat dibatasi dan berada di bawah kontrol pemerintah kolonial. Sistem administrasi bahkan mengikuti sistem dua jalur: Pamong Praja Belanda dan Pamong Praja Pribumi. Namun, munculnya elit terpelajar melalui pendidikan modern membuka peluang mobilitas sosial vertikal, yang **memulai pergeseran dari struktur sosial berbasis keturunan menjadi berbasis kecakapan (Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, 2025).**

Perubahan yang terjadi dalam sistem sosial mencakup beberapa aspek kunci:

a. Stratifikasi Sosial

Masa kolonial mempertegas dan menciptakan **pelapisan sosial yang lebih rigid** berdasarkan ras dan status (Nurwanti et al., 2015). Masyarakat Banyumas terbagi menjadi tiga lapisan utama: golongan Eropa (di puncak hierarki), golongan perdagangan (terutama Tionghoa), dan golongan pribumi sebagai mayoritas. **Diskriminasi sosial ekonomi** sangat terasa di antara lapisan ini. Gaya hidup orang Eropa sangat eksklusif, dengan tempat rekreasi tersendiri. Meskipun sistem feodal yang ada di Banyumas tetap dipertahankan dalam bentuk peran bupati (regent), kekuasaan mereka sangat dibatasi dan berada di bawah

kontrol pemerintah colonial. Bupati berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Hierarki pemerintahan kolonial menerapkan sistem dua jalur: Pamong Praja Belanda dan Pamong Praja Pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa alih-alih hanya "memperkuat" sistem feodal secara tradisional, Belanda **mengintegrasikan sistem feodal ke dalam struktur kontrol birokrasi modern mereka**, memanfaatkannya untuk eksploitasi. Munculnya kelas baru yang signifikan adalah **kaum terpelajar atau elit modern** sebagai hasil dari sistem pendidikan kolonial. Meskipun akses pendidikan ini terbatas, bagi mereka yang berhasil meraihnya, muncul **peluang mobilitas sosial vertikal** dan peningkatan status ekonomi, yang **memulai pergeseran dari struktur sosial berbasis keturunan menjadi berbasis kecakapan**.

b. Kebiasaan dan Tradisi

Kontak dengan budaya Barat, terutama di kalangan elit, memengaruhi kebiasaan sehari-hari, seperti cara berpakaian yang mengadopsi gaya Eropa dan tata krama Barat. Namun, ini tidak berarti tradisi lokal hilang sepenuhnya. Pakaian adat Jawa tetap digunakan pada acara khusus, menunjukkan adanya **ambivalensi dan upaya mempertahankan identitas lokal**. Nilai-nilai tradisional Jawa seperti *tatakrama* dan penghormatan kepada yang

lebih tua kemungkinan besar tetap dipertahankan, terutama di masyarakat pedesaan. Budaya Banyumas sendiri menunjukkan **kemampuan beradaptasi dan mengintegrasikan unsur modern** ke dalam adat istiadat. Bahkan karakteristik egaliter masyarakat Banyumas (*cablaka*) kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika sosial budaya selama masa kolonial. Kesenian tradisional seperti *lengger* dan *wayang* tetap bertahan dan bahkan menjadi media negosiasi antara kekuatan kolonial dan tradisi, atau berpotensi menjadi media kritik sosial atau perlawanan. Upaya pelestarian tradisi lokal terus dilakukan.

c. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan formal ala Barat yang diperkenalkan Belanda pada awal abad ke-20 merupakan salah satu saluran utama pengaruh Eropa. Sekolah-sekolah seperti ELS, HIS, MULO didirikan dengan kurikulum dan bahasa pengantar (termasuk bahasa Belanda) yang disesuaikan dengan kebutuhan kolonial. Tujuan utamanya adalah **melatih tenaga kerja yang setia** untuk pemerintahan kolonial. Namun, secara **tidak sengaja**, sistem ini juga memunculkan elit terpelajar pribumi yang memiliki wawasan luas. Pendidikan ini, meskipun awalnya alat control, justru menjadi **pemantik kesadaran nasional**. Pendidikan juga dilihat sebagai "dinamit" yang dapat

menghancurkan struktur kolonial yang rigid dan menjadi pondasi kemajuan bangsa pasca-kemerdekaan. Sistem pendidikan modern yang diperkenalkan Belanda ini menjadi cikal bakal sistem pendidikan di Indonesia.

d. Ekonomi

Masa kolonial Belanda membawa perubahan signifikan pada struktur sosial ekonomi di Banyumas, menggeser sistem ekonomi tradisional agraris yang tertutup menuju ekonomi yang berorientasi ekspor dan monetisasi, terutama melalui penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1830. Perubahan sistem ini didorong oleh kepentingan ekonomi kolonial.

Akibat intervensi kolonial ini, struktur sosial feodal yang sebelumnya kuat di Banyumas mulai terkikis, digantikan atau diintegrasikan ke dalam struktur birokrasi kolonial yang lebih terpusat. Ini menyebabkan munculnya **pelapisan sosial baru** dan penurunan tatanan feodal tradisional

Secara umum, masyarakat Banyumas pada masa kolonial terdiri dari **tiga lapisan sosial utama** yang juga mencerminkan **diskriminasi sosial ekonomi**; **Lapisan pertama (tertinggi): Golongan Orang Belanda. Lapisan kedua (pertengahan): Golongan Perdagangan. Lapisan ketiga (terendah): Golongan Pribumi (Bumiputera).**

Secara kritis, perubahan sistem sosial di Banyumas masa kolonial adalah hasil dari **interaksi kompleks antara kebijakan kolonial yang eksploitatif dan respons masyarakat lokal yang adaptif dan resisten**. Kolonialisme menciptakan kesenjangan dan mengganggu tatanan tradisional, tetapi juga secara tidak sengaja memperkenalkan elemen modern (seperti pendidikan formal dan birokrasi) yang memicu perubahan sosial dan kebangkitan kesadaran. Warisan dari periode ini adalah sistem sosial yang kompleks, mencerminkan perpaduan pengaruh Eropa, tradisi lokal yang bertahan dan beradaptasi, serta bibit-bibit perubahan menuju masyarakat modern.

B. Adaptasi dan Asimilasi Budaya di Banyumas Masa Kolonial

Masa kolonial Belanda menghadirkan interaksi kompleks antara tradisi lokal dan pengaruh Eropa di Banyumas, yang memicu proses adaptasi dan asimilasi budaya (Sukardi, 2015). Namun, interaksi ini bukanlah pertukaran yang setara, melainkan terjadi di bawah **dominasi kekuasaan kolonial yang absolut** (Nurwanti et al., 2015). Masyarakat dihadapkan pada situasi di mana mereka harus beradaptasi dan berasimilasi dengan budaya baru yang dibawa oleh penjajah, namun respons yang

muncul adalah **perpaduan unik antara perlawanan dan akomodasi**. Proses ini membentuk dinamika baru yang memengaruhi identitas Banyumas.

Masyarakat mulai mempelajari bahasa Belanda, yang menjadi bahasa administrasi dan pendidikan bagi kalangan tertentu. Kemampuan berbahasa Belanda memberikan **akses pada pendidikan formal ala Barat** dan membuka peluang untuk mengisi posisi dalam pemerintahan kolonial atau profesi modern lainnya. Beberapa orang, terutama di kalangan elit pribumi, mulai mengadopsi gaya hidup dan etiket Barat, termasuk mengenakan pakaian gaya Eropa seperti jas, kemeja, celana, rok, dan gaun untuk kegiatan sehari-hari, meskipun pakaian adat Jawa tetap dikenakan pada acara-acara khusus. Pendidikan kolonial mengajarkan kurikulum Barat seperti matematika dan sains.

Selain adaptasi, juga terjadi asimilasi dalam pengertian **percampuran atau peleburan unsur budaya**. Dalam konteks kolonialisme, asimilasi budaya dapat dilihat dalam berbagai bentuk, meskipun sumber menunjukkan proses yang lebih sering berupa akulturasi (penerimaan unsur asing tanpa kehilangan kepribadian asli) dan sinkretisme (percampuran unsur yang menghasilkan bentuk baru). Masyarakat Banyumas berhasil

mempertahankan identitas tradisionalnya sambil mengintegrasikan unsur-unsur modern ke dalam adat istiadat dan ritualnya, menunjukkan **kemampuan beradaptasi yang tinggi**.

Proses adaptasi dan asimilasi budaya di Banyumas tidak terjadi secara instan dan mulus. Masyarakat lokal menunjukkan resistensi sekaligus adaptasi terhadap budaya asing (Sukardi, 2015; Wieringa, 2002). Beberapa unsur budaya Eropa diadopsi dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, menciptakan **sintesis yang kompleks**. Misalnya, dalam hal pakaian, meski mode Eropa mulai diadopsi, banyak masyarakat yang tetap mempertahankan elemen tradisional dalam busana mereka.

Asimilasi budaya juga terlihat dalam seni dan kuliner. Sumber menyebutkan adaptasi dalam kesenian tradisional seperti munculnya Lengger Lanang (Hartanto, 2019) dan pertunjukan kesenian Lengger yang berdampingan dengan tarian dansa Eropa di pendapa kabupaten. Di bidang kuliner, penggunaan bahan-bahan Eropa dalam masakan lokal menjadi bukti nyata percampuran budaya; salah satu contoh yang disebutkan dalam sumber adalah penggunaan gula kristal impor Belanda pada jenang khas Banyumas, menggantikan gula jawa tradisional.

Masa kolonial Belanda di Banyumas membawa berbagai perubahan dalam aspek sosial budaya, termasuk adaptasi dan asimilasi budaya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adaptasi Budaya

Adaptasi budaya adalah proses penerimaan unsur-unsur budaya asing dan pengolahannya ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian budaya asli (Ummah, 2019). Masyarakat Banyumas menunjukkan strategi adaptasi yang kompleks:

a. Pemeliharaan Identitas Lokal

Dialek Bahasa Jawa Banyumasan (Ngapak) tetap dipertahankan sebagai identitas utama, meskipun istilah-istilah administrasi Belanda seperti "kantor pos" dan "stasiun" diadopsi ke dalam kosakata sehari-hari.

b. Adopsi Selektif

Unsur-unsur budaya Eropa, seperti gaya berpakaian, etiket, dan bahasa, diadopsi secara selektif, terutama oleh kalangan elit pribumi, tanpa sepenuhnya meninggalkan tradisi Jawa.

c. Ketahanan Tradisi

Kesenian tradisional seperti Lenggèr, Ebeg, dan Wayang Kulit tetap hidup dan populer, menunjukkan ketahanan budaya lokal.

d. Integrasi Unsur Modern

Praktik kearifan lokal dan adat istiadat berhasil mengintegrasikan unsur-unsur modern dari pengaruh kolonial.

2. Asimilasi Budaya

Asimilasi budaya adalah proses perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang kemudian menjadi satu kebudayaan baru, yang terjadi secara lambat dan evolutive (Ummah, 2019). Meskipun sumber lebih menonjolkan adaptasi dan sinkretisme, beberapa bentuk peleburan atau pencampuran dapat dilihat:

a. Arsitektur

Bangunan-bangunan kolonial di Banyumas sering menunjukkan perpaduan gaya Eropa dengan penggunaan material dan elemen lokal. Pendopo Si Panji, misalnya, ditambahi elemen neoklasik Eropa.

b. Gaya Hidup Elit

Kalangan bupati dan priyayi memadukan gaya hidup tradisional Jawa dengan kebiasaan dan barang-barang dari Eropa¹⁴.

c. Kuliner

Terjadi penggunaan bahan-bahan impor dalam produk lokal, seperti gula kristal Belanda pada jenang..

d. Lembaga Sosial

Munculnya organisasi atau tempat berkumpul elit pribumi ("Panti Soemitro") yang meniru konsep Societeit Eropa, menunjukkan adaptasi dan pembentukan ruang sosial baru yang dipengaruhi model asing.

3. Contoh Adaptasi dan Asimilasi Budaya di Banyumas:

a. Penggunaan Bahasa

Dualisme penggunaan bahasa Belanda (simbol modernitas dan kekuasaan) dan Bahasa Banyumasan (penanda identitas lokal).

b. Pakaian

Elit pribumi mengenakan pakaian Eropa sehari-hari namun tetap menggunakan pakaian adat pada acara formal.

c. Seni Pertunjukan

Kesenian Lengger dan tarian dansa Eropa dipentaskan berdampingan di pendapa kabupaten, menunjukkan koeksistensi dan penerimaan.

Terdapat juga adaptasi internal pada kesenian tradisional seperti munculnya Lengger Lanang.

d. Ritual Keagamaan/Lokal

Terjadinya sinkretisme antara ajaran Islam dengan tradisi lokal, seperti Sedekah Bumi/Laut yang memasukkan unsur doa Islam, menunjukkan cara budaya lokal mengakomodasi nilai-nilai agama yang dominan tanpa sepenuhnya menghilang²³.

e. Pendidikan

Sistem pendidikan ganda (Barat dan tradisional/Islam) yang diperkenalkan Belanda melahirkan elit terpelajar baru yang menjadi agen perubahan sosial, meskipun sistem ini awalnya bertujuan untuk kepentingan kolonial.

f. Arsitektur Kolonial

Keberadaan bangunan-bangunan dengan perpaduan gaya Eropa dan lokal di Kota Lama Banyumas dan Purwokerto, yang berfungsi sebagai simbol sejarah sekaligus pengingat akan masa eksploitasi.

Secara kritis, penting untuk diingat bahwa proses adaptasi dan asimilasi ini berlangsung dalam konteks **kekuasaan yang tidak setara dan diskriminasi rasial dan ekonomi**. Pengaruh budaya Eropa seringkali dikaitkan

dengan status sosial yang lebih tinggi, sementara budaya lokal, terutama kesenian rakyat, terkadang dianggap "kasar" atau rendah dibandingkan seni keraton. Namun, pada saat yang sama, ketahanan budaya lokal dan kemampuan masyarakat Banyumas untuk beradaptasi secara selektif juga menunjukkan **resistensi pasif** dan upaya untuk mempertahankan identitas mereka di bawah tekanan kolonial. Warisan kolonial hingga kini menunjukkan **paradoks**, di mana modernisasi dan infrastruktur adalah satu sisi, sementara pengingat eksploitasi dan sisa-sisa struktur sosial lama adalah sisi lainnya.

C. Pendidikan dan Perubahan Sosial

Kolonialisme membawa perubahan fundamental dalam sistem pendidikan di Banyumas, memperkenalkan institusi dan kurikulum bergaya Barat yang secara signifikan mengubah lanskap sosial budaya wilayah tersebut. Namun, perubahan ini bukanlah proses netral; **pendidikan kolonial diimplementasikan dengan tujuan strategis untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial Belanda** (Nurwanti et al., 2015).

Sekolah-sekolah dengan kurikulum Barat didirikan, memberikan akses pendidikan formal kepada penduduk lokal yang sebelumnya terbatas pada pendidikan tradisional di pesantren atau langgar. Beberapa jenis sekolah yang

didirikan mencakup Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Europeesche Lagere School (ELS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Kweekschool (Sekolah Guru), Normaalschool, Volksschool, Ambachtsschool (Sekolah Teknik/Pertukangan), dan Sekolah Mantri Kesehatan. Pendidikan ini mengajarkan disiplin ilmu Barat seperti matematika, sains, dan bahasa Belanda.

Meskipun membuka wawasan baru, **akses terhadap pendidikan kolonial sangat terbatas dan tidak merata**, seringkali didasarkan pada ras, status sosial, dan jenis kelamin. Anak-anak Eropa diprioritaskan, dan hanya sebagian kecil anak pribumi, terutama dari kalangan priyayi atau keluarga terkemuka, yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik. Sekolah untuk anak perempuan pribumi juga didirikan, seperti Sekolah Susteran, namun dengan kurikulum yang terbatas pada keterampilan domestik.

Perubahan ini secara fundamental mengubah struktur sosial masyarakat. Pendidikan gaya Barat menciptakan **lapisan sosial baru di masyarakat, yaitu elit terpelajar modern**. Mereka yang terdidik di sekolah kolonial memiliki peluang lebih besar untuk mengisi posisi-posisi penting dalam administrasi kolonial atau profesi modern seperti guru, dokter, perawat, teknisi, dan juru

rawat. Hal ini memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal bagi sebagian anak pribumi, meskipun awalnya hanya terbatas pada segelintir orang(Nurwanti et al., 2015). Namun, pada saat yang sama, ini juga menciptakan stratifikasi baru antara kaum berpendidikan dan masyarakat umum. Sistem pendidikan ganda yang diperkenalkan oleh Belanda juga mencakup sekolah-sekolah Islam tradisional, meskipun Belanda cenderung mendiskriminasi lembaga pendidikan Islam (pesantren) karena dianggap menghalangi cita-cita kolonial mereka.

Sederhananya, meskipun tujuan utama sistem pendidikan kolonial adalah untuk melatih tenaga kerja yang setia bagi pemerintahan kolonial, **pendidikan ini secara tidak terduga memelihara elit terpelajar yang kemudian menjadi tokoh kunci dalam gerakan nasionalis**. Paparan terhadap ide-ide modern seperti nasionalisme melalui pendidikan Barat bergema dengan perasaan eksploitasi dan inferioritas yang meluas di antara penduduk terjajah.

Dengan demikian, pendidikan di Banyumas masa kolonial adalah **arena pertarungan pengaruh dan resistensi**. Di satu sisi, ia adalah alat kekuasaan kolonial untuk menciptakan tenaga kerja dan menanamkan nilai-nilai Barat. Di sisi lain, ia menjadi katalisator perubahan

sosial yang tak disengaja, melahirkan kesadaran nasional dan menyediakan sarana bagi perlawanan pasif dan pembangunan identitas baru.

D. Gerakan Kebangsaan dan Kesadaran Nasional di Banyumas Masa Kolonial

Masa kolonial Belanda di Banyumas, yang ditandai dengan intervensi dan eksploitasi ekonomi seperti pemberlakuan Sistem Tanam Paksa sejak tahun 1830, membawa perubahan besar dalam struktur sosial ekonomi Masyarakat (Sondarika, 2015). Sistem ini memaksa petani lokal untuk menanam komoditas ekspor dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial, seringkali disertai kerja paksa, yang menimbulkan penderitaan dan kemiskinan. Penindasan dan kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat lokal inilah yang kemudian secara kritis memicu munculnya gerakan kebangsaan dan kesadaran nasional di Banyumas.

Kesadaran nasional ini bukan hanya respons pasif terhadap penindasan, melainkan proses dinamis yang dibentuk oleh berbagai faktor. Pendidikan memainkan peran penting dalam perubahan sosial budaya di Banyumas Kolonial. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan ganda, termasuk sekolah-sekolah gaya Barat dan sekolah Islam tradisional. Meskipun tujuan utama

Belanda adalah untuk melatih tenaga kerja yang loyal bagi administrasi kolonial, sistem ini secara tidak sengaja memelihara elit terpelajar. Elit terpelajar ini, yang terpapar ide-ide modern seperti nasionalisme, feminisme, dan sosialisme Marxis melalui pendidikan Barat, memainkan peran penting dalam memobilisasi penduduk lokal melawan pemerintahan kolonial. Ide-ide ini bergema dengan perasaan eksploitasi dan inferioritas yang meluas di antara populasi terjajah.

Gerakan kebangsaan di Banyumas semakin diperkuat oleh **perlawanan tokoh-tokoh lokal** yang menantang hegemoni kolonial. Perlawanan ini tidak hanya bersifat politik tetapi juga **budaya**, karena **seniman dan intelektual lokal berusaha untuk merebut kembali dan menegaskan identitas budaya mereka** dalam menghadapi dominasi kolonial. Tokoh-tokoh ini, termasuk intelektual, seniman, dan pemimpin masyarakat, memainkan peran penting dalam membentuk perubahan sosial budaya di Banyumas. Kontribusi kreatif mereka dalam melestarikan dan mempromosikan identitas Banyumas mencontohkan peran penting ini. Identitas budaya Banyumas sendiri, dengan dialek khas "Penginyongan" (Nugroho & Kusuma, 2023), mencerminkan campuran pengaruh dari berbagai budaya dan memiliki ciri

khas yang unik. Konsep *local genius* menggambarkan kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap, menyeleksi, dan mengolah pengaruh asing menjadi kreasi unik, sambil tetap bertahan dan mengintegrasikan unsur luar ke dalam budaya asli(Ummah, 2019).

Pers lokal, seperti surat kabar "Suara Banyumas" (1927), juga memainkan peran vital dalam menyebarkan ide-ide kemerdekaan, dengan artikel-artikel kritis yang memicu pemogokan buruh⁴⁵. Ini menunjukkan bagaimana media menjadi alat penting dalam perlawanan dan mobilisasi.

Kesadaran nasional ini sejalan dengan pandangan sejarawan Benedict Anderson tentang "komunitas terbayang" (*imagined communities*), di mana identitas bersama dibentuk meskipun para anggotanya tidak saling mengenal secara langsung.(Anderson ,1983. Proses ini melibatkan keterlibatan kritis dengan masa lalu kolonial, serta upaya untuk mengintegrasikan kearifan dan nilai-nilai lokal ke dalam kerangka nasionalisme Indonesia yang lebih luas. Hasilnya adalah identitas budaya yang berakar pada tradisi dan terbuka untuk pengaruh modern.

Gerakan kebangsaan dan kesadaran nasional di Banyumas masa kolonial adalah fenomena kompleks yang tidak hanya didorong oleh penindasan, tetapi juga oleh

peran pendidikan (baik yang disengaja maupun tidak sengaja oleh Belanda), aktivitas beragam organisasi sosial-politik dan keagamaan, kontribusi tokoh-tokoh lokal dalam arena politik maupun kultural, serta peran pers, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan identitas bersama dan semangat perlawanan.

E. Peran Tokoh Lokal

Tokoh-tokoh lokal memiliki peran penting dalam menggerakkan kesadaran nasional dan memimpin perjuangan melawan kolonialisme di Banyumas. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Soedirman, seorang pejuang kemerdekaan yang berasal dari Banyumas dan kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Peran tokoh-tokoh lokal seperti Soedirman tidak hanya terbatas pada bidang militer, tetapi juga mencakup bidang pendidikan dan kebudayaan.

Organisasi-organisasi pergerakan nasional yang besar kemungkinan memiliki pengikut dan cabang di wilayah Banyumas dan turut menyebarkan ide-ide nasionalisme. Beberapa organisasi yang disebutkan muncul di Banyumas pada awal abad ke-20 antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ahmadiyah. Sarekat Islam, misalnya, secara nasional berjuang menentang diskriminasi ekonomi dengan

menyatukan kekuatan bumiputra berlandaskan Islam. Muhammadiyah di Banyumas, seperti di wilayah lain, diawasi ketat oleh pemerintah kolonial karena kekhawatiran Belanda terhadap kemajuannya. Tokoh Muhammadiyah seperti K.H. Dardiri di Banyumas berperan penting dalam pendidikan, menanamkan semangat nasionalisme dan semboyan *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan), serta mendirikan lembaga pendidikan yang diawasi ketat intel polisi Belanda. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah Muhammadiyah atau inisiatif pendidikan informal RAY. Siti Aisyah yang menyisipkan wacana anti-kolonial menjadi arena penanaman kesadaran kebangsaan. Bahkan tokoh agama seperti Syeikh Abdul Malik, melalui dakwahnya, memiliki pengaruh yang membuat takut tentara kolonial. Perlawanan juga mengambil bentuk "halus" (subtle resistance), seperti penolakan kerja paksa untuk alasan kesehatan oleh dokter pribumi seperti Dr. Karsidi Wirasubrata.

Pendidikan juga menjadi medium resistensi kultural. Berdiri dan berkembangnya Budi Utomo sampai ke banyumas lewat **Goembrek dan dr. Angka (Angka Prodjosoedirdjo), Taman Siswa, Muhammadiyah (K.H. Dardiri) dan Nahdatu Ulama (K.H. Musallim Ridlo, K.H**

Bunyamin, K.H Bajuri, K.H.A. Shodiq), organisasi ini relevan dalam konteks perlawanan pendidikan nasional secara umum) pada tahun 1922 menandai titik balik, berupaya mempromosikan sistem pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai dan adat istiadat setempat, menjadi saingan bagi sistem kolonial. Ki Hajar Dewantara sendiri melihat pendidikan sebagai alat mobilisasi politik dan penyejahtera umat, kontras dengan sistem kolonial yang materialistik, individualistik, dan intelektualistik, serta didasarkan pada diskriminasi rasial yang menanamkan inferioritas pada anak bumiputera. Guru-guru pribumi bahkan diketahui menyelipkan ajaran nasionalisme secara diam-diam di sekolah-sekolah.

Gerakan nasionalis di Banyumas semakin diperkuat oleh **perlawanan tokoh-tokoh lokal** yang menantang hegemoni kolonial. Perlawanan ini tidak hanya bersifat politik tetapi juga **budaya**, karena **seniman dan intelektual lokal** berusaha untuk merebut kembali dan menegaskan identitas budaya mereka dalam menghadapi dominasi kolonial. Tokoh-tokoh ini (termasuk intelektual, seniman, dan pemimpin masyarakat) memainkan peran penting dalam membentuk perubahan sosial budaya di Banyumas. Kontribusi kreatif mereka dalam melestarikan dan mempromosikan identitas Banyumas mencontohkan peran

tokoh-tokoh lokal seperti **Syeikh Abdul Malik**, Seorang tokoh sufi Khalidiyah Kedungparuk. **Dr. Karsidi Wirasubrata**: Pendiri rumah sakit Purwokerto¹⁹. Beliau menunjukkan **model resistensi halus** (subtle resistance) dengan menolak kerja paksa untuk pembangunan jalan nasional dengan alasan kesehatan, sehingga menyelamatkan ratusan pekerja dari eksploitasi¹⁹. Meskipun melalui jalur profesi (kesehatan), tindakan ini secara efektif menentang kebijakan eksploitatif kolonial. **RAy. Siti Aisyah**, beliau memelopori **pendidikan informal** melalui pengajian yang menyisipkan **wacana anti-kolonial**.

Secara umum, peran tokoh-tokoh di banyumas yang mempunyai peran terhadap bangsa Indonesia bisa di lihat di tabel berikut :

Tabel 3.2 Peran Tokoh-tokoh Banyumas pada Masa Kolonial

No	Nama Tokoh	Peran
1	Margono Djojohadikoesoemo	Pendiri Bank Negara Indonesia, tokoh nasionalis
2	Sudjiman Gandasubrata	Bupati Banyumas (1933-1950), berjasa dalam perbaikan tata kota, sosial ekonomi, pendidikan

3	Aria Gandasubrata	Bupati Banyumas sebelum Sudjiman Gandasubrata
4	Sumitro Kolopaking Purbonegoro	Bupati Banjarnegara, aktif dalam pergerakan nasional di Belanda
5	Wiryaatmaja	Patih Purwokerto, memprakarsai berdirinya Bank Rakyat Indonesia
6	Kyai Nurdaiman	Tokoh agama Islam, pertama kali membuat calung
7	Nyai Sekargadung	Seniman, ketua kelompok lengger, pencipta tembang dan gending Banyumasan
8	Raden Adipati Cakrawedana	Bupati pertama Karesidenan Banyumas
9	Raden Ngabei Tjakradiredja	Bupati Banyumas (1831-1864)
10	Pangeran Adipati Mertadiredja III	Bupati Banyumas (1879-1913), melakukan pembangunan signifikan
11	Raden Ngabei Gandasubrata	Bupati Banyumas (1913-1933), masa banyak perubahan sosial akibat Politik Etis

12	Raden Adipati Bratadiningrat	Bupati Ajibarang
13	Raden Adipati Bratadiredja	Bupati pertama Purwokerto
14	Raden Mas Tumenggung Cakrakusuma	Bupati Purwokerto (1885-1905), masa pembangunan fisik signifikan
15	Raden Mas Cakranegara III	Bupati Purwokerto (1905-1920), masa pembangunan stasiun kereta api SS
16	Raden Tumenggung Cokrosuroyo	Bupati Purwokerto (1924-1936)
17	Iskaq Cokroadisuryo	Residen Banyumas masa kemerdekaan awal, berperan dalam transisi kekuasaan dari Jepang
18	Dr. Grumberg	Salah satu pendiri Budi Utomo
19	Ari Tjokroadisurjo	Bupati Purwokerto (1924-1935), patron gerakan nasional di Banyumas
20	Mr. Ishak Tjokroadisurjo	Asisten Residen dan Residen Banyumas (1942-1950), tokoh nasionalis

21	Prof. Sumitro Kolopaking P.	Residen Banyumas (1945-1950), tokoh nasionalis
22	Jenderal Sudirman	Pemimpin Hizbul Wathan di Banyumas, tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan
23	KH. Abu Dardiri	Tokoh Muhammadiyah terkemuka di Banyumas, pejuang kemerdekaan, pengusul Kementerian Agama
24	KH. Muhammad Ilyas	Pengembang tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Banyumas
25	Asy-Syaikh Abdul Malik	Pengembang ilmu agama dan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Banyumas
26	K.H. A.Shodiq Pasiraja	Penyebar tarekat Syadziliyah di Purwokerto
27	Raden Arya Wiryaatmaja	Patih Purwokerto, penggagas lumbung desa, pegadaian, dan Bank Rakyat
28	Prof. Dr. Margono Soekarjo	Dokter pribumi pertama yang diakui pemerintah Hindia Belanda

29	Poedjadi Djaring Bandajoeda	Pahlawan perjuangan masa agresi militer Belanda, Bupati Banyumas
30	R.Soetedjo Poerwodibroto	Seniman dan komponis Banyumas, pendiri RRI Purwokerto

Menurut Geertz (1960), tokoh-tokoh lokal memiliki pengaruh besar dalam menjaga dan mengembangkan budaya serta tradisi masyarakat Banyumas. Mereka menjadi jembatan antara tradisi lokal dan ide-ide modern yang masuk bersama kolonialisme. Keberanian dan keteguhan para tokoh ini dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Banyumas menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

F. Refleksi Budaya Kolonial

Periode kolonial di Banyumas, sebagaimana dijelaskan dalam sumber-sumber, meninggalkan warisan yang kompleks dan bersifat paradoks. Refleksi terhadap masa ini tidak hanya melihat dampak langsung kebijakan kolonial, tetapi juga bagaimana masyarakat lokal merespons, beradaptasi, dan mempertahankan identitasnya di tengah tekanan dan intervensi asing.

Di satu sisi, intervensi kolonial membawa beberapa elemen yang, secara evaluatif, menjadi fondasi bagi

pembangunan di masa pascakemerdekaan. Pembangunan infrastruktur seperti transportasi (kereta api) dan infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) memang terjadi di Karesidenan Banyumas pada periode 1894-1937. Sarana infrastruktur ini dapat dinikmati tidak hanya oleh orang Belanda, tetapi juga oleh masyarakat pribumi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembangunan ini tidak secara langsung bertujuan untuk kepentingan masyarakat pribumi, melainkan paling utama untuk kepentingan pemerintah kolonial. Demikian pula sistem pendidikan ganda yang diperkenalkan. Tujuannya semula adalah melatih tenaga kerja yang setia, tetapi secara tidak sengaja justru memelihara elit terpelajar yang kelak menjadi tokoh kunci dalam gerakan nasionalis. Pendidikan ini dipandang sebagai "dinamite" yang mampu menghancurkan struktur masyarakat kolonial yang kaku.

Di sisi lain, warisan kolonial juga meninggalkan jejak negatif yang persisten dan patut dikritisi. Salah satunya adalah mentalitas feodal yang diperkuat oleh birokrasi Belanda yang masih tersisa dalam kultur birokrasi kontemporer. Pemerintah kolonial memperkenalkan struktur birokrasi baru yang merusak sistem suksesi tradisional dan menggantinya dengan sistem yang lebih terpusat dan terkontrol, menyebabkan munculnya kelas

sosial baru dan penurunan tatanan feodal. Arsitektur kolonial, meskipun kini menjadi objek pelestarian, berfungsi sebagai pengingat sejarah eksploitasi. Kontras terlihat jelas antara kemegahan bangunan seperti Kantor Pos Purwokerto (1890) dengan kondisi gubuk petani tebu di sekitarnya, merefleksikan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kebijakan kolonial seperti Cultuurstelsel. Jejak kolonial juga masih terlihat dalam penggunaan istilah hukum dan administrasi dari bahasa Belanda, serta pola infrastruktur irigasi modern yang mengikuti model kanal abad ke-19.

Masyarakat Banyumas tidak pasif dalam menghadapi pengaruh ini. Mereka menunjukkan perpaduan unik antara perlawanan dan akomodasi. Adaptasi budaya dan asimilasi terjadi melalui interaksi antara tradisi lokal dan pengaruh kolonial. Ketahanan budaya lokal terlihat dalam pelestarian kearifan lokal dan integrasi elemen modern. Kesenian tradisional seperti Lenggèr, Ebeg, dan Wayang Kulit tetap relevan dan menunjukkan ketahanan budaya. Karakteristik masyarakat Banyumas yang dikenal egaliter dan *cablaka* (terus terang, jujur, apa adanya), yang berbeda dari budaya Jawa mainstream, juga dapat dilihat sebagai landasan budaya yang memengaruhi bentuk interaksi dan perlawanan mereka terhadap hegemoni,

termasuk hegemoni kolonial dan Keraton. Nilai cablaka ini dipandang sebagai sistem nilai budaya lokal yang sangat penting dan telah berlangsung ratusan tahun.

Tokoh-tokoh lokal memainkan peran krusial dalam resistensi kultural ini. Seniman dan intelektual lokal secara eksplisit disebutkan berkontribusi dalam menegaskan identitas budaya Banyumas. Elit terpelajar yang muncul dari pendidikan, termasuk mereka yang terinspirasi gagasan seperti Budi Utomo Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, menggunakan pendidikan sebagai alat perlawanan kultural, berjiwa ketimuran dan berpusat pada sikap yang berlawanan (antitesis) dengan pendidikan kolonial yang diskriminatif dan materialistik. Tokoh agama juga berpotensi memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai, termasuk semangat nasionalisme (hubbul wathan minal iman - cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan) dan menjaga tradisi lokal.

Refleksi kritis terhadap periode kolonial mengajarkan pentingnya selektivitas dalam menerima pengaruh asing. Ini adalah pelajaran evaluatif yang menekankan perlunya penyaringan dan adaptasi pengaruh luar agar tidak mengikis identitas lokal. Ketahanan budaya lokal berfungsi sebagai benteng identitas. Masyarakat Banyumas berhasil mempertahankan identitas

tradisionalnya dengan mengintegrasikan unsur-unsur modern ke dalam adat istiadat dan ritualnya, dan ini semua masih relevan sampai hari ini dalam menghadapi tantangan globalisasi neoliberalisme/ neoimperialisme.

Sebagai penutup evaluasi, warisan kolonial di Banyumas adalah sintesis kompleks antara pengaruh kolonial dan tradisi lokal. Kolonialisme tidak sepenuhnya menghapus kultur lokal, tetapi menciptakan dinamika baru yang membentuk identitas budaya Banyumas pascakolonial. Proses pascakolonial menuntut keterlibatan kritis dengan masa lalu kolonial dan upaya mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka nasionalisme yang lebih luas. Hasilnya adalah identitas budaya yang berakar pada tradisi namun juga terbuka terhadap pengaruh modern. Kajian mengenai refleksi budaya kolonial ini masih sangat relevan untuk memahami identitas kontemporer masyarakat Banyumas.

BAB 4

Banyumas dalam Pusaran Perjuangan Kemerdekaan (1930-an - 1949)

Periode antara tahun 1930-an hingga 1949 merupakan fase krusial dalam sejarah Banyumas dan perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Wilayah ini tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga aktor kunci dalam dinamika kompleks yang ditandai oleh Depresi Ekonomi Global 1930-an (Malaise), pendudukan Jepang yang singkat namun brutal (1942-1945), dan Revolusi Fisik pasca-Proklamasi Kemerdekaan (1945-1949) yang melibatkan perjuangan mempertahankan kedaulatan dari upaya rekolonisasi Belanda. Secara garis besar, perjalanan Banyumas dalam Perjuangan Kemerdekaan bisa dilihat di gambar berikut:

Perjalanan Banyumas Melalui Krisis Ekonomi dan Perjuangan Kemerdekaan



Gambar 4.1 Perjalanan Banyumas melalui Krisis Ekonomi dan Perjuangan Kemerdekaan

A. Krisis Ekonomi Global 1930-an (Malaise) dan Dampaknya di Banyumas

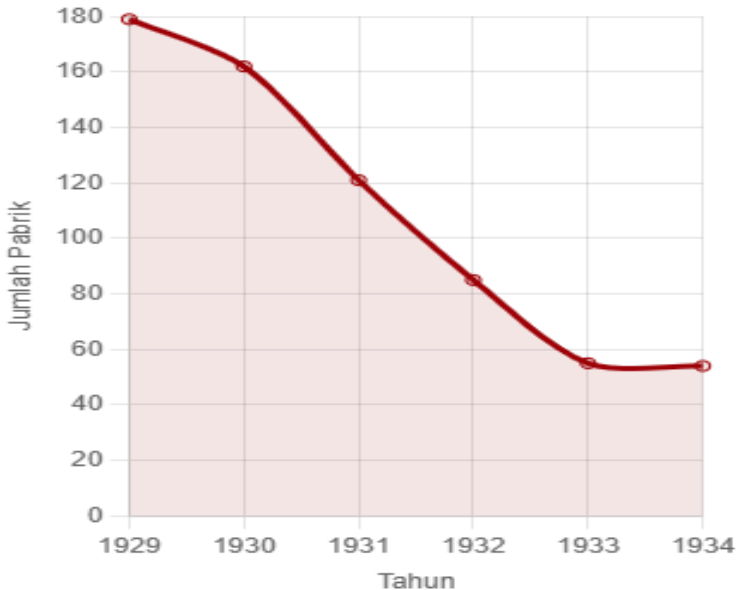
Depresi Ekonomi Global 1930-an, yang dikenal sebagai **Malaise**¹³ atau **zaman meleset**, membawa dampak yang sangat besar dan sulit bagi Hindia Belanda, termasuk Banyumas (Arinda et al., 2017; Basundoro, 2012; Nurwanti et al., 2015; Padmo, 2013). Krisis ini memicu **kemerosotan ekonomi yang kompleks**, menyebabkan berbagai sektor

¹³ Sebutan untuk Depresi Ekonomi Global pada tahun 1930-an yang menghantam perekonomian dunia, termasuk Hindia Belanda, menyebabkan kemerosotan ekonomi dan sosial yang parah.

usaha mengalami penurunan drastis, terutama di sektor perkebunan dan pabrik.

Grafik 4. 1 Penurunan Jumlah Pabrik Gula Aktif di Jawa

Penurunan Jumlah Pabrik Gula Aktif di Jawa (1929-1934)



Sumber: data yang diolah dari jurnal-jurnal terkait

Depresi ekonomi global, yang dikenal sebagai Malaise, menghantam Hindia Belanda dengan keras, dan dampaknya sangat terasa di Banyumas. Runtuhnya harga komoditas ekspor menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah, penutupan industri, dan penderitaan sosial yang meluas, yang secara fundamental mengubah lanskap

ekonomi dan sosial wilayah tersebut. **Keruntuhan Ekonomi Lokal**

Anjloknya permintaan global menyebabkan penutupan besar-besaran industri andalan Banyumas, terutama pabrik gula. Hal ini memicu gelombang PHK massal dan pengangguran, memaksa ribuan orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Penurunan 36% drastis harga beras, memukul petani tradisional dengan keras . Penurunan 805 volume angkutan barang oleh trem SDS dari 1930 hingga 1933, menandakan lumpuhnya perdagangan.

Dampak spesifik di Banyumas meliputi:

Kemiskinan meluas hampir di seluruh wilayah Banyumas (Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015). Di sepanjang jalanan, pemandangan memilukan menjadi hal biasa: laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak, mengemis dalam kondisi fisik yang mengenaskan. Tubuh mereka kurus kering, kaki bengkok, perut buncit, dan sebagian menderita busung lapar. Makanan nyaris tidak tersedia—daun-daunan, ares pohon pisang¹⁴, gaber, dan gelang menjadi pengganti perut. Akibatnya, masyarakat mudah terserang penyakit seperti gudik, koreng, patek, borok, influenza, hingga malaria.

¹⁴ Bagian inti batang pohon pisang yang biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran atau makanan darurat oleh masyarakat, terutama saat kelaparan melanda.

Krisis ekonomi menyebabkan harga beras jatuh hingga 36%, sebuah pukulan berat bagi petani tradisional yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen. Sementara itu, sektor ekonomi modern tak luput dari kehancuran. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal melanda perkebunan dan pabrik, memaksa banyak pekerja pulang ke desa, terpaksa menjadi buruh serabutan atau menganggur terselubung. Di kota-kota Jawa, jumlah gelandangan meningkat secara drastic (Padmo, 2013).

Di Banyumas, industri gula mengalami kemunduran parah. Banyak pabrik gula seperti di Purwokerto, Bojong, Kalireja, Klampok, dan Sumpiuh harus gulung tikar akibat tidak sanggup lagi beroperasi di tengah krisis. Bahkan Pabrik Gula Kalibagor, yang tertua dan terbesar di Banyumas, berhenti produksi pada tahun 1933. Penutupan ini mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan penghasilan, sementara para petani terpaksa mengembalikan uang persekot dari kontrak sewa lahan yang tak lagi bisa dimanfaatkan.

Transportasi pun ikut terpuruk. Jumlah penumpang trem SDS anjlok tajam, dari 888.048 orang pada tahun 1932 menjadi hanya 567.856 orang pada 1934—angka terendah dalam sejarah operasional trem di Banyumas. Pengangkutan

barang juga menurun drastis, dari 245.240 ton pada tahun 1930 menjadi hanya 48.129 ton pada 1933.

Dalam situasi yang semakin sulit, ribuan keluarga di Banyumas memilih untuk bermigrasi ke luar Jawa sebagai upaya bertahan hidup. Transmigrasi besar-besaran ini berlangsung antara tahun 1934–1936, dengan Lampung sebagai tujuan utama.

Krisis juga memicu perubahan administratif penting. Pemerintah kolonial Belanda, yang kasnya nyaris kosong, tidak mampu lagi menopang struktur pemerintahan seperti sediakala. Maka, pada tahun 1937, Kabupaten Banyumas digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto. Purwokerto, yang sebelumnya bagian dari Banyumas, ditetapkan sebagai ibukota baru. Pemindahan pendopo bupati ke Purwokerto dan peresmian pada 7 Januari 1937 menandai penghapusan Kabupaten Purwokerto dan penyatuannya dengan Banyumas. Keputusan ini didasarkan pada dua hal utama: krisis ekonomi dan infrastruktur Purwokerto yang lebih unggul—terutama jaringan kereta api dan trem—dibandingkan Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan.

Di tengah krisis keuangan yang melanda, Pemerintah Kolonial Belanda terpaksa melakukan berbagai langkah penghematan drastis (Arinda et al., 2017; Comission, 2016; Nurwanti et al., 2015) . Jabatan wedana dan asisten wedana

di sejumlah kota dihapuskan, sementara gaji para bupati pun dipotong untuk menekan pengeluaran negara. Namun, di balik kebijakan yang keras tersebut, upaya untuk meringankan penderitaan rakyat tetap dilakukan dengan berbagai cara yang menggugah semangat solidaritas dan gotong royong (Comission, 2016).

Di banyak distrik dan desa, dapur umum mulai bermunculan. Dikelola secara swadaya oleh masyarakat, dapur-dapur ini menjadi sumber harapan bagi rakyat yang kelaparan. Sementara itu, kaum wanita turut mengambil peran penting. Di bawah kepemimpinan istri Bupati, Raden Ayu Siti Subindjei Gandasubrata, gerakan perempuan mendirikan rumah miskin—tempat yang menyediakan makanan, pakaian, sekaligus pelatihan keterampilan bagi mereka yang membutuhkan.

Tidak hanya itu, program pekerjaan pertolongan atau *relief-work* digerakkan, meliputi pembangunan selokan, pelebaran jalan, hingga pembuatan bendungan—semuanya tidak hanya membuka lapangan kerja tetapi juga memperbaiki infrastruktur desa. Pemerintah pun mendorong metode pertanian berkelanjutan, seperti pemupukan tanah sawah dengan tanaman hijau orok-orok serta penanaman pohon kemlandingan di lahan miring guna mencegah erosi dan pencurian hutan.

Tahun 1936 menjadi titik balik ketika Pabrik Gula Kalibagor kembali dihidupkan, dan dua tahun kemudian—pada 1938—pabrik ini resmi beroperasi, memberikan angin segar bagi perekonomian Banyumas (Basundoro, 2012). Inisiatif ini tidak lepas dari peran penting Bupati Banyumas, Raden Adipati Aria Sudjiman Martadiredja Gandasubrata, yang menjabat dari tahun 1933 hingga 1948. Di bawah kepemimpinannya, Banyumas mengalami kemajuan pesat dalam bidang tata kota, sosial ekonomi, hingga pendidikan.

Secara paradoksal, krisis yang begitu mencekik ini justru membuka jalan bagi berkembangnya industri tekstil lokal di Hindia Belanda. Ketika perdagangan internasional runtuh, produksi dalam negeri menjadi andalan, dan dari situ tumbuh benih-benih kemandirian industri yang kelak berperan penting dalam sejarah ekonomi negeri ini.

B. Peran Strategis Banyumas dalam Perjuangan Kemerdekaan

Banyumas memiliki **sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda**, yang berakar jauh sebelum periode 1930-an. Wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan Pangeran Diponegoro dan tentara Belanda selama Perang Jawa (1825-1830) (Fauzi Wahyu Hidayat, 2021). Tokoh seperti **Kyai Ngabehi Singadipa** adalah salah satu panglima pasukan perang

Pangeran Diponegoro yang berjuang melawan Belanda di Banyumas dari tahun 1825 hingga 1830.

Benih-benih nasionalisme juga mulai tumbuh di Banyumas, dipengaruhi oleh organisasi pergerakan nasional modern seperti Budi Utomo. Salah satu pendiri Budi Utomo, **R. Angka Prodjosoeirdjo (Dokter Angka)**, berasal dari Banyumas. Tokoh-tokoh terkemuka lokal lainnya, seperti **dr. Grumberg** dan **Ari Tjokroadisurjo**, Bupati Purwokerto (1924–1935), juga secara aktif mendukung gerakan nasionalis dan berperan sebagai pelopor nasionalisme di Banyumas.

Banyumas dikenal sebagai wilayah dengan **mayoritas penduduk nasionalis**¹⁵. Purwokerto, sebagai bagian integral dari Banyumas, muncul sebagai pusat penting bagi aktivitas politik dan militer. Kota ini dipilih oleh **Tan Malaka** untuk mengadakan kongres (Persatuan Peruangan) bersama para pemimpin partai politik lainnya, dan Partai Murba digagas di Banyumas.

Selama masa revolusi kemerdekaan, Purwokerto juga menjadi **markas besar tentara Jepang**, tempat kantor

¹⁵ Angka Prodjosoeirdjo (Dokter Angka), berasal dari Banyumas, menandai keterlibatan awal Banyumas dalam pemikiran nasionalis modern. Tokoh-tokoh terkemuka lokal lainnya, seperti dr. Grumberg dan Ari Tjokroadisurjo, Bupati Purwokerto (1924–1935), juga secara aktif mendukung Gerakan nasionalis dan berperan sebagai pelopor nasionalisme di Banyumas.

keresidenan kembali ke tangan penduduk lokal, dan tempat dibentuknya **Tentara Keamanan Rakyat (TKR)** serta **laskar pelajar seperti IMAM (Indonesia Merdeka Atau Mati)**. Selama masa revolusi kemerdekaan, Purwokerto menjadi pusat penting dalam peralihan kekuasaan dari Jepang ke tangan pribumi. Di kota ini, kantor Karesidenan diserahkan kembali kepada rakyat Indonesia, dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) serta laskar pelajar seperti IMAM mulai dibentuk. Proses transisi berlangsung relatif damai berkat kerja sama antara pemimpin lokal seperti Iskaq Cokroadisuryo, tentara Jepang, dan para pemuda, termasuk eks-PETA. Jepang menyerahkan kekuasaan dan senjata secara bertahap sesuai instruksi pusat, sementara pemuda Banyumas menjaga ketertiban, bahkan menginternir kembali warga Belanda demi keamanan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelatihan militer oleh Jepang sebelumnya turut membentuk kesiapan rakyat Banyumas dalam menghadapi masa revolusi dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan, **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sempat dipindahkan sementara ke Purwokerto** selama masa-masa sulit awal kemerdekaan (Suryo, 2011).

Kepemimpinan militer di wilayah Banyumas juga sangat strategis. **Jenderal Soedirman** (lahir di Purbalingga,

namun memiliki ikatan mendalam dengan Banyumas) berperan krusial sebagai Daidancho (Komandan Batalion) PETA di Banyumas dan kemudian sebagai kepala Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk wilayah Banyumas (Ayuningtyas et al., 2016; Fauzi Wahyu Hidayat, 2021). Ia memimpin perang gerilya selama tujuh bulan di wilayah Banyumas. Pelucutan senjata Jepang di Banyumas bahkan disebut sebagai yang terbesar dibandingkan daerah lain. Transisi kekuasaan yang cepat dan relatif damai dari tangan Jepang pada awal September 1945 merupakan hasil langsung dari kolaborasi erat antara tokoh-tokoh kunci seperti **Mr. Ishak Tjokroadisurjo** (nasionalis), **Kyai Raden Muchtar** (NU), **Kyai Abu Dardiri** (Muhammadiyah), dan **Sudirman** (tokoh pemuda/PETA/Muhammadiyah), yang bekerja sama untuk menggalang dukungan bagi revolusi.

C. Dinamika Ekonomi Masa Perang dan Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, dari tahun 1942 hingga 1945, menjadi salah satu babak paling gelap dalam sejarah kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia (Rachmawati et al., 2024). Masa ini dipenuhi penderitaan yang begitu dalam, saat kekuasaan militer Jepang menggantikan kolonialisme Belanda dengan cengkeraman yang lebih keras dan otoriter. Segala aktivitas

ekonomi diubah secara drastis: dikuasai, diarahkan, dan dieksploitasi sepenuhnya untuk mendukung ambisi militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Kebijakan ekonomi perang yang diterapkan Jepang begitu ketat dan tanpa kompromi (Rachmawati et al., 2024). Seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, serta perusahaan-perusahaan penting disita dan difungsikan untuk kebutuhan perang. Akibatnya, lahan-lahan pertanian banyak yang terbengkalai, menyebabkan produksi pangan menurun drastis. Kelaparan merajalela, kemiskinan makin mengakar.

Dalam rangka memperketat kendali, Jepang memberlakukan sistem pengawasan ekonomi yang sangat ketat. Setiap pelanggaran dihadiah dengan sanksi berat. Barang-barang kebutuhan pokok yang tersisa diawasi distribusinya, dan harga-harga dikendalikan dengan paksa. Bahkan, konsep "autarki" diterapkan secara menyeluruh—setiap wilayah dipaksa mencukupi kebutuhannya sendiri, sekaligus menyumbangkan sumber dayanya untuk perang. Pulau Jawa pun dibagi menjadi 17 wilayah autarki yang bergerak seperti mesin-mesin kecil dalam satu sistem besar.

Masyarakat dipaksa menyerahkan hasil panen, hewan ternak, bahkan harta benda pribadi demi membiayai Perang Pasifik. Kekayaan alam Indonesia, mulai dari hasil tambang, perkebunan, hingga hasil hutan, diangkut ke

Jepang secara besar-besaran. Di tengah penderitaan itu, rakyat juga dipaksa menanam pohon jarak sebagai bahan pelumas, dan kapas sebagai bahan sandang—meskipun, misalnya di daerah Banyumas, tanah tidak cocok untuk tanaman kapas, sehingga malah merusak kualitas lahan (Mardiyya et al., 1945). Bahkan, Pabrik Gula Kalibagor¹⁶ yang sebelumnya menjadi pusat produksi manisnya kehidupan, disulap menjadi pabrik minyak jarak yang menyimbolkan getirnya penjajahan.

Banyumas sendiri memiliki peran penting dalam penyediaan logistik perang (Rachmawati et al., 2024). Banyumas ditargetkan sebagai pemasok beras, dan rakyat dipaksa memenuhi target tersebut tanpa ampun. Dalam bidang militer, perekrutan pemuda Banyumas untuk bergabung dalam PETA (Pembela Tanah Air) dan HEIHO¹⁷ berlangsung masif. Banyak guru dan polisi yang direkrut, memperlihatkan betapa strategi Jepang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

¹⁶ Pabrik gula tertua dan terbesar di Banyumas. Penutupannya pada tahun 1933 menjadi simbol parahnya krisis Malaise, dan pembukaannya kembali pada 1938 menjadi simbol kebangkitan ekonomi lokal.

¹⁷ PETA dan HEIHO: Organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang. PETA (Pembela Tanah Air) adalah pasukan sukarela yang dididik oleh Jepang, banyak anggotanya kelak menjadi tokoh militer RI, termasuk Jenderal Soedirman. HEIHO (Heiho) adalah prajurit pembantu bagi tentara Jepang.

Tak berhenti di situ, sistem kerja paksa yang dikenal sebagai **Romusha** dan **Kinrohosi**¹⁸ menambah beban penderitaan rakyat. Para tokoh masyarakat dipaksa mengumpulkan bahan makanan dalam jumlah besar, yang langsung disalurkan untuk kebutuhan tentara Jepang. Kelangkaan pangan makin menjadi-jadi. Meskipun propaganda Jepang menyebut para Romusha sebagai "prajurit ekonomi" atau "pahlawan pekerja", kenyataannya mereka adalah korban sistem yang menindas (Mardiyya et al., 1945; Rachmawati et al., 2024).

Kondisi perekonomian nasional pun tidak luput dari kehancuran. Inflasi melambung tinggi. Pemerintah militer Jepang mencetak uang tanpa jaminan, sehingga nilai tukarnya nyaris tidak berarti. Barang-barang kebutuhan hidup langka dan harganya melambung luar biasa, membuat kehidupan sehari-hari rakyat menjadi perjuangan yang nyaris mustahil.

Di sisi lain, dunia perbankan juga mengalami perubahan. Bank peninggalan Belanda seperti **Postpaarbank** yang didirikan pada tahun 1897 di Batavia, tetap beroperasi. Namun pada masa pendudukan Jepang,

¹⁸ Sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang. Romusha adalah pekerja paksa umum yang direkrut untuk proyek-proyek militer atau infrastruktur, seringkali dalam kondisi yang mengenaskan. Kinrohosi adalah sistem mobilisasi tenaga kerja sukarela/paksa untuk pengumpulan sumber daya perang.

nasabah justru meningkat—meskipun jumlah dana yang berhasil dihimpun tidak setara dengan masa kolonial. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena pada masa sebelumnya, nasabah didominasi oleh orang Eropa yang memiliki simpanan besar. Bank rakyat masa Jepang dikenal dengan nama **Syomin Ginko**, yang menjadi simbol bahwa sekalipun ekonomi dikuasai oleh militer, sisa-sisa sistem keuangan masih berdenyut, walau pelan dan penuh tekanan.

D. Transformasi Sosial dan Politik Lokal: Mobilisasi Masyarakat

Gelombang guncangan akibat Malaise dan pendudukan Jepang menyapu Banyumas dengan dahsyat, menciptakan dislokasi sosial yang mendalam. Di sepanjang jalan-jalan desa dan kota, kemiskinan menjadi pemandangan umum. Malnutrisi merajalela—termasuk kasus busung lapar yang mengiris hati—sementara pengangguran membayangi hampir setiap rumah tangga. Perekonomian tradisional runtuh; mata pencaharian dari pertanian, kerajinan, hingga pekerjaan pabrik sirna begitu saja. Dalam keterdesakan, warga terpaksa menggadaikan harta benda mereka—from sawah hingga perhiasan keluarga—yang seringkali tak pernah bisa ditebus kembali.

Dalam tekanan hidup yang berat ini, masyarakat Banyumas mencari jalan keluar. Salah satu respons sosial

yang mencolok adalah gelombang transmigrasi besar-besaran. Antara tahun 1934–1936, ribuan keluarga dari Banyumas meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju Lampung, berharap akan lembaran hidup baru yang lebih menjanjikan (Nurwanti et al., 2015).

Namun krisis ini tak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga merasuk ke dalam struktur nilai-nilai keluarga. Terjadi pergeseran yang mencolok: nilai anak kini diukur dari potensi ekonominya, dan anggaran rumah tangga pun mulai dialihkan—dari kebutuhan pokok seperti makanan, menuju pendidikan anak-anak. Menariknya, hal ini memperlihatkan watak egaliter masyarakat Banyumas, di mana investasi pendidikan dilakukan tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.

Di tengah badai kesulitan, masyarakat Banyumas justru menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka menjalani transformasi sosial yang adaptif, ditempa oleh pengalaman kolektif yang pahit sebagai Romusha dan Kinrohosi—pekerja paksa dalam masa pendudukan Jepang. Pengalaman ini menjadi bara dalam sekam yang memantik semangat nasionalisme, membakar tekad untuk meraih kedaulatan penuh bagi bangsa Indonesia.

Situasi politik lokal pun bergerak dinamis. Banyumas dikenal sebagai wilayah dengan denyut

nasionalisme yang kuat dan kehidupan organisasi politik yang aktif. Mobilisasi sosial meningkat secara signifikan, ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok bersenjata dan laskar pelajar. Salah satu babak heroik lahir dari kota Purwokerto, ketika pada 20 Desember 1945, sekelompok pelajar kelas 3 SMP (lulusan eks MULO) yaitu Suparto, Suwarsono, Djahidin, dan Sugiartono membentuk Pasukan Pelajar IMAM¹⁹—singkatan dari *Indonesia Merdeka Atau Mati*. Dengan dukungan penuh dari para guru dan Badan Keamanan Rakyat di Jl. Yosodomo, pasukan ini resmi berdiri di bawah kepemimpinan Suparto, dengan kekuatan sekitar 40 orang siswa. Tugas mereka bukan main-main: membantu BKR dalam menjaga keamanan dan melucuti persenjataan tentara Jepang yang masih tersisa. Pasukan Pelajar IMAM menjadi simbol keberanian generasi muda yang siap mengorbankan masa depannya demi mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dengan semangat membara, mereka bergabung membantu BKR menjaga keamanan dan melucuti senjata-senjata Jepang yang tersisa.

Pada masa awal kemerdekaan, kekuatan militer di wilayah Cilacap tersusun rapi dalam struktur Resimen II

¹⁹ IMAM: Singkatan dari Indonesia Merdeka Atau Mati, laskar pelajar yang dibentuk oleh siswa SMP di Purwokerto pada 20 Desember 1945, bertugas membantu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menjaga keamanan dan melucuti senjata Jepang

yang dipimpin oleh Letkol Moch. Bachrun. Di bawah komandonya, berdiri empat batalyon dengan para pemimpin yang tangguh dan berdedikasi:

1. Bataliyon I Cilacap di bawah pimpinan Mayor Sugeng Tirtosiswoyo,
2. Bataliyon II Sumpyuh dipimpin oleh Mayor Sundjono,
3. Bataliyon III Banyumas dipimpin oleh Mayor Wais, dan
4. Bataliyon IV Cilacap di bawah kendali Mayor Brotosewoyo.

Transformasi besar terjadi pada Januari 1946, ketika Badan Keamanan Rakyat (BKR) resmi berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perubahan ini, Divisi V direorganisasi menjadi Divisi II Sunan Gunung Jati yang mencakup beberapa resimen penting di wilayah barat Jawa:

1. Resimen 12 Cirebon,
2. Resimen 13 Tegal,
3. Resimen 15 Cilacap, dan
4. Resimen 16 Purwokerto.

Ancaman kedatangan tentara Sekutu membangkitkan semangat rakyat. Berbagai elemen masyarakat—terutama yang pernah mendapatkan

pelatihan baris-berbaris dan disiplin militer di masa pendudukan Jepang—bangkit dan bergabung dalam barisan perjuangan bersenjata.

Kesadaran sosial juga tumbuh pesat. Isu kesetaraan mulai menggema, terlihat dari dorongan untuk mengikutsertakan hak-hak perempuan dalam struktur Komite Nasional Daerah (KND). Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak lagi sekadar menjadi penjaga nilai spiritual, tetapi tampil sebagai aktor aktif dalam perubahan sosial dan politik. Mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi, layanan sosial, serta mampu menggerakkan massa dengan efektif.

Semua elemen masyarakat—pemuda, pelajar, perempuan, serta kelompok politik dan agama—berpadu dalam satu semangat perjuangan. Ideologi nasionalisme tidak hanya hidup dalam wacana, tetapi nyata dalam aksi-aksi terorganisir. Banyumas pun tampil sebagai salah satu pusat gerakan sosial yang kuat dan bersatu, memberikan kontribusi penting dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia.

E. Tokoh dan Pahlawan Daerah: Kontribusi Putra-Putri Banyumas

Banyumas memiliki warisan sejarah yang kaya dengan tokoh-tokoh luar biasa yang berperan besar dalam

proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari barisan pejuang militer, pemuka agama, hingga politisi dan ekonom handal, kontribusi kolektif mereka mencerminkan semangat dan dedikasi putra-putri daerah dalam membela tanah air. Peran mereka bukan hanya penting dalam skala lokal, tetapi juga memberi dampak besar dalam tataran nasional.

1. Tokoh Militer

Salah satu figur paling legendaris dalam sejarah militer Indonesia adalah **Jenderal Soedirman**. Meskipun lahir di Purbalingga, ikatannya dengan Banyumas begitu kuat. Ia pernah bekerja di pabrik gula Kalibagor, mengajar sebagai guru, dan aktif di Hizbul Wathan di Cilacap. Karier militernya bermula sebagai **Daidancho PETA di Banyumas**, dan kemudian ditunjuk sebagai **kepala BKR Banyumas** (Susilo, 2018).

Puncak pengabdianya adalah saat ia terpilih sebagai **Panglima Angkatan Perang pada 12 November 1945**. Dalam masa tujuh bulan perang gerilya yang melelahkan, wilayah Banyumas menjadi salah satu medan utamanya. Bahkan, ia dikenal sering memohon restu kepada para ulama lokal sebelum melakukan strategi militer. Soedirman wafat karena TBC pada tahun 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta.

Tokoh militer lainnya adalah **Gatot Soebroto**, putra kelahiran Banyumas yang kelak dikenal sebagai tokoh sentral militer Indonesia pasca-kemerdekaan. Ia turut berperan aktif dalam masa-masa genting perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, dan namanya kemudian diabadikan sebagai Pahlawan Nasional. Kombinasi ketegasan militernya dan ketajaman politik menjadikan Gatot Soebroto sebagai figur penting dalam konsolidasi kekuatan pertahanan nasional.

Pembentukan kekuatan militer formal di wilayah ini ditandai dengan penggabungan satuan **BKR Banyumas menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR)** pada **5 Oktober 1945**, dan kelak menjadi **Divisi V Banyumas**. Resimen dan batalyon lokal juga tumbuh, seperti **Resimen II Cilacap** di bawah Letkol Moch. Bachrun. Selain itu, terdapat tokoh militer lain seperti **Mayor Muh. Sarbini** dan **Letkol Sugeng**, yang memimpin resimen dan batalyon di Cilacap dan Banyumas, memainkan peran penting dalam menahan agresi Belanda di garis depan pertempuran barisan republik.

2. Tokoh Agama dan Sosial

Kontribusi bidang keagamaan diwarnai oleh tokoh seperti **KH. Abu Dardiri (1895–1967)**. Lahir di Gombong, beliau menjadi figur penting dalam pergerakan

Muhammadiyah. Pada tahun 1920, ia menjabat Ketua Muhammadiyah Purbalingga dan kemudian diangkat sebagai **Konsul Muhammadiyah Banyumas pada tahun 1940**, posisi yang ia pegang hingga **1963**, sehingga dijuluki sebagai "Konsul Abadi".

Rumahnya di Purwokerto bahkan menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah. Pasca Proklamasi, KH. Abu Dardiri bergabung dalam **KNI Banyumas**, dan turut menyuarakan pembentukan **Kementerian Agama RI**, yang akhirnya disahkan oleh Presiden Soekarno pada **3 Januari 1946**.

Dari kalangan Nahdlatul Ulama, terdapat **KH. Mahfudz Shiddiq** dan **KH. Ahmad Yasin**, tokoh NU asal Banyumas yang berperan dalam menggerakkan massa santri yang memobilisasi pesantren-pesantren di Banyumas sebagai basis perlawanan dan pendidikan kader bangsa. Bersama ulama-ulama lain, mereka mengeluarkan fatwa jihad untuk membela tanah air dari ancaman kolonialisme. Beberapa pesantren seperti **Pondok Pesantren Al-Falah Banjarnegara**, **Pesantren Benda Sirampog**, dan **Pesantren Jatilawang** menjadi pusat pendidikan dan perlawanan. Para ulama NU di Banyumas turut mengeluarkan **fatwa jihad fi sabilillah** untuk

mempertahankan kemerdekaan serta aktif mendirikan **Laskar Hizbullah dan Sabilillah**.

Kontribusi sosial juga datang dari para guru, jurnalis lokal, serta aktivis perempuan seperti **Siti Aminah**, tokoh penggerak organisasi perempuan di Banyumas, yang memobilisasi dapur umum dan layanan kesehatan untuk tentara rakyat.

3. Tokoh Ekonomi dan Politik

Di bidang ekonomi nasional, Banyumas menelurkan **R. Margono Djojohadikusumo**, sosok visioner yang mendirikan **Bank Negara Indonesia (BNI)** sebagai tonggak awal sistem perbankan nasional pasca-kemerdekaan. Sebagai **Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA)** pertama Republik Indonesia, Margono adalah salah satu arsitek ekonomi nasional yang tak hanya mengatur uang negara, tetapi juga menjaga integritas ekonomi republik yang masih rapuh. Jasanya kini dikenang sebagai warisan monumental dari Banyumas untuk Indonesia.

Kontribusi dari sisi politik dan transisi pemerintahan datang dari **Mr. Ishak Tjokroadisurjo**, tokoh nasionalis yang menjabat sebagai Residen Banyumas. Ia dikenal karena peran strategisnya dalam memastikan transisi kekuasaan dari Jepang ke Indonesia berlangsung damai dan tanpa pertumpahan darah, berkat kolaborasinya

dengan tokoh-tokoh agama dan pemuda. Dalam masa-masa krusial itu, kepemimpinan dan negosiasinya menjadi penentu kestabilan lokal.

Sementara itu, sejarah pergerakan nasional modern di Banyumas juga tidak lepas dari **Dr. Angka Prodjosoedirdjo**, atau yang lebih dikenal sebagai **Dokter Angka**, salah satu pendiri organisasi **Budi Utomo**. Keterlibatannya menandai peran awal Banyumas dalam kancah pergerakan nasional sejak awal abad ke-20, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Tak ketinggalan, **RAA. Sujiman Gandasubrata**, sebagai Bupati Banyumas dari 1933 hingga 1948, menunjukkan kepemimpinan luar biasa dalam masa krisis ekonomi dan transisi politik. Ia memelopori pembangunan pabrik, pengadaan bahan pokok, serta memperjuangkan kemandirian ekonomi lokal melalui berbagai kebijakan progresif. dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menstabilkan ekonomi di tengah krisis Malaise, membangun pabrik beras, dan memprakarsai berbagai infrastruktur penting.

Para tokoh Banyumas menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka dalam spektrum yang luas: militer, agama, politik, dan ekonomi. Sinergi antara mereka menghasilkan kekuatan lokal yang tangguh dan solid dalam mendukung

perjuangan kemerdekaan. Akar lokal mereka menjadi fondasi kuat sebelum menapak ke kancah nasional, menjadikan Banyumas sebagai tempat lahirnya banyak pemimpin revolusioner.

F. Refleksi Perjuangan Kemerdekaan: Ketahanan dan Semangat Nasionalisme

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada Agustus 1945, semangat perjuangan langsung menyala di tanah Banyumas. Dalam waktu singkat, wilayah ini membentuk badan-badan pertahanan lokal seperti cabang Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bahkan, pada 20 Desember 1945, para pelajar di Purwokerto mendirikan laskar IMAM (Indonesia Merdeka Atau Mati), menandai kuatnya semangat juang dari generasi muda.

Namun, di balik langkah maju itu, Banyumas dan daerah lain di Indonesia menghadapi ketidakpastian besar. Negara yang baru lahir ini belum memiliki kerangka hukum dan administrasi yang mapan. Undang-undang peninggalan Jepang dianggap tidak sah, sementara aturan kolonial Belanda sudah tidak relevan. Komite Nasional Indonesia (KNI) baru sebatas menetapkan garis besar pemerintahan, tanpa rincian pelaksanaan di tingkat lokal.

Menjawab kekosongan ini, Residen Iskaq Cokroadisurya membentuk Komite Nasional Daerah (KND) tingkat Karesidenan pada Desember 1945, diikuti oleh Bupati Sujiman Mertadireja Gandasubrata yang mendirikan KND tingkat Kabupaten. Keduanya menjadi fondasi awal sistem legislatif lokal di Banyumas.

Ketika Revolusi Fisik berkobar antara 1945 hingga 1949, Banyumas menjadi wilayah strategis yang tak tergantikan. Kepemimpinan Jenderal Soedirman dalam perang gerilya di kawasan ini memperlambat laju invasi Belanda. Di Purwokerto, semangat juangnya terekam dalam kata-katanya yang terkenal: *"Lebih baik dibom atom, daripada tidak merdeka 100%"*.

Kontribusi militer dari wilayah ini pun tidak main-main. Pembentukan Resimen 1 Purwokerto dan Resimen II Cilacap, serta peran aktif laskar pelajar seperti IMAM, menunjukkan bahwa Banyumas adalah garda depan perjuangan. Kerja sama erat antara kekuatan nasionalis dan kelompok Islam berhasil melucuti senjata tentara Jepang dalam skala besar dan membentuk pertahanan solid menghadapi ambisi Belanda untuk kembali menjajah.

Namun, ujian besar datang pada 20 Juli 1947. Agresi Militer I yang dipimpin Van Mook membawa pasukan Belanda masuk Banyumas lewat timur Gunung Slamet,

menguasai Bobotsari, Purbalingga, dan Purwokerto. Keadaan makin pelik saat wilayah Banyumas dimasukkan dalam kekuasaan Belanda berdasarkan Perjanjian Renville (8 Desember 1947 – 17 Januari 1948), yang memperkenalkan batas wilayah melalui Garis Van Mook.

Ketika perundingan dengan pihak Sekutu (yang ternyata merupakan kepanjangan tangan Belanda) mengalami jalan buntu, Pemerintah RI memindahkan pusat pemerintahannya dari Jakarta ke Yogyakarta. Kementerian Dalam Negeri bahkan harus beroperasi dari Purwokerto. Banyak hotel, pesanggrahan, dan rumah-rumah eks pabrik gula disulap menjadi kantor dan tempat tinggal sementara. Tentara Republik Indonesia (TRI), hasil transformasi dari BKR sejak Januari 1946, terus memperkuat diri. Berbagai kelompok masyarakat seperti Hisbulah, Sabililah, dan Pesindo ikut dilatih perang dalam semangat perjuangan kolektif.

Pada April 1951, setelah sekian tahun dalam medan perang, para Tentara Pelajar dan anggota IMAM akhirnya dipulangkan ke daerah masing-masing untuk kembali ke sekolah. Masa pemerintahan Bupati RAA Sujiman Gandasubrata (1933–1948) pun berakhir, dan pada masa pendudukan Belanda (1948–1950), tampuk kepemimpinan berpindah ke Ario Sapangat Kartanegara.

Saat Moh. Kabul Purwodireja menjabat Bupati Banyumas (1950–1953), masyarakat masih merasakan dampak dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dianggap merugikan bangsa. Rasa kecewa ini memuncak dalam Rapat Raksasa pada 1 Mei 1953 di alun-alun kota Banyumas, dihadiri sekitar 2500 orang, yang menyerukan pembatalan perjanjian tersebut. Sementara itu, pada tahun 1952, Baturraden—yang telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda—mulai dipertimbangkan kembali untuk dikembangkan sebagai daerah potensial setelah Banyumas melewati masa-masa sulit.

Warisan perjuangan pada periode 1930–1949 telah membentuk identitas kolektif dan nasionalisme yang mengakar kuat di Banyumas. Perlawanan yang berpadu antara cara-cara tradisional dan strategi modern, dipimpin oleh tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, menciptakan model mobilisasi rakyat yang efektif. Keteguhan hati masyarakat di tengah krisis ekonomi dan pendudukan brutal menjadi sumber inspirasi lintas generasi.

Kini, pendidikan sejarah di Banyumas terus menanamkan kebanggaan nasional dan semangat perjuangan kepada generasi muda. Harapannya, semangat nasionalisme ini akan memastikan bahwa keberadaan Indonesia tetap diakui dan tidak hilang di tengah arus

globalisasi. Pengalaman Banyumas dalam masa perjuangan membuktikan bahwa kemerdekaan adalah hasil dari kerja kolektif seluruh elemen masyarakat—dan warisan itu, hingga hari ini, masih membentuk wajah Banyumas yang tangguh dan penuh semangat juang.

BAB 5

Masa Awal Kemerdekaan dan Fondasi Pembangunan Banyumas (1950-an - Orde Lama)

Periode awal kemerdekaan Indonesia, khususnya antara tahun 1950-an hingga berakhirnya Orde Lama (1966), merupakan masa krusial bagi pembentukan fondasi negara. Di tengah dinamika nasional yang penuh gejolak, seperti tantangan dalam membangun jati diri sebagai negara baru, menstabilkan kehidupan politik dan sosial, mengatasi ketimpangan ekonomi, serta meredam konflik ideologi yang sedang berkembang, daerah-daerah seperti Banyumas juga mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupannya. Periode ini juga ditandai dengan upaya untuk meruntuhkan sistem feodalisme, aristokrasi, dan monarki yang telah usang, digantikan dengan prinsip-prinsip baru yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik kulminasi perjuangan untuk mengganti sistem kolonial dengan sistem nasional, dengan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta ditopang oleh NKRI dan Bhinneka Tunggal

Ika (Arif, 2016). Tulisan Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Banyumas menghadapi tantangan dan peluang pasca-kemerdekaan, serta bagaimana fondasi pembangunan diletakkan selama era tersebut. Analisis ini akan mencakup perubahan administrasi, perkembangan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta dinamika sosial dan budaya yang membentuk identitas Banyumas modern.

A. Latar Belakang Sejarah Banyumas

Sejarah Banyumas telah lama terjalin dengan narasi kekuasaan dan ekonomi kolonial, yang umumnya dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai **periode eksploitasi** yang menguras kekayaan dan merendahkan martabat bangsa (Sinngih Tri Sulistiyono et, 2013). Sebelum kemerdekaan, Karesidenan Banyumas merupakan bagian dari daerah Mancanegara Kulon (atau Mancanegara Barat) dan Wetan²⁰ dari kerajaan Mataram, Kartasura, hingga Kasunanan Surakarta. Wilayah ini diambil alih oleh Belanda setelah Perang Diponegoro²¹ tahun 1825-1830 (Alamsyah,

²⁰ Mancanegara Kulon dan Wetan: Wilayah di luar keraton (pusat kerajaan) yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Jawa (seperti Mataram, Kartasura, atau Surakarta). Mancanegara Kulon adalah wilayah barat (termasuk Banyumas), dan Mancanegara Wetan adalah wilayah timur.

²¹ Perang Diponegoro (1825–1830): Perang besar antara pasukan Pangeran Diponegoro dan Belanda. Perang ini menimbulkan

2018; Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015; Sinngih Tri Sulistiyono et, 2013). Pengambilalihan ini merupakan **kompensasi** atas kerugian besar yang diderita Belanda dalam perang tersebut, yang mencapai F 30.000.000²² untuk biaya perang dan F 2.000.000 untuk keperluan militer khusus. Ribuan serdadu Eropa dan pribumi, serta sekitar 200.000 rakyat Jawa, tewas dalam perang ini, menyebabkan populasi Yogyakarta menyusut separuhnya¹³¹⁴. Karena kerajaan-kerajaan tidak mampu menebus kerugian, Belanda meminta sebagian wilayah Mancanegara Barat (termasuk Banyumas dan Bagelen) dan Mancanegara Timur (Kediri dan Madiun). Banyumas secara spesifik diambil dengan kompensasi sebesar F 190.000, di mana F 80.000 diberikan kepada Surakarta dan F 10.000 kepada Yogyakarta (Arinda et al., 2017; Nurwanti et al., 2015; Sinngih Tri Sulistiyono et, 2013).

Pada masa kolonial, Banyumas mengalami transformasi ekonomi dan sosial melalui sistem tanam paksa (1830–1870), yang memperkenalkan berbagai komoditas ekspor seperti tebu, kopi, indigo, teh, dan tembakau. Pabrik gula didirikan di Kalibagor, Klampok, dan

kerugian finansial dan korban jiwa yang sangat besar bagi Belanda, yang kemudian menuntut kompensasi berupa wilayah.

²² F 30.000.000: Florin (Gulden), mata uang Belanda yang digunakan saat itu. Angka ini mencerminkan besarnya kerugian Belanda dalam Perang Diponegoro.

Bojong, serta infrastruktur transportasi mulai berkembang. Banyumas sendiri tidak tumbuh dari desa, melainkan langsung dibangun sebagai kota oleh Adipati Mrapat pada abad ke-16, menggantikan Wirasaba sebagai pusat kekuasaan. Namun, krisis ekonomi pada awal abad ke-20 menyebabkan penutupan pabrik, meningkatnya kemiskinan, dan wabah penyakit. Hal ini mendorong pemindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto pada tahun 1936 karena faktor geografis dan infrastruktur (Priyadi, 2000).

Karakteristik masyarakat Banyumas menunjukkan adaptasi dan ketahanan yang unik. Masyarakatnya cenderung melihat masa lampau sebagai referensi, namun memiliki potensi untuk memandang masa depan sebagai acuan dalam menghadapi tantangan zaman (Priyadi, 2008). Mereka dikenal egaliter, bebas, vulgar dalam ekspresi, serta memiliki budaya afirmatif dan kritis. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Banyumas seringkali menunjukkan sikap memberontak atau kritis terhadap penguasa yang dianggap tidak menghargai jasa atau menindas. Semangat nasionalisme juga tercermin dari tindakan tokoh lokal seperti Sudjiman Mertadiredja Gandasubrata, yang memilih mengungsi saat Agresi Militer Belanda, menunjukkan kesetiaan kepada Republik Indonesia meskipun pernah

menjadi pamong praja di era kolonial. Sudjiman, sebagai Bupati Banyumas dari tahun 1933 hingga 1950 (Nurwanti et al., 2015), menunjukkan nasionalismenya dengan memilih mengungsi saat agresi militer Belanda dan menolak tawaran dari pemerintah Belanda untuk kembali bekerja, bahkan istrinya, Siti Subinjei, juga menunjukkan sikap yang sama. Sikapnya ini disintesis menjadi nilai kemerdekaan (Priyadi, 2008).



B. Perubahan Administrasi dan Politik Lokal (1950-an - Orde Lama)

Masa awal kemerdekaan membawa perubahan fundamental dalam struktur administrasi dan dinamika politik di Banyumas, seiring dengan upaya pembentukan sistem pemerintahan yang baru di tingkat nasional. Periode ini, dari 1950-an hingga berakhirnya Orde Lama, adalah masa krusial bagi pembentukan fondasi negara, di mana Banyumas mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupannya.

Pemerintahan dan Politik Lokal Banyumas (1950-an - Orde Lama)

	 Struktur Pemerintahan Daerah	 Dinamika Politik Lokal
Transisi Administrasi	Dari keresidenan kolonial ke kabupaten otonom	Dipengaruhi perkembangan politik nasional
Penghapusan Entitas	Penghapusan desa-desa perdikan	Tuntutan pembatalan Perjanjian Meja Bundar
Wacana Pemekaran	Pemekaran wilayah karena ketimpangan ekonomi	Gerakan buruh jadi kekuatan politik
Peran Militer	Kepemimpinan dipegang kalangan militer	Pertumbuhan gerakan sosial keagamaan
Kebijakan Pusat	Sentralisasi membatasi potensi daerah	Pendidikan bertujuan nation and character building

Transisi dari sistem keresidenan kolonial ke bentuk kabupaten yang otonom setelah kemerdekaan merupakan langkah penting dalam perubahan administrasi. Selain itu, wacana pemekaran wilayah mulai muncul, dengan keinginan untuk membagi Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom: Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kabupaten Banyumas (Induk).

Dalam dinamika politik lokal, Banyumas sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik nasional dan didominasi oleh partai-partai berideologi nasionalis. Era

Demokrasi Liberal (1950-1959) diwarnai oleh sistem multipartai yang diinspirasi dari Belanda, di mana kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan Umum (Pemilu) pertama pada tahun 1955 menunjukkan dominasi PNI²³ (Nasionalis) sebagai peraih suara terbanyak di Banyumas, yang dikenal sebagai basis massa nasionalis kuat sejak era Orde Lama.

Peran militer dalam pemerintahan lokal juga menjadi ciri khas periode ini, dengan kepemimpinan di Banyumas seringkali dipegang oleh kalangan militer sejak tahun 1966. Kehadiran militer dalam jabatan sipil sudah berlangsung lama, bahkan sejak masa sekitar kemerdekaan, dan Orde Lama menjadi tonggak keterlibatan militer dalam urusan di luar pertahanan negara, termasuk mengatasi pemberontakan daerah, yang menunjukkan konsolidasi kekuasaan dan peran ganda militer dalam menjaga stabilitas dan Pembangunan

C. Struktur Pemerintahan Daerah

Transisi dari sistem keresidenan kolonial ke bentuk kabupaten yang otonom pasca-kemerdekaan merupakan

²³ Partai Nasional Indonesia, partai politik berideologi nasionalis yang didirikan oleh Soekarno. Dominasi PNI di Banyumas pada Pemilu 1955 mengindikasikan kuatnya sentimen nasionalisme di wilayah tersebut.

langkah penting. Residen Banyumas pertama, de Sturler, menandai awal pemerintahan kolonial di Banyumas (Alamsyah, 2018; Nurwanti et al., 2015). Setelah kemerdekaan, kepemimpinan daerah beralih ke bupati, dengan suksesi kepemimpinan yang tercatat dalam sejarah lokal, seperti Adipati Mertayuda I dan Yudanegara II.

Salah satu kebijakan signifikan pada masa Orde Lama adalah penghapusan desa-desa perdikan.²⁴ Contohnya, status Gumelem sebagai daerah perdikan dihapus berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1946 oleh pemerintah Orde Lama. Penghapusan ini mengindikasikan upaya sentralisasi dan penyeragaman administrasi di bawah negara kesatuan.

Pada periode ini, wacana pemekaran wilayah mulai muncul, mencerminkan keinginan untuk membagi Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom: Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kabupaten Banyumas (Induk). Kota Purwokerto sendiri telah lama dicanangkan sebagai bagian dari pusat kawasan strategis pertumbuhan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan

²⁴ Desa atau wilayah yang pada masa kerajaan memiliki hak otonomi atau kebebasan (pembebasan) tertentu, seringkali dari pajak, sebagai imbalan atas jasa besar kepada raja atau keraton²⁷. Penghapusannya oleh RI adalah upaya untuk menyatukan administrasi negara.

Kebumen (Barlingmascakeb²⁵). Wacana pemekaran ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antar daerah di Banyumas, di mana Kabupaten Banyumas menduduki peringkat pertama dalam ketimpangan pendapatan di antara lima kabupaten di kawasan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk otonomi, disparitas pembangunan masih menjadi isu.

Peran militer dalam pemerintahan lokal juga menjadi ciri khas periode ini. Sejak tahun 1966, kepemimpinan di Banyumas seringkali dipegang oleh kalangan militer. Kehadiran militer dalam jabatan-jabatan sipil telah berlangsung lama, bahkan sejak masa sekitar kemerdekaan, dan Orde Lama berperan sebagai tonggak dalam keterlibatan militer pada urusan di luar pertahanan negara, termasuk dalam mengatasi pemberontakan di daerah. Hal ini menunjukkan adanya konsolidasi kekuasaan dan peran ganda militer dalam menjaga stabilitas dan Pembangunan (Ranti Rahmatiah et al., 2017).

²⁵ Akronim untuk kawasan strategis pertumbuhan di Jawa Tengah yang meliputi lima kabupaten: Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen.

BAB 6

Era Modernisasi Dan Industrialisasi Orde Baru Di Banyumas (1966-1998): Transisi Ekonomi, Konsekuensi Spasial, Dan Warisan Ketimpangan

Banyumas dalam Matriks Pembangunan Orde Baru

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai transformasi yang dialami Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selama periode Orde Baru (1966-1998). Secara geostrategis, Banyumas merupakan pintu gerbang penting di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, dengan basis historis yang kuat sebagai daerah agraria yang subur. Kedatangan rezim Orde Baru menandai penerapan kerangka konseptual *Developmentalism* (Pembangunanisme)²⁶, sebuah model pertumbuhan yang didorong secara sentralistik oleh negara dan mengandalkan mobilisasi modal, baik domestik maupun asing

²⁶ *Developmentalism* (Pembangunanisme): Kerangka konseptual yang diterapkan Orde Baru, mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang didorong secara sentralistik oleh negara dan modal, seringkali mengabaikan pemerataan sosial dan politik.

Kebijakan utama yang menjadi cetak biru pembangunan di Banyumas adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)²⁷, yang dilaksanakan secara bertahap mulai Repelita I (1969-1974) dan seterusnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjembatani kebijakan makro nasional yang sentralistik ini dengan dampak mikro regional, khususnya dalam kaitannya dengan percepatan urbanisasi di Purwokerto dan perubahan struktur sosial-ekonomi yang mendasar di seluruh kabupaten.

A. Pergeseran Struktur Ekonomi: Industrialisasi dan Urbanisasi

Periode Orde Baru ditandai oleh upaya sistematis untuk menggeser perekonomian Banyumas dari ketergantungan agraria tradisional menuju struktur yang lebih modern, didominasi oleh sektor non-pertanian.

1. Dualitas Ekonomi Regional dan Pergeseran PDRB

Transisi ekonomi terlihat jelas dalam perubahan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas. Pada awal Orde Baru, sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian. Namun, sejalan dengan pelaksanaan Repelita, terjadi peningkatan

²⁷ Repelita: Rencana Pembangunan Lima Tahun, cetak biru kebijakan ekonomi yang sentralistik, dilaksanakan bertahap mulai Repelita I (1969-1974) dan seterusnya. Pembangunan Banyumas sangat bergantung pada alokasi dana pusat (Inpres).

kontribusi yang signifikan dari sektor sekunder dan tersier, meliputi Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Jasa. Peningkatan PDRB di sektor-sektor ini adalah indikasi keberhasilan kebijakan industrialisasi yang diprioritaskan.

Meskipun demikian, keberhasilan ini menciptakan dualisme ekonomi yang rentan. Data PDRB terkini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Hal ini merefleksikan warisan modernisasi Orde Baru yang berhasil menggeser masyarakat Banyumas dari basis produksi agraria menuju basis konsumsi urban, namun pertumbuhan ini sering kali tidak merata.

2. Purwokerto sebagai *Growth Pole* Urban

Kebijakan pembangunan terpusat Orde Baru secara efektif menjadikan Purwokerto sebagai pusat pertumbuhan regional (*growth pole*).²⁸ Konsentrasi investasi di Purwokerto bertujuan mempercepat laju pertumbuhan kota dan menjadikannya pusat ekonomi utama di kawasan Banyumas Raya.

Katalisator utama urbanisasi adalah pembangunan infrastruktur mobilitas skala besar. Sebagai contoh,

²⁸ **Growth Pole:** Istilah dalam ekonomi regional yang merujuk pada pusat geografis (seperti kota Purwokerto) di mana investasi dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi untuk merangsang pertumbuhan wilayah di sekitarnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan terminal baru Tipe A (misalnya, yang berlokasi di Jalan Suwatyo) untuk menggantikan terminal lama yang kapasitasnya terbatas. Perencanaan fasilitas ini dirancang untuk memperlancar mobilitas angkutan dan manusia, dengan penyediaan area parkir yang luas untuk Bus AKAP/AKDP (30 SRP) dan kendaraan lainnya, serta pengaturan sirkulasi yang terstruktur. Infrastruktur ini meningkatkan konektivitas secara drastis, yang menurut studi ekonomi, merupakan pengungkit paling efektif untuk memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian (Azan Paiker, 2002).

Pembangunan infrastruktur semacam ini, yang didorong oleh fokus Repelita pada output fisik, secara langsung menaikkan nilai ekonomi lahan non-pertanian di sekitar Purwokerto. Proses ini mendorong petani untuk menjual lahan mereka karena tingginya biaya peluang (*opportunity cost*), sebuah dinamika yang menjadi akar konflik fundamental antara pembangunan fisik dan ketahanan pangan lokal.

3. Konversi Lahan Sawah: Biaya Spasial Pembangunan

Indikator fisik paling nyata dari tekanan urbanisasi dan industrialisasi adalah konversi lahan sawah.²⁹ Antara tahun 1990 hingga 2015, Kabupaten Banyumas mengalami penurunan luas lahan sawah sebesar 2.802 hektar, yang setara dengan rata-rata 112 hektar per tahun. Pada tahun 1990, luas lahan sawah mencapai 34.594 hektar, yang kemudian berkurang menjadi 33.043 hektar pada akhir tahun 2015.

Faktor-faktor yang terbukti berpengaruh nyata terhadap percepatan konversi lahan sawah meliputi laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan luas lahan pemukiman, dan secara relatif, penurunan kontribusi PDRB dari sektor pertanian. Analisis menunjukkan adanya korelasi langsung: proyek infrastruktur besar di masa Orde Baru, seperti pembangunan terminal dan jalan, meningkatkan aksesibilitas dan nilai lahan, yang pada gilirannya mempercepat konversi lahan sawah.

²⁹ **Konversi Lahan Sawah:** Perubahan fungsi lahan sawah menjadi non-sawah, seperti perumahan atau industri. Di Banyumas, hal ini dipercepat oleh pembangunan infrastruktur dan naiknya nilai ekonomi lahan non-pertanian.

**Tabel 6.1.1: Konversi Lahan Sawah Akibat Tekanan
Industrialisasi dan Urbanisasi di Banyumas**

Periode Analisis	Rata-rata Konversi Lahan Sawah (Ha/Tahun)	Total Luas Lahan Sawah Hilang (Ha)	Signifikansi Faktor Pendorong
1990 - 2015	~112	2.802	Dipengaruhi signifikan oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan lahan pemukiman

B. Kebijakan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Banyumas selama Orde Baru tidak terlepas dari kerangka kebijakan yang sentralistik, yang memprioritaskan stabilitas dan percepatan output fisik.

1. Implementasi Repelita di Tingkat Lokal

Prinsip *Pembangunanisme* Orde Baru menempatkan kebijakan nasional yang sentralistik, melalui Repelita I,

Repelita II, dan seterusnya, sebagai penentu utama pembangunan daerah. Pembangunan Banyumas sangat bergantung pada alokasi dana pusat (Inpres) dan pembiayaan melalui skema Rencana Pembangunan Lima Tahun. Untuk mencapai target pertumbuhan makro, Orde Baru mengandalkan modal, termasuk modal asing, sebagai sumber pendanaan utama.

Ketergantungan pada pembiayaan pusat dan modal asing ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Banyumas memiliki otonomi fiskal yang sangat terbatas. Akibatnya, pembangunan regional menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan yang ditetapkan di Jakarta, dengan fokus utama pada pemenuhan target PDRB dan output fisik, seringkali mengabaikan kebutuhan lokal yang lebih nuansa.

2. Infrastruktur sebagai Pengungkit (*Multiplier*) Utama

Strategi utama pembangunan di daerah adalah penggunaan infrastruktur sebagai pengungkit paling efektif untuk menciptakan *multiplier effect* ekonomi. Di Banyumas, hal ini terefleksi dalam investasi besar-besaran pada jalan raya, jembatan, dan fasilitas perkotaan, yang ditujukan untuk mendukung mobilitas perdagangan dan industri.

Namun, terdapat kontras antara praktik pembangunan Orde Baru dan konsep pembangunan modern. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan saat ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selama Orde Baru, prioritas terhadap output fisik dan kecepatan pembangunan seringkali menyebabkan aspek keberlanjutan dan biaya eksternal dikesampingkan. Misalnya, pembangunan fisik adalah tolok ukur keberhasilan utama, sementara konsekuensi lingkungan jangka panjang, seperti polusi Sungai Serayu (dibahas di 6.5), dianggap sebagai biaya yang dapat ditoleransi demi pertumbuhan.

3. Studi Kasus Pembangunan Transportasi Regional

Perencanaan pembangunan Terminal Purwokerto baru di Jalan Suwatyo merupakan studi kasus yang menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur secara langsung mendukung pertumbuhan PDRB non-pertanian. Terminal ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan kapasitas terminal lama, dengan penyediaan lahan seluas 10 hektar. Dengan kapasitas yang dirancang untuk menampung puluhan satuan ruang parkir bus AKAP, AKDP, angkot, dan angkutan pedesaan, fasilitas ini bertujuan memperlancar sirkulasi dan mobilitas, sehingga mendukung

sektor jasa dan perdagangan yang menjadi inti pertumbuhan urban.

C. Perubahan Sosial dan Demografis: Migrasi dan Kesenjangan

Industrialisasi dan urbanisasi yang cepat di Banyumas tidak hanya mengubah lanskap ekonomi, tetapi juga pola sosial dan demografis, yang pada akhirnya mewariskan masalah ketimpangan struktural.

1. Pola Migrasi dan Tekanan Demografis

Urbanisasi di Banyumas didorong oleh dua faktor utama: daya tarik (*pull factor*) dari Purwokerto yang menawarkan kesempatan kerja di sektor industri dan jasa, serta faktor dorong (*push factor*) dari wilayah pedesaan. Faktor dorong ini diperkuat oleh konversi lahan sawah yang masif, yang mengurangi mata pencaharian agraria dan mendorong penduduk usia produktif mencari penghidupan di sektor non-pertanian atau melakukan migrasi keluar daerah. Arus urbanisasi internal ini meningkatkan tekanan demografis dan kebutuhan layanan dasar di pusat kota.

2. Warisan Ketimpangan Pendapatan

Salah satu konsekuensi pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan di pusat urban adalah

peningkatan ketimpangan ekonomi. Data Gini Rasio³⁰ Kabupaten Banyumas, yang tercatat 0,397 pada tahun 2023, berfungsi sebagai indikator proksi struktural yang diwariskan dari periode pembangunan yang sentralistik. Angka ini mengindikasikan bahwa distribusi hasil pembangunan di Banyumas bersifat tidak merata, menciptakan jurang yang signifikan (BPS Banyumas, 2023)

Konsentrasi investasi di Purwokerto (sektor jasa dan perdagangan) memfasilitasi pembentukan kelas menengah urban yang makmur, sementara komunitas pertanian di pinggiran kota dan wilayah pedesaan mengalami marginalisasi relatif. Ketidakmerataan spasial ini menjadi masalah politik jangka panjang. Tuntutan pemekaran wilayah yang muncul pasca-Orde Baru secara eksplisit menyebut kegagalan rezim sebelumnya dalam menciptakan pemerataan pembangunan sebagai motivasi utama. Kegagalan ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan ekonomi menghasilkan konsekuensi politik terhadap legitimasi tata kelola regional.

³⁰ Gini Rasio: Indikator statistik yang mengukur tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan. Angka mendekati 0,40 menunjukkan ketimpangan yang signifikan

3. Ketahanan Sektor Pertanian (*Resilience as a Social Buffer*)

Meskipun menghadapi tekanan konversi lahan yang tinggi, sektor pertanian di Banyumas menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Data menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap kokoh menopang perekonomian dan mampu tumbuh positif, bahkan saat terjadi gejolak ekonomi global dan nasional (misalnya, tumbuh 1,51% pada tahun 2020).

Stabilitas ini memiliki implikasi sosial yang mendalam. Sektor pertanian berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal, sehingga mencegah lonjakan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial saat krisis terjadi. Hal ini menunjukkan dualisme ekonomi: industrialisasi Banyumas bersifat parsial dan belum sepenuhnya menggantikan peran dasar agraria, yang ironisnya, memberikan stabilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**Tabel 6.3.1: Indikator Ketimpangan dan Resiliensi
Ekonomi di Kabupaten Banyumas**

Indikator Sosial Ekonomi	Data Kuantitatif	Implikasi Warisan Orde Baru
Gini Rasio (2023 Proxy)	0,397	Bukti ketidakmerataan yang persisten, hasil dari pertumbuhan berpusat di Purwokerto.
Resiliensi Pertanian (Saat Krisis)	Pertumbuhan 1,51 persen (2020)	Sektor tradisional berfungsi sebagai penyangga sosial di tengah tekanan modernisasi.
Konversi Lahan	112 Ha/Tahun (1990-2015)	Tekanan finansial dan alih profesi dari komunitas agraria.

D. Modernisasi Budaya dan Pengaruh Media

Modernisasi yang dibawa oleh Orde Baru di Banyumas tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kultural, dengan media massa dan pendidikan digunakan sebagai alat utama untuk membentuk identitas yang pro-pembangunan dan sentralistik.

1. Media dan Narasi Sentralistik

Di bawah Orde Baru, media massa negara seperti TVRI dan RRI berfungsi sebagai corong utama untuk menyebarkan narasi *pembangunanisme* dan menguatkan ideologi Pancasila. Penyebaran program-program nasional (seperti Keluarga Berencana atau program swasembada) disosialisasikan secara masif, yang bertujuan mengubah perilaku sosial tradisional.

Proses ini dapat dianalisis sebagai bentuk *kolonialisme internal*, di mana nilai-nilai yang diproduksi oleh pusat kekuasaan (Jakarta atau Jawa Baku) disebarkan secara hegemoni. Hal ini menciptakan hirarki sosial di mana dialek dan budaya regional Banyumasan seringkali dimarjinalkan, dan gaya hidup urban yang 'modern' lebih dihargai daripada tradisi lokal, terutama di pusat kota Purwokerto.

2. Pendidikan dan Pembentukan Kelas Baru

Keberadaan institusi pendidikan tinggi di Purwokerto (seperti Universitas Jenderal Soedirman/UNSOED) memainkan peran penting dalam melahirkan kelas intelektual, teknokrat, dan profesional baru. Kelas ini menjadi agen modernisasi yang mengadopsi

dan menyebarkan nilai-nilai baru. Peningkatan akses ke pendidikan, ditambah dengan peningkatan pendapatan dan paparan media, memicu pergeseran nilai dari komunal dan tradisional menuju individualisme dan konsumerisme di kalangan masyarakat urban.

3. Adaptasi dan Resistensi Kultural Lokal

Budaya Banyumasan yang khas, termasuk dialek *Ngapak* dan kesenian tradisional seperti *Ebeg* atau *Lengger*, harus beradaptasi dengan tuntutan rezim. Kesenian lokal seringkali diinstrumentalisasi untuk menyisipkan pesan-pesan pembangunan atau politik Orde Baru agar dapat memperoleh dukungan dan legitimasi dari pemerintah daerah. Adaptasi ini mencerminkan mekanisme pertahanan budaya lokal dalam menghadapi gelombang homogenisasi yang didorong oleh negara.

E. Pengaruh Globalisasi Awal

Kebijakan liberalisasi ekonomi Orde Baru membuka pintu bagi integrasi Banyumas ke dalam jaringan ekonomi global, yang membawa manfaat berupa investasi namun juga biaya eksternal yang signifikan.

1. Investasi Asing dan Integrasi Ekonomi Global

Kebijakan Repelita secara eksplisit mengundang modal asing (PMA) dan modal dalam negeri (DDI). Ini mendorong pembangunan industri, terutama sektor padat

karya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Banyumas menjadi terikat pada fluktuasi harga komoditas global dan permintaan pasar ekspor. Industrialisasi ini mengubah sifat tenaga kerja di Banyumas, dari berbasis agraria menjadi berbasis pabrik.

2. Infrastruktur Koridor Jawa Selatan

Banyumas memiliki posisi kunci sebagai koridor logistik penting di jalur selatan Jawa. Pembangunan infrastruktur regional, termasuk jalan raya dan fasilitas transportasi seperti Terminal Purwokerto , merupakan respons terhadap kebutuhan logistik nasional dan global untuk memfasilitasi distribusi barang antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Pembangunan ini memastikan Banyumas tidak terisolasi dan dapat berpartisipasi dalam arus perdagangan yang semakin terglobalisasi.

3. Biaya Lingkungan dari Produksi Global

Salah satu konsekuensi terberat dari industrialisasi cepat di bawah regulasi lingkungan yang longgar (khas rezim Orde Baru) adalah kerusakan ekologis. Peningkatan aktivitas industri, pertanian, dan komunal yang terkait dengan urbanisasi menyebabkan pencemaran parah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu.

Analisis kualitas air di DAS Serayu menunjukkan adanya biaya eksternal yang besar yang ditanggung oleh

lingkungan. Tingkat *Chemical Oxygen Demand* (COD)³¹ rata-rata tercatat sebesar 62,52 mg/L, jauh melampaui baku mutu yang ditetapkan (25 mg/L). Selain itu, tingkat *Dissolved Oxygen* (DO)³² minimum yang tercatat hanya 2,10 mg/L. Tingginya COD dan rendahnya DO adalah bukti empiris pencemaran berat, menunjukkan bahwa industri yang diizinkan beroperasi di masa Orde Baru mengalihkan biaya produksi mereka ke lingkungan publik, merusak sumber air vital regional. Hal ini menunjukkan konflik langsung antara memprioritaskan pertumbuhan PDRB dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

F. Refleksi Kritis: Kemajuan, Konsekuensi, Aspek Menarik, dan Memperhatikan

Tiga dekade modernisasi di Banyumas merupakan studi kasus ambivalen yang menunjukkan keberhasilan pembangunan fisik diiringi oleh biaya sosial dan lingkungan yang signifikan.

³¹ **COD (Chemical Oxygen Demand)**: Indikator pencemaran air. Nilai COD yang tinggi menunjukkan adanya banyak bahan organik atau anorganik dalam air yang membutuhkan oksigen untuk terurai, seringkali berasal dari limbah industri atau domestik

³² **DO (Dissolved Oxygen)**: Kadar oksigen terlarut dalam air. Tingkat DO yang rendah (seperti 2,10 mg/L) menunjukkan bahwa ekosistem air (Sungai Serayu) tertekan atau tercemar parah, tidak sehat bagi kehidupan akuatik.

1. Timbangan Kemajuan Struktural

Secara ekonomi, capaian Orde Baru adalah transformasi PDRB yang sukses dari basis agraria menjadi dominasi sektor jasa dan industri. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan fasilitas transportasi regional, meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup. Selain itu, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal.

2. Konsekuensi Jangka Panjang (Biaya Sosial dan Lingkungan)

Warisan paling signifikan dari era Orde Baru adalah ketimpangan struktural yang persisten, sebagaimana tercermin dalam Gini Rasio 0,397. Ketidakadilan ekonomi ini merupakan hasil dari model pertumbuhan yang terpusat di Purwokerto dan gagal didistribusikan secara merata. Konsekuensi lain yang membutuhkan biaya pemulihan besar adalah degradasi lingkungan, terutama pencemaran ekologis Sungai Serayu. Kerusakan ini membuktikan bahwa pembangunan mengabaikan aspek berkelanjutan, sebuah kritik yang kini menjadi landasan konsep pembangunan inklusif dan berkualitas.

3. Aspek Menarik (Nuansa dan Kontradiksi)

Salah satu kontradiksi menarik adalah resiliensi sektor pertanian. Meskipun menghadapi tekanan konversi lahan yang besar (112 Ha/tahun), sektor ini tetap berfungsi sebagai penopang ekonomi saat krisis. Hal ini membantah narasi bahwa modernisasi mutlak menghancurkan sektor tradisional, sebaliknya, ia menunjukkan kemampuan adaptasi sektor agraria sebagai penyangga sosial.

Selain itu, peran Purwokerto sebagai pusat pendidikan tinggi menjadikannya laboratorium yang menarik: pusat yang menyebarkan narasi dan nilai modernisasi Orde Baru, tetapi pada saat yang sama, menghasilkan intelektual dan aktivis yang kritis terhadap praktik-praktik sentralistik rezim tersebut.

4. Aspek Memperhatikan (Warisan Kegagalan Pemerataan)

Aspek yang paling memperhatikan dan berdampak jangka panjang adalah kegagalan Orde Baru dalam menciptakan pemerataan pembangunan regional. Ketidakpuasan yang diakibatkan oleh kesenjangan spasial dan ekonomi ini terekspos secara eksplisit dalam tuntutan politik pasca-1998. Kegagalan pemerataan pembangunan secara eksplisit menjadi salah satu pemicu utama yang mendorong usulan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas. Pemekaran, dalam konteks ini, dapat

diinterpretasikan sebagai penolakan politik terhadap kegagalan model pembangunan sentralistik yang hanya menguntungkan elit kota, sementara masyarakat di wilayah lain menanggung biaya lingkungan dan sosial.

Tabel 6.6.1: Evaluasi Kritis Warisan Orde Baru di Banyumas (Biaya Eksternal)

Dimensi	Indikator Kuantitatif/Faktual	Signifikansi Kritis	Referensi
Kesenjangan Sosial	Gini Rasio 0,397 (Warisan Struktural)	Kegagalan distribusi hasil pertumbuhan, memicu konflik kaya-miskin/kota-desa.	(BPS Banyumas)
Biaya Lingkungan	Rata-rata COD 62,52 mg/L di DAS Serayu	Bukti biaya eksternal dari industrialisasi yang tidak teregulasi.	Lestari, et al. (2023)

Dimensi	Indikator Kuantitatif/Faktual	Signifikansi Kritis	Referensi
Konsekuensi Politik	Tuntutan Pemekaran Wilayah	Bukti kegagalan Orde Baru dalam menciptakan pemerataan pembangunan yang legitimatif.	
Pembangunan Spasial	Konversi Lahan 112 Ha/Tahun	Konflik antara ambisi urbanisasi dan keberlanjutan pangan lokal.	

Kesimpulan dan Sintesis Akhir

Banyumas di bawah Orde Baru bertransformasi menjadi ekonomi regional yang lebih terindustrialisasi dan

urban. Namun, model pertumbuhan yang didorong oleh negara dan modal sentralistik ini menciptakan konflik prioritas: antara Repelita yang menargetkan pertumbuhan PDRB dan kebutuhan mendasar akan otonomi fiskal serta pemerataan regional. Pembangunan infrastruktur (seperti Terminal Purwokerto) yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara ironis berkontribusi pada warisan ketidakpuasan politik dan ketidakadilan lingkungan.

Tulisan ini menyimpulkan bahwa Banyumas merupakan studi kasus ideal mengenai ambivalensi Orde Baru—sebuah rezim yang berhasil dalam modernisasi fisik dan pertumbuhan ekonomi, namun gagal total dalam aspek keadilan lingkungan, pemerataan spasial, dan legitimasi politik, di mana konsekuensi dari kegagalan ini, terutama dalam bentuk ketimpangan yang persisten dan kerusakan ekologis, masih terasa hingga hari ini. Bukti politik berupa tuntutan pemekaran wilayah adalah penolakan jangka panjang terhadap kegagalan pembangunan sentralistik yang diwariskan oleh era Orde Baru.

BAB 7

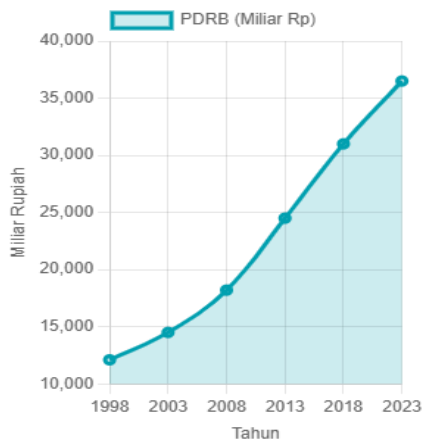
Dinamika Ekonomi Kontemporer Banyumas (Pasca-1998 - Kini): Menguak Resiliensi, Kesenjangan, dan Visi Hijau

A. Transformasi Ekonomi di Gerbang Reformasi

Dinamika ekonomi Kabupaten Banyumas sejak periode pasca-1998 merupakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana reformasi struktural dan desentralisasi fiskal³³ membentuk ulang tata kelola dan pola pertumbuhan wilayah. Krisis ekonomi Asia pada 1997/1998 menjadi katalisator, yang diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi ini secara fundamental mengalihkan kewenangan pengelolaan anggaran dan pembangunan dari pusat ke daerah, sebuah langkah yang menuntut kemandirian dan strategi pembangunan berbasis bukti di tingkat lokal (Fadilah Fitri, 2025).

³³ Desentralisasi Fiskal: Pelimpahan kewenangan pengelolaan anggaran dan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, diresmikan melalui UU No. 22 Tahun 1999.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rp)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas
(diolah)

Dalam konteks desentralisasi ini, pentingnya data statistik daerah—khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)³⁴—meningkat drastis sebagai landasan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kebutuhan akan data yang obyektif mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas untuk secara berkala menerbitkan publikasi seperti "Kabupaten Banyumas Dalam Angka" (sejak tahun 1999 dan 2000) yang menjadi fondasi bagi

³⁴ PDRB: Produk Domestik Regional Bruto, indikator makroekonomi yang mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam periode tertentu

perumusan kebijakan strategis yang tepat sasaran (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2000).

Tulisan ini bertujuan menyajikan dikotomi antara aspek yang **"Menarik"** (resiliensi ekonomi, sektor baru, dan strategi pembangunan) dan yang **"Memprihatinkan"** (kemiskinan struktural, kerentanan fiskal, dan tekanan lingkungan) dalam perjalanan ekonomi Banyumas kontemporer.

B. Metamorfosis Struktur PDRB dan Resiliensi Ekonomi

1. Kinerja Makroekonomi: Pertumbuhan yang Tangguh (Aspek Menarik)

Salah satu aspek yang paling menarik dari dinamika ekonomi Banyumas adalah daya tahan dan kinerja makroekonominya yang impresif. Dalam periode 2005 hingga 2022, Kabupaten Banyumas mencatat rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar **5,19%**. Resiliensi ini teruji ketika ekonomi global dihantam pandemi COVID-19. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, perekonomian Banyumas berhasil bangkit dengan cepat pada tahun 2021, menempatkannya di posisi ke-4 di seluruh Jawa Tengah dalam hal pemulihan ekonomi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi lokal cukup kuat

untuk menyerap guncangan eksternal (Dinas Kominfo, 2023).

2. Perubahan Struktural Jangka Panjang

Meskipun pertumbuhan secara agregat kuat, analisis PDRB menunjukkan adanya pergeseran struktural yang mendalam, yang merupakan cerminan dari modernisasi dan urbanisasi wilayah. Data PDRB atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2009 hingga 2013 menunjukkan tren de-agrarisasi dan meningkatnya dominasi sektor jasa (tersier).

**Infografis/Tabel 1: Pergeseran Struktur PDRB
Kabupaten Banyumas (2009–2013)**

Kelompok Sektor	2009 (Persen Kontribusi)	2013 (Persen Kontribusi)	Tren Utama
Sektor Primer (Pertanian & Penggalan)	22.57%	20.23%	Menurun Signifikan
Sektor Sekunder (Industri & Konstruksi)	26.16%	26.31%	Relatif Stabil
Sektor Tersier (Jasa,	51.27%	53.46%	Dominan & Meningkat

Kelompok Sektor	2009 (Persen Kontribusi)	2013 (Persen Kontribusi)	Tren Utama
Perdagangan, Transportasi, Keuangan)			

Sumber Data: BPS Kabupaten Banyumas, PDRB 2009–2013,
Atas Dasar Harga Konstan.

Dominasi Sektor Tersier (Aspek Menarik)

Sektor Tersier, yang meliputi jasa, perdagangan, hotel, dan restoran, jelas menjadi tulang punggung perekonomian Banyumas. Kontribusi sektor ini meningkat hingga mencapai **53,46%** dari total PDRB pada tahun 2013. Bahkan, subsektor jasa-jasa sendiri menyumbang **17,37%** dari PDRB pada tahun tersebut. Angka ini diperkirakan terus meningkat, didukung oleh pesatnya pertumbuhan usaha kuliner, restoran, kafe, dan pariwisata lainnya yang menjamur pasca-pandemi COVID-19. Perkembangan ini memperkuat peran Purwokerto, sebagai pusat kegiatan perkotaan, dalam menyediakan layanan regional yang vital bagi kawasan sekitarnya.

Produksi Gula Kelapa (Ton) - Komoditas Unggulan



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.
Banyumas

Penurunan Sektor Primer (Aspek Memprihatinkan)

Di sisi lain, terjadi penurunan kontribusi Sektor Primer dari **22,45%** pada tahun 2009 menjadi **20,23%** pada tahun 2013. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor struktural, yaitu **menurunnya luas lahan pertanian** dan **lambatnya kenaikan harga produk pertanian** dibandingkan produk sektor lain. Meskipun pertumbuhan ekonomi Banyumas rata-rata kuat, keterkaitan antara pertumbuhan ini dengan penurunan kemiskinan menjadi lemah. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi di sektor jasa mungkin tidak cukup inklusif untuk menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi rendah yang terancam di sektor pertanian, menciptakan *gap* antara pertumbuhan PDRB dan kesejahteraan masyarakat miskin.

C. Sektor Industri dan Pertanian: Inovasi dan Tantangan

1. Industrialisasi Strategis dan Iklim Investasi (Aspek Menarik)

Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan terstruktur melalui investasi dan industrialisasi. Kajian menunjukkan bahwa investasi (khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN) berkorelasi **positif dan signifikan** terhadap penyerapan tenaga kerja di Banyumas sepanjang periode 2000 hingga 2023. Ini menjadikan investasi sebagai kunci utama untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai langkah nyata, daerah ini telah mencadangkan lokasi industri melalui *zoning* di empat kawasan, termasuk Ajibarang, Sokaraja, Sidamulya, dan Rawaheng. Salah satu inisiatif yang paling strategis adalah pengembangan **Kawasan Industri Blok Seti Madukoro Smart-Green Industrial Cluster**³⁵ di Wangon. Konsep *Smart-Green Industrial Cluster* ini mengintegrasikan pendekatan Industry 4.0 dan keberlanjutan lingkungan. Lokasi Wangon memiliki nilai logistik yang tinggi karena

³⁵ Konsep kawasan industri yang mengintegrasikan teknologi Industry 4.0 dan aspek keberlanjutan lingkungan.

hanya berjarak **33 kilometer** dari Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, memberikan keunggulan konektivitas regional bagi industri pengolahan, *packaging*, dan *agro industri*.

Pemerintah daerah juga menyadari bahwa kebijakan insentif harus bersifat diferensial. Kajian menunjukkan bahwa insentif harus disesuaikan dengan tipologi wilayah investasi: wilayah yang sudah *maju pesat* memprioritaskan kemudahan akses pelayanan, sementara wilayah *potensial* atau *terbelakang* lebih membutuhkan **bantuan keuangan**, seperti keringanan pajak atau retribusi daerah.

2. Tantangan Inovasi Usaha Mikro (Aspek Memprihatikan)

Tantangan lain terletak pada kualitas dan standarisasi produk usaha mikro. Meskipun terdapat potensi besar dari produk lokal, seperti Makanan Berbasis Gizi (MBG) yang bertujuan menggerakkan perekonomian lokal, evaluasi menunjukkan masih banyak penyedia yang belum memiliki **sertifikasi resmi** terkait standar produksi dan distribusi pangan. Kurangnya kepatuhan terhadap praktik manufaktur yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*) menghambat potensi produk unggulan daerah ini untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

D. Perdagangan dan Jasa: Revitalisasi Pasar dan Ekonomi Kreatif

1. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Mesin Baru (Aspek Menarik)

Banyumas telah berhasil memanfaatkan aset budaya dan kreatifnya sebagai mesin pertumbuhan baru. Kabupaten Banyumas secara resmi menyangand predikat **Kabupaten/Kota Kreatif ke-73 di Indonesia**, dengan fokus utama pada **Subsektor Seni Pertunjukan**.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran kolaborasi antara akademisi, komunitas, dan pemerintah. Contohnya adalah peran perguruan tinggi lokal (IT Telkom Purwokerto) melalui inisiatif *creative hub* seperti Peken Banyumasan, yang berhasil merangkul berbagai subsektor seperti film, animasi, kuliner, dan mengangkat tarian lokal, termasuk tarian *lengger* yang telah dikenal secara internasional.

Dari sisi finansial, sektor pariwisata terbukti memberikan kontribusi yang substansial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022, kontribusi pariwisata mencapai **Rp 44,47 miliar**, yang setara dengan sekitar **6,38% dari total PAD** Kabupaten Banyumas (Rp 697.49 miliar). Kontribusi ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu pilar PDRB yang penting, di samping industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.

2. Revitalisasi Pasar Rakyat

Dalam rangka menjaga keseimbangan antara modernitas dan ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah juga fokus pada penguatan basis perdagangan tradisional. Pasar rakyat seringkali identik dengan kesan kotor, kumuh, dan semrawut. Melalui strategi pengembangan pasar, pemerintah (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) melakukan **revitalisasi pasar** dalam bentuk rehabilitasi sarana dan prasarana fisik. Selain revitalisasi fisik, upaya perlindungan pasar rakyat juga dilakukan melalui peraturan tentang **penghentian sementara pemberian izin usaha toko modern**. Kebijakan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin pemerataan pendapatan dan memberikan kesempatan bersaing bagi pedagang kecil.

Perkembangan Jumlah Pasar Tradisional vs. Ritel Modern



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Banyumas (data estimasi)

E. Kebijakan Ekonomi Lokal dan Otonomi Daerah

1. Kerentanan Fiskal di Era Otonomi Daerah (Aspek Memprihatinkan)

Otonomi daerah seharusnya diikuti dengan kemandirian fiskal.³⁶ Namun, analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya kerentanan yang signifikan. Dalam periode anggaran 2019 hingga 2023, skor Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas dinilai masih **rendah**.

Hal ini sejalan dengan hasil Rasio Ketergantungan Daerah yang **sangat tinggi** dalam 5 tahun terakhir. Ketergantungan yang tinggi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan tanpa bergantung pada dana transfer dari pusat.

³⁶ Kemandirian Fiskal: Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri, tanpa bergantung pada transfer dana dari pusat. Rasio yang tinggi pada Dana Transfer Pusat menunjukkan kemandirian yang rendah

**Tabel 2: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten
Banyumas (2019–2023)**

Indikator Kinerja	Status/Hasil Analisis (2019–2023)	Implikasi Terhadap Pembangunan Daerah
Kemandirian Keuangan Daerah	Rendah	Belum mampu membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri.
Rasio Ketergantungan Daerah	Sangat Tinggi	Pembangunan daerah sangat bergantung pada transfer pusat dan provinsi.
Optimalisasi PAD	Belum Optimal	Menghambat efektivitas otonomi daerah dan keberlanjutan fiskal.

Sumber Data: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi
Medan (Analisis Rasio Keuangan Pemda Banyumas).

F. Refleksi Ekonomi Kontemporer: Pertumbuhan, Tantangan, dan Keberlanjutan

1. Dilema Pertumbuhan Inklusif: Kemiskinan Struktural (Aspek Memprihatinkan)

Meskipun laju pertumbuhan PDRB tinggi, Banyumas menghadapi masalah kemiskinan struktural yang bandel. Kawasan Barlingmascakeb³⁷ (termasuk Banyumas) mencatat rata-rata persentase kemiskinan sekitar **16%**, angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

Analisis data menunjukkan adanya *decoupling* antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan penetapan upah minimum berpengaruh *negatif*, namun **tidak signifikan** terhadap penurunan kemiskinan. Fenomena ini terjadi karena dominasi pertumbuhan di sektor pertanian yang pengupahannya tidak menggunakan standarisasi upah minimum, mengakibatkan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja miskin ini rentan terhadap fluktuasi harga.

Faktor yang terbukti signifikan mempengaruhi kemiskinan adalah **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** dan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Ini menegaskan bahwa perbaikan kapasitas modal manusia dan penyerapan tenaga kerja di sektor formal adalah kunci untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, kemiskinan juga memiliki dimensi spasial,

³⁷ Akronim untuk kawasan yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen.

terbukti melalui studi kasus kemiskinan yang terpusat di kawasan pinggiran hutan, seperti di Kecamatan Pekuncen.

2. Konflik Pembangunan dan Daya Dukung Lingkungan (Aspek Memprihatinkan)

Dorongan pembangunan infrastruktur dan investasi memunculkan konflik kepentingan terkait daya dukung lingkungan, khususnya lahan pertanian. Analisis menunjukkan bahwa tingkat **konversi lahan pertanian** ke non-pertanian bervariasi hingga tingkat tinggi di beberapa kecamatan, seperti di Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang. Konversi ini secara langsung mengancam ketahanan pangan lokal, mengingat sektor primer sudah menunjukkan tren penurunan kontribusi PDRB.

Pembangunan infrastruktur besar, seperti Jalan Lingkar Sumpiuh (sepanjang kurang lebih 5 kilometer), memotong kawasan pertanian dan memicu **perubahan nilai tanah yang cukup signifikan**. Peningkatan nilai tanah yang mencolok di sepanjang jalan lingkar mendorong konversi lahan pertanian menjadi rumah dan toko baru. Siklus ini menciptakan tekanan ganda: percepatan erosi sektor pertanian yang rentan, sekaligus penguatan pertumbuhan non-inklusif.

BAB 8

Perkembangan Sosial Kontemporer Kabupaten Banyumas: Paradox IPM Tinggi dan Jurang Kesenjangan Struktural

Tulisan ini menganalisis secara mendalam perkembangan sosial kontemporer di Kabupaten Banyumas (2020–2024) melalui delapan dimensi kritis, menggunakan kerangka pembangunan sosial inklusif. Temuan kuantitatif menunjukkan bahwa Banyumas berhasil mempertahankan keunggulan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)³⁸ dengan nilai 74.52 dan Umur Harapan Hidup (UHH) 74.70 tahun, menjadikannya tertinggi di wilayah Barlingmascakeb. Aspek positif lainnya mencakup capaian angka partisipasi pendidikan dasar yang mendekati universal (99.96%), resiliensi kultural melalui adaptasi seni tradisi, dan peran

³⁸ Indikator agregat yang mengukur keberhasilan suatu daerah dalam tiga dimensi dasar: kesehatan (Umur Harapan Hidup), pengetahuan (Rata-rata Lama Sekolah), dan standar hidup layak (daya beli).

aktif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan berbasis potensi lokal.

Namun, analisis menunjukkan bahwa pembangunan sosial dibayangi oleh tantangan struktural yang mengkhawatirkan. Kesenjangan spasial yang akut, di mana Purwokerto berfungsi sebagai kutub pertumbuhan (*growth pole*)³⁹ yang mempolarisasi, berpotensi memicu ketimpangan pendapatan ekstrem; studi terdahulu bahkan menunjukkan Koefisien Gini mencapai 0.603. Selain itu, terdapat fenomena *leaky pipeline* pada pendidikan, di mana 13.426 anak tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) akibat faktor ekonomi, serta ancaman erosi modal sosial (*solidaritas gotong royong*) di pedesaan akibat sifat ketergantungan pada bantuan pasca-krisis. Rekomendasi kebijakan mendesak diarahkan pada pemerataan spasial yang *pro-poor*, penguatan sektor pertanian dan informal, serta rehabilitasi modal sosial melalui program pemberdayaan berbasis partisipasi.

³⁹ Pusat pertumbuhan regional, dalam kasus ini Purwokerto, yang menarik investasi dan SDM, tetapi seringkali menyebabkan polarisasi atau ketimpangan spasial dengan wilayah pinggiran.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang dan Konteks Pembangunan Banyumas

Kabupaten Banyumas menempati posisi strategis sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan bagi wilayah regional Barlingmasakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen). Dinamika sosial kontemporer di Banyumas, khususnya yang berpusat di Purwokerto, mencerminkan persinggungan intens antara akar tradisi budaya Jawa-Banyumasan yang kental dengan gelombang modernisasi, urbanisasi, dan tantangan ekonomi global. Evaluasi terhadap kondisi sosial saat ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan terpusat tersebut telah diterjemahkan menjadi pembangunan sosial yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Analisis ini menggunakan kerangka *pembangunan manusia* sebagai tolok ukur utama, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai indikator agregat keberhasilan. Namun, kerangka ini diperdalam dengan analisis struktural terhadap dua dimensi kritis: *ketimpangan* dan *kohesi sosial*. Dimensi Kesenjangan dievaluasi melalui Koefisien Gini dan polarisasi spasial

urban-rural , sementara perubahan Solidaritas Sosial dianalisis melalui lensa sosiologi, yang mengamati pergeseran dari solidaritas mekanik (berbasis kemiripan, seperti *gotong royong*) menuju pola yang lebih individualistis sebagai respons terhadap tekanan eksternal seperti krisis ekonomi dan pandemi.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan laporan ini adalah menganalisis kondisi sosial kontemporer di Kabupaten Banyumas, mencakup delapan fokus tematik: Pendidikan, Kesehatan, Demografi, Urbanisasi, Kemiskinan, Solidaritas Sosial, Kebudayaan Baru, dan Peran Komunitas. Data yang digunakan bersumber dari publikasi resmi BPS Kabupaten Banyumas (termasuk *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2024*), laporan pemerintah daerah, dan jurnal akademik terkemuka yang relevan.

Potret Sosial Kontemporer di Tengah Arus Perubahan dan Modernisasi

Investasi Masa Depan: Peningkatan Kualitas Hidup



Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2024 (Data diolah)

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Banyumas tercermin dari kemajuan signifikan di sektor pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menanjak menjadi bukti nyata bahwa investasi pada modal manusia menjadi prioritas. Peningkatan ini didorong oleh naiknya Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang menandakan akses dan kualitas layanan dasar yang semakin membaik (BPS Kabupaten Banyumas, 2024).

B. Profil Pembangunan Manusia: Kesehatan dan Pendidikan

1. Keunggulan IPM Regional

Pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat

setiap tahunnya. Dengan capaian IPM terbaru sebesar 74.52, Banyumas berhasil menempatkan diri pada level "Tinggi" dan merupakan yang tertinggi di antara kabupaten penyusun Barlingmascakeb. Capaian tertinggi ini melebihi kabupaten tetangga dengan selisih mencapai 4.90 poin, yang mengindikasikan keunggulan komparatif Banyumas dalam agregat dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak (Prasetyo, A. D., Supardi, M., & Haryanto, T., 2024).

Namun, keunggulan IPM yang diukur secara rata-rata ini berpotensi menutupi adanya kesenjangan internal yang ekstrem. Temuan akademis yang menunjukkan Koefisien Gini Banyumas mencapai 0.603 menyiratkan bahwa IPM yang tinggi kemungkinan besar didorong oleh capaian luar biasa dari segmen populasi urban yang memiliki akses ke layanan premium di Purwokerto. Oleh karena itu, IPM di Banyumas dapat dianggap sebagai *rata-rata yang menyembunyikan ketimpangan ekstrem* di dalamnya, menandakan bahwa keberhasilan pembangunan belum tentu bersifat inklusif di seluruh wilayah geografis dan sosial (Pramono Hariadi, Arintoko, & Bawono, I. R, 2009).

2. Dinamika Sektor Pendidikan: Antara Akses Universal dan Tantangan ATS

a. Akses Pendidikan Dasar yang Superior

Sektor pendidikan dasar di Banyumas memperlihatkan kinerja yang sangat menarik. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di jenjang Sekolah Dasar (SD) telah mencapai angka yang mendekati universal, yakni 99.96% pada tahun 2022. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Jawa Tengah, menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam memastikan akses pendidikan dini dan tingginya ketahanan sosial keluarga dalam memprioritaskan sekolah pada usia wajib belajar dasar (Prastyanti, S., & Nunn, A, 2023).

b. Isu Kritis: Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS)

Meskipun akses dasar hampir sempurna, data menunjukkan adanya *leaky pipeline* pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sebanyak 13.426 anak di Banyumas tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Dinas Pendidikan mengakui bahwa penyebab ATS bersifat multifaktorial, meliputi faktor ekonomi yang dominan, kendala geografis, masalah keluarga, hingga rendahnya motivasi belajar.

Kontradiksi antara APS SD yang hampir 100% dengan tingginya jumlah ATS mengindikasikan bahwa kebocoran pipa pendidikan terjadi secara masif pada fase transisi ke jenjang SMP dan SMA/SMK. Pada titik ini, analisis menunjukkan bahwa *biaya kesempatan* sekolah

(opportunity cost, yaitu kehilangan potensi pendapatan anak yang bekerja) mulai dirasakan melebihi manfaat yang diterima oleh keluarga miskin dan rentan. Menanggapi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah meluncurkan Program SIPATAS (Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah) untuk mengintervensi langsung berdasarkan data nama dan alamat. Keberhasilan SIPATAS sangat bergantung pada sejauh mana program ini mampu mengatasi akar masalah ekonomi keluarga secara sinergis (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2025).

3. Kualitas dan Kesenjangan Akses Kesehatan Publik

a. Kapasitas Kesehatan Agregat

Dimensi kesehatan, yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, mencapai 74.70 tahun, berkontribusi signifikan terhadap IPM yang tinggi. Kapasitas infrastruktur kesehatan di Banyumas cukup memadai, didukung oleh ketersediaan 25 rumah sakit (milik pemerintah, TNI, dan swasta) yang memperkuat jejaring rujukan. Selain itu, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, seperti dokter umum (7) dan dokter spesialis (10) pada tahun 2021, menempatkan Banyumas pada posisi yang lebih baik dibandingkan kabupaten tetangga.

2. Tantangan Distribusi Spasial dan Kualitas Pelayanan Primer

Meskipun kapasitas agregat tinggi, pemerintah daerah mengakui adanya "ketimpangan-ketimpangan" layanan kesehatan di daerah-daerah tertentu yang memerlukan sinergi program agar tidak berjalan secara parsial. Analisis ini memperkuat hipotesis konsentrasi pembangunan di Purwokerto. Kualitas pelayanan di Puskesmas, yang umumnya baik dan berkorelasi signifikan dengan kepuasan pasien di wilayah perkotaan (seperti Purwokerto Selatan) dan sub-urban (Baturaden II), tidak serta merta mencerminkan kondisi di seluruh kabupaten.

Masalah utama terletak pada *aksesibilitas* (geografis dan biaya) pelayanan primer di wilayah pinggiran atau pedesaan. Untuk mencapai pemerataan pembangunan kesehatan, kebijakan harus fokus pada penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan perbaikan infrastruktur dasar penunjang, bukan hanya menambah jumlah fasilitas di pusat kota.

C. Struktur Demografi, Urbanisasi, dan Kesenjangan Ekonomi

1. Analisis Demografi dan Tantangan Ketenagakerjaan

Banyumas menargetkan percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai fokus utama pada

tahun 2025. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan daerah yang menekankan penciptaan iklim investasi berorientasi perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal. Tantangan pengangguran disikapi melalui upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, termasuk melalui kemitraan strategis dengan institusi pendidikan (misalnya Universitas Terbuka Purwokerto) dan Forum Human Resource Development (F-HRD). Upaya ini penting untuk memastikan tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang memadai dan mampu mengisi ribuan lowongan pekerjaan yang tersedia (seperti 5.580 lowongan yang ditawarkan dalam Banyumas Job Fair 2025).

2. Urbanisasi Purwokerto: Polarisasi dan Ketimpangan Spasial

a. Pertumbuhan Terpusat (*Growth Pole*)

Purwokerto mengalami percepatan urbanisasi yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Modernisasi infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jalur kereta api *double track*, telah memperkuat fungsinya sebagai pusat ekonomi Barlingmascakeb. Sektor jasa, perdagangan, dan transportasi menunjukkan dominasinya, menyumbang 38.5% terhadap PDRB Banyumas pada tahun 2022. Pertumbuhan yang terpusat ini juga terlihat dari

peningkatan kebutuhan akan jasa pembangunan dan investasi properti di Purwokerto.

b. Dampak Ketimpangan Spasial

Analisis spasial menunjukkan konsentrasi pembangunan yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang *ketimpangan spasial* antara Purwokerto pusat dan distrik pinggiran. Konsentrasi infrastruktur dan layanan di pusat kota membatasi akses warga pinggiran.

Fenomena ini diperparah oleh pola migrasi penduduk. Individu, terutama usia muda dan belum menikah, didorong oleh motivasi pendidikan dan kesempatan kerja, cenderung bermigrasi secara sirkular (berulang dalam 1-6 bulan) menuju Banyumas/Purwokerto. Pertumbuhan Purwokerto yang terpusat bertindak sebagai magnet, menarik SDM dari wilayah perbatasan (misalnya Kecamatan Karangpucung), namun karena kendala struktural (seperti kesulitan Pemkab dalam mengalokasikan lahan non-LP2B⁴⁰ untuk kawasan industri besar) , pertumbuhan tetap didominasi sektor jasa. Pola migrasi sirkular ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja yang ditawarkan seringkali bersifat informal atau temporer, yang

⁴⁰ LP2B: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan pertanian yang dilindungi oleh undang-undang untuk mencegah konversi menjadi non-pertanian. Kebijakan KPTI perlu berhati-hati agar tidak melanggar batasan LP2B.

pada akhirnya menguras potensi ekonomi di pedesaan tanpa memberikan stabilitas pekerjaan jangka panjang.

3. Kemiskinan dan Kesenjangan Struktural Pendapatan

a. Intervensi Kemiskinan

Meskipun penduduk miskin pada tahun 2022 mencapai 12.84% (atau sekitar 220.000 jiwa) , Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berhasil mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem di 60 desa. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)⁴¹ menunjukkan efektivitasnya, yang dibuktikan dengan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhasil *graduasi* (mandiri) di Kecamatan Sumbang.

b. Ancaman Ketimpangan Pendapatan

Isu paling mengkhawatirkan adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang bersifat struktural. Penelitian akademis terdahulu mencatat Koefisien Gini di Banyumas

⁴¹ PKH dan P2K2: Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah sesi pelatihan untuk penerima PKH agar lebih mandiri dan mampu graduasi (keluar dari program karena sudah mandiri).

mencapai 0.603. Koefisien di atas 0.50 menandakan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi atau ekstrem.

Kesenjangan pendapatan yang akut ini diyakini disebabkan oleh ketidakseimbangan pembangunan antara sektor modern (jasa, perdagangan, manufaktur) yang terkonsentrasi di Purwokerto, dengan sektor tradisional (pertanian dan sektor informal) di wilayah pedesaan. Jika tren polarisasi ini berlanjut, pertumbuhan ekonomi Banyumas berisiko tidak inklusif, sehingga kebijakan *pro-poor* yang secara eksplisit menargetkan dan memperkuat ekonomi pedesaan, pertanian, dan industri kecil menengah menjadi sangat mendesak.

D. Transformasi Sosial Kultural dan Peran Komunitas

1. Pergeseran Pola Solidaritas Sosial

a. Erosi Gotong Royong

Analisis kualitatif terhadap masyarakat pedesaan di Banyumas menunjukkan pergeseran signifikan dalam pola solidaritas. Solidaritas masyarakat yang sebelumnya menjunjung tinggi nilai tradisional *gotong royong* dan tolong-menolong kini mulai memudar, beralih menjadi kecenderungan yang lebih individualistik.

b. Faktor Ketergantungan (*Dependency Factor*)

Penyebab utama degradasi modal sosial ini adalah munculnya *sifat ketergantungan* masyarakat terhadap bantuan material yang disalurkan secara masif oleh pemerintah daerah, khususnya selama penanganan pandemi COVID-19. Bantuan makanan, masker, dan obat-obatan, meskipun esensial, secara tidak sengaja mengurangi motivasi dan kebutuhan masyarakat untuk melakukan *gotong royong* secara mandiri demi pemenuhan kebutuhan dasar. Pola solidaritas yang didasarkan pada rasa senasib sepenanggungan mulai terdekapitalisasi oleh intervensi *top-down* yang fokus pada transfer material. Ini merupakan tantangan serius, karena hilangnya modal sosial tradisional ini dapat mengurangi resiliensi masyarakat dalam menghadapi krisis di masa mendatang.

2. Resiliensi Kultural

a. Transformasi Kesenian Lengger dan Ebeg

Kesenian tradisi Banyumas, khususnya Lengger dan Ebeg, menunjukkan resiliensi kultural yang kuat melalui mekanisme adaptasi. Awalnya, Lengger merupakan seni ritual yang erat kaitannya dengan upacara syukuran pasca panen dan sering melibatkan fenomena *Indhang* (kerasukan/trance).

b. Kompromi Otentisitas

Dalam konteks kontemporer, fungsi Lengger telah bergeser menjadi seni pertunjukan yang lebih komersial, ditampilkan dalam berbagai acara sosial seperti pernikahan dan khitanan. Transformasi ini juga mencakup standarisasi gerak, penghalusan unsur erotis, dan perubahan gender penari (dari laki-laki ke perempuan). Upaya inovasi dan pengembangan juga terlihat pada kesenian Ebeg, yang sukses beradaptasi bahkan di komunitas diaspora Jawa di luar Banyumas. Adaptasi ini, yang didorong oleh faktor ekonomi, persaingan pasar, dan pariwisata, menunjukkan kemampuan kebudayaan Banyumas untuk bertahan secara dinamis. Namun, komersialisasi dan standarisasi ini juga membawa risiko mengorbankan otentisitas ritualistik dan kedalaman sakral dari tradisi tersebut.

3. Peran Komunitas sebagai Jembatan

Organisasi masyarakat sipil, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memainkan peran krusial sebagai agen pemberdayaan dan mediasi. Studi kasus peran LSM Kompleet di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, menunjukkan fungsi mereka sebagai *jembatan* antara masyarakat, pemerintah desa, dan Perhutani dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal. Mereka aktif

mengadakan diskusi dan advokasi untuk memastikan kepentingan masyarakat terwakili.

Selain itu, komunitas lokal menunjukkan inisiatif yang menarik dalam pengembangan potensi daerah. Potensi sumber daya alam (sawah, perkebunan) dan lokawisata di desa mulai dioptimalisasi menjadi produk ekonomi, seperti inovasi Mie Sari Bengkuang di Desa Linggasari. Pemanfaatan media sosial juga menjadi sarana untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi lokal ini.

Peran mediasi dan inisiatif LSM serta komunitas ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya *substitusi fungsional* terhadap solidaritas mekanik tradisional yang memudar. Organisasi formal memberikan struktur yang diperlukan untuk kolaborasi di tengah masyarakat yang semakin individualis. Namun, tantangan yang dihadapi LSM, seperti kurangnya partisipasi masyarakat yang optimal dan keterbatasan tenaga penggerak, perlu diatasi agar peran mereka dapat diinstitusionalisasi secara lebih efektif.

E. Tren Menarik dan Isu Mendesak Kontemporer

1. Tren Positif Utama (*The Interesting*)

Tren positif menunjukkan bahwa Banyumas memiliki fondasi pembangunan manusia yang kuat dan dinamis. Keunggulan regional dalam IPM dan komitmen terhadap pendidikan dasar (APS SD 99.96%) adalah capaian

signifikan. Resiliensi kultural yang ditunjukkan melalui adaptasi seni tradisi ke pasar modern dan munculnya inisiatif komunitas berbasis potensi lokal menunjukkan modalitas inovasi yang tinggi.

2. Isu Kesenjangan dan Tantangan Struktural (*The Concerning*)

Isu yang paling mendesak adalah kesenjangan struktural. Polarisasi pembangunan yang ekstrem di Purwokerto memicu ketimpangan pendapatan yang mengkhawatirkan (Gini 0.603). Kesenjangan ini menciptakan *paradoks ATS* dan memunculkan masalah ketenagakerjaan yang rentan akibat migrasi sirkular. Selain itu, erosi modal sosial, yang disebabkan oleh efek samping kebijakan bantuan sosial pasca-krisis , mengancam keberlanjutan resiliensi masyarakat pedesaan.

Tabel 3. Data Kunci Kesenjangan Sosial dan Tantangan Struktural Banyumas

Dimensi Kesenjangan	Indikator Kunci	Nilai / Karakteristik	Implikasi Kritis	Sumber Data
Kesenjangan Ekonomi	Koefisien Gini	0.603 (Estimasi Studi Terdahulu)	Ketimpangan ekstrem, didorong disparitas sektor modern vs. pertanian/informal.	Jurnal Akademik Pramono Hariadi, Arintoko, & Bawono, I. R. (2009).
Pendidikan	Anak Tidak Sekolah (ATS)	13.426 Anak	Kegagalan sistemik pada transisi jenjang menengah akibat faktor ekonomi.	Pemkab Banyumas
Urbanisasi	Ketimpangan Spasial	Konsentrasi di	Ketimpangan akses infrastruktur	Jurnal Akademik

Dimensi Kesenjangan	Indikator Kunci	Nilai / Karakteristik	Implikasi Kritis	Sumber Data
		Purwokerto pusat	dan layanan di wilayah pinggiran.	Fitria Azil Fadiha et al (2025)
Solidaritas Sosial	Pola Solidaritas Pedesaan	Bergeser menjadi Individualis	Erosi <i>gotong royong</i> akibat ketergantungan bantuan pasca-krisis.	Jurnal Firmansyah, M. A., Masrukin, & Pandu P., A. (2022).

F. Rekomendasi Kebijakan

1. Strategi Pemerataan Spasial yang Pro-Poor

a. Redistribusi Infrastruktur

Kebijakan pembangunan harus bergeser dari fokus Purwokerto menjadi strategi pemerataan yang masif. Investasi infrastruktur harus diarahkan ke wilayah pinggiran dan perbatasan (seperti Karangpucung) untuk

meningkatkan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja.

b. Penciptaan KPTI dan Penguatan Sektor Primer

Pemerintah daerah perlu lebih berani dalam mengatasi kendala lahan LP2B dengan menetapkan Kawasan Peruntukan Industri (KPTI) di lokasi yang kurang subur dan strategis. Hal ini harus didampingi oleh kebijakan *pro-poor* yang fokus pada peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan UMKM untuk mengurangi disparitas pendapatan struktural.

2. Resolusi Struktural ATS dan Ketenagakerjaan

a. Intervensi Ekonomi Terpadu untuk ATS

Program SIPATAS harus disinergikan secara fungsional dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Dukungan bantuan bersyarat finansial harus diberikan kepada keluarga yang memiliki ATS di jenjang menengah (SMP/SMA) untuk menghilangkan biaya kesempatan yang menjadi penyebab utama putus sekolah.

b. Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Mendorong investasi yang menghasilkan lapangan kerja formal dan stabil di luar sektor jasa Purwokerto untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap migrasi sirkular yang tidak terjamin.

3. Rehabilitasi Modal Sosial dan Penguatan Komunitas

a. Desain Ulang Bantuan Berbasis Partisipasi

Untuk mengatasi degradasi modal sosial, program bantuan sosial di masa depan harus dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, identifikasi, dan distribusi. Hal ini dapat merehabilitasi semangat *gotong royong* yang memudar dengan mengubah penerima bantuan menjadi subjek aktif dalam pemberdayaan.

b. Dukungan Institusional untuk LSM

Menguatkan kapasitas dan legitimasi LSM yang terbukti berperan sebagai mediator dan fasilitator pemberdayaan (misalnya, melalui pendanaan operasional). Peran ini penting untuk mengisi kekosongan struktural yang ditinggalkan oleh erosi solidaritas mekanik tradisional.

G. Kesimpulan

Kabupaten Banyumas telah mencapai keberhasilan signifikan dalam pembangunan manusia secara agregat, ditunjukkan oleh IPM yang tinggi dan akses pendidikan dasar yang hampir universal. Namun, kemajuan ini terancam oleh konflik struktural internal yang serius: ketimpangan spasial yang akut, ketimpangan pendapatan ekstrem, dan ancaman erosi modal sosial di pedesaan. IPM Banyumas yang tinggi hanyalah puncak gunung es yang

menutupi polarisasi yang mendalam antara Purwokerto yang modern dan wilayah pinggiran yang rentan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, Banyumas harus segera menggeser strategi dari pertumbuhan terpusat menjadi strategi inklusif yang memprioritaskan keadilan spasial, penguatan sektor tradisional, dan rehabilitasi kembali fondasi solidaritas komunal.

BAB 9

Budaya Banyumas Di Era Modern: Negosiasi Identitas, Komodifikasi Seni, dan Resiliensi Kultural

I. Pendahuluan

A. Konteks Historis dan Filosofis Kebudayaan Banyumas

Kebudayaan Banyumas, yang berakar pada sejarah panjang dan pergulatan pemikiran lokal, memasuki era modern dengan membawa sistem nilai yang khas dan paradoksal. Inti dari sistem nilai ini adalah sintesis yang terwujud dalam perilaku *cablaka*⁴², yaitu keterusterangan yang jujur dan tanpa tedeng aling-aling. Perilaku ini merupakan hasil dari pergulatan historis yang terangkum dalam narasi *Babad Pasir* (cenderung menampilkan konflik internal) dan *Babad Banyumas*⁴³ (ditandai dengan asketisme).

⁴² Istilah ini sering diterjemahkan sebagai 'terus terang' namun memiliki konotasi filosofis yang lebih dalam, mencakup kesetaraan (egalitarianisme) dan penolakan terhadap kepalsuan atau kemunafikan sosial, yang merupakan cerminan dari latar belakang sejarah Banyumas yang independen dari pusat kekuasaan Mataram (Solo/Yogya).

⁴³ Babad Pasir cenderung mencerminkan periode konflik internal yang membentuk karakter 'keras' atau *cablaka*, sementara Babad

Sifat paradoksal ini menjadi mekanisme resiliensi kultural bawaan yang penting. Masyarakat Banyumas tidak hanya terpaku pada tradisi (masa lalu) tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadikan masa depan sebagai referensi strategis dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan. **Negosiasi identitas ini—mempertahankan akar filosofis kuno sambil secara strategis merangkul masa depan—adalah aspek yang paling menarik dari kegigihan budaya Banyumas dalam menghadapi homogenisasi global.** Kemampuan untuk menyeimbangkan orientasi ganda ini—tradisi dan inovasi—melalui nilai *cablaka* adalah modal kultural utama Banyumas dalam melakukan negosiasi identitas di tengah kuatnya arus globalisasi.

B. Definisi Era Modernitas dan Globalisasi dalam Konteks Lokal

Era modernitas dan globalisasi di Banyumas didefinisikan oleh perubahan signifikan yang dibawa oleh budaya luar, terutama dalam gaya hidup, makanan, dan mode (Mubah, 2011; Suryanti, 2007; Widiyono, 2019).

Banyumas lebih menyoroti nilai-nilai asketisme dan spiritualitas. Sintesis dari dua narasi inilah yang membentuk resiliensi budaya Banyumas.

Ancaman utama modernitas terletak pada kecenderungan masyarakat untuk memilih budaya baru yang dianggap "lebih sederhana dan praktis" dibandingkan budaya lokal yang sering kali dianggap kompleks (Mubah, 2011; Suryanti, 2007; Widiyono, 2019).

Tantangan kunci di era ini adalah menghadapi homogenisasi global dan apa yang disebut sebagai perang nilai budaya (Mubah, 2011; Suryanti, 2007; Widiyono, 2019). Budaya lokal Banyumas menghadapi tekanan fungsional; agar dapat bertahan, ia harus mengalami rekayasa fungsional. Ini berarti budaya harus membuktikan relevansinya secara praktis, misalnya dengan bertransformasi menjadi komoditas pariwisata atau infrastruktur lunak⁴⁴ yang vital, sehingga mampu bersaing dengan tawaran budaya global yang serba "sederhana dan praktis" (Mubah, 2011; Suryanti, 2007; Widiyono, 2019).

C. Struktur dan Batasan Pembahasan Bab

Bab ini akan menganalisis dinamika budaya Banyumas di era modern melalui tiga domain utama: (1)

⁴⁴ Budaya sebagai Infrastruktur Lunak: Konsep ini merujuk pada gagasan bahwa nilai-nilai, identitas, dan kreativitas masyarakat adalah komponen non-fisik yang sama pentingnya dengan infrastruktur fisik (jalan, bangunan). Budaya yang kuat akan menjadi modal dasar untuk menarik investasi, pariwisata, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

transformasi nilai sosial, termasuk manifestasi egalitarianisme dalam bahasa dan interaksi; (2) komodifikasi dan krisis seni pertunjukan tradisional, dengan fokus pada Lenggèr dan Calung; serta (3) peran kelembagaan, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur ekonomi kreatif dalam menjaga keberlanjutan budaya.

II. Pergeseran Nilai Sosial dan Sistem Kultural Banyumas

A. Paradoks Nilai dan Orientasi Ganda: Masa Lalu dan Masa Depan

Karakteristik inti masyarakat Banyumas yang adaptif adalah kemampuan mereka untuk menavigasi kontradiksi tanpa harus sepenuhnya menolak salah satunya. Perilaku *cablaka* berfungsi sebagai penyeimbang yang memungkinkan masyarakat Banyumas mempertahankan kolektivitas tradisional sambil memandang ke depan, menyerap modernitas tanpa kehilangan identitas fundamental.

Orientasi ganda ini menempatkan masyarakat Banyumas pada posisi yang unik. Mereka tidak hanya melestarikan tradisi tetapi juga secara aktif menggunakan referensi masa depan untuk menentukan perilaku saat ini (Orientasi nilai budaya, n.d.). Kemampuan ini adalah kunci

utama yang menjelaskan mengapa, di tengah konflik nilai yang diakibatkan oleh globalisasi, masyarakat Banyumas mampu melakukan justifikasi terhadap nilai-nilai yang masuk dan menyintesisnya ke dalam perilaku yang tetap relevan.

B. Manifestasi Egalitarianisme (*Cablaka*) di Tengah Individualisme Modern

Nilai *cablaka* (keteranganan) secara intrinsik berkaitan dengan egalitarianisme, menolak hierarki sosial yang kaku. Sikap egaliter ini terwujud dalam perilaku sosial yang mendukung kemajuan modern. Sebagai contoh, di Desa Gununglurah, perilaku investasi orang tua terhadap anak dalam bentuk pendidikan relatif tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan (Wibowo & Mulyani, 2022).

Fenomena ini sangat signifikan di era modern di mana pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci ekonomi. **Hal yang menarik di sini adalah bagaimana nilai tradisional Banyumas yang egaliterian justru menjadi modal kultural yang mempercepat kesuksesan ekonomi modern** (Wibowo & Mulyani, 2022). Dengan mempertahankan egalitarianisme gender dalam alokasi sumber daya pendidikan, Banyumas secara kultural menjamin basis SDM yang lebih luas dan merata, berpotensi

memberikan daya saing yang lebih baik dibandingkan wilayah yang masih terikat oleh struktur patriarki yang kaku (Wibowo & Mulyani, 2022). Egalitarianisme ini, yang dihubungkan dengan sifat *cablaka*, bertindak sebagai modal budaya yang secara langsung mendukung sukses ekonomi dan sosial di era modern (Wibowo & Mulyani, 2022).

C. Transformasi Pola Komunikasi dan Interaksi Sosial

Meskipun globalisasi membawa tekanan individualistik dan mempengaruhi pilihan gaya hidup (Mubah, 2011; Suryanti, 2007; Widiyono, 2019), yang berpotensi mengikis kohesi sosial, resistensi terhadap individualisme total masih terlihat kuat. Di wilayah pedesaan Banyumas, kolektivitas masyarakat tetap dipertahankan, terutama tercermin dalam nilai anak (*value of children*). Ketergantungan keluarga terhadap keturunan dalam menjalani siklus kehidupan menunjukkan bahwa struktur kolektif masyarakat masih kokoh (Wibowo & Mulyani, 2022).

Perubahan pola komunikasi juga terjadi seiring masuknya teknologi, namun hal ini direspons dengan adaptasi pada tatanan nilai. Walaupun gaya hidup global dianggap praktis, nilai-nilai inti yang menekankan pentingnya komunitas dan keluarga tetap menjadi

penyeimbang, mencegah disolusi total kolektivitas di tengah derasnya arus modernitas.

III. Dinamika Seni Pertunjukan Tradisional: Krisis, Inovasi, dan Komodifikasi

A. Kesenian Lengger-Calung-Ebeg di Ambang Keterancaman

Seni pertunjukan tradisional Banyumas, khususnya Lengger Calung dan Ebeg, menghadapi ancaman yang signifikan di tengah modernisasi. Meskipun merupakan warisan budaya penting, kesenian ini berpotensi punah di beberapa daerah (misalnya kasus di Dusun Trans Cilacap, Lampung Selatan, yang merepresentasikan ancaman umum di luar pusat budaya utama).

Faktor-faktor yang menyebabkan keterancaman ini bersifat internal dan eksternal. Secara internal, minimnya minat generasi muda menyebabkan lemahnya regenerasi, ditambah lagi dengan mati surinya sanggar seni selama hampir dua dekade (Upaya mempertahankan kesenian Lengger, n.d.). Kurangnya pewarisan nilai budaya secara langsung dari orang tua atau pelaku seni kepada generasi penerus juga menjadi masalah structural.

Secara eksternal, perkembangan teknologi memainkan peran besar, menggeser minat generasi muda

ke hiburan modern seperti media sosial dan musik digital (digital displacement). Selain itu, minimnya dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah dan lembaga terkait semakin memperparah kondisi pelestarian. Kegagalan regenerasi yang disebabkan oleh pewarisan informal yang tidak efektif ini menegaskan perlunya institusionalisasi budaya melalui mekanisme formal seperti pendidikan dan kebijakan pemerintah.

B. Transisi Kultural: Dari Sakral ke Profan, Erotis ke Estetik

Menghadapi krisis keberlangsungan, seni Lenggèr Banyumasan telah menjalani transformasi substansial. Secara filosofis, fokus pertunjukan bergeser dari yang bersifat **sakral menjadi profan**. Pergeseran yang paling menonjol secara estetika adalah transisi dari elemen yang dianggap **erotis menjadi seni yang lebih estetik**.⁴⁵

Poin paling menarik dari babak ini adalah negosiasi kultural strategis: tradisi diselamatkan bukan dengan isolasi, melainkan dengan rekayasa fungsional

⁴⁵ Pada fungsi aslinya, Lenggèr sering dikaitkan dengan ritus kesuburan (ritus komunal) di mana aspek erotisnya berfungsi sebagai simbol kehidupan dan kesuburan, bukan semata-mata hiburan. Pergeseran ke 'estetik' adalah upaya penyesuaian untuk mendapatkan penerimaan formal dan menghindari stigma moral di masyarakat modern.

untuk memenuhi permintaan estetika dan komersial modern, demi kelangsungan hidupnya (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013).

Perubahan fungsi ini merupakan upaya adaptif untuk mendapatkan legitimasi yang lebih luas. Seni yang awalnya hanya dipertunjukkan di kalangan rakyat biasa kini dapat tampil dalam ranah pemerintahan, menandakan penerimaan institusional yang lebih tinggi. Namun, transisi ini menuntut penyesuaian signifikan terhadap bentuk asli seni.

Meskipun terjadi penyesuaian estetika, elemen ritualistik tertentu tetap dipertahankan karena nilai dramatisnya. Misalnya, babak puncak pertunjukan pada tengah malam yang menampilkan penari melakukan *ndadi* (*trance/kesurupan*)⁴⁶ dengan atraksi memakan kaca, bara api, atau kelapa muda yang dikupas dengan gigi, masih menjadi daya tarik utama yang dicari penonton (Koderi, 1991; Susanto, 1987; Tohari, 1982). Hal ini menunjukkan adanya **komodifikasi elemen ritualistik yang dramatis** untuk menjaga daya tarik pasar, meskipun bentuk

⁴⁶ Praktik *ndadi* (*trance*) adalah elemen ritualistik yang sangat mendalam dan berpotensi berbahaya. Dalam konteks pertunjukan modern, meskipun ritualnya dipertahankan, penampilannya telah mengalami komodifikasi dramatis agar menjadi tontonan yang menarik, menunjukkan ketegangan antara nilai ritual asli dan tuntutan pasar.

keseluruhan seni telah disesuaikan agar lebih estetik dan diterima secara formal.

C. Strategi Inovasi dan Akulturasi sebagai Aset Pariwisata

Strategi paling efektif untuk mempertahankan seni tradisional di era modern adalah melalui inovasi dan komodifikasi yang terencana. Kesenian *Calengsai* (akronim dari Calung, Lengger, dan Barongsai) adalah contoh nyata dari inovasi ini (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013). *Calengsai* merupakan hasil akulturasi antara budaya Banyumas dan Tionghoa, yang dikemas menjadi produk berorientasi pasar dengan nilai jual tinggi (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013).

Untuk menjadi komoditas pariwisata yang sukses, *Calengsai* terus melakukan inovasi dan kreasi baru, termasuk penyesuaian kostum, aksesoris, alat pengiring, dan lagu agar sesuai dengan selera pasar di era globalisasi (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013). Upaya negosiasi budaya ini penting untuk memastikan kesenian tradisional tetap bertahan.

Kesenian seperti *Calengsai* tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai **komoditas bernilai jual** yang dapat dijadikan daya tarik wisata utama dan ikon

identitas masyarakat Banyumas (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013). Jika dikelola dengan tepat, komodifikasi ini berpotensi besar menjadi pendorong perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013).

**Model Transformasi Seni Pertunjukan Kunci Banyumas
di Era Modern**

Aspek Kesenian	Era Pra-Modern (Fungsi Asal)	Era Modern (Fungsi Baru/Transformasi)	Signifikansi Transformasi
Fungsi Utama	Sakral, Ritus Kesuburan, Ekspresi Rakyat (Koderi, 1991; Susanto, 1987; Tohari, 1982)	Profan, Estetik, Komoditas Pariwisata, Ikon Daerah (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013)	Mengamankan keberlanjutan melalui legitimasi ekonomi dan institusional.

Aspek Kesenian	Era Pra-Modern (Fungsi Asal)	Era Modern (Fungsi Baru/Transformasi)	Signifikansi Transformasi
Lokasi Transformasi Nilai	Erotis (Implisit)	Estetik, Kontrol Sesuai Selera Pasar dan Tuntutan Pemerintah (Transformasi seni pertunjukan Lengger, n.d.; Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013)	Memperluas daya terima (acceptable) di audiens yang lebih luas dan formal.
Tantangan Utama	Persaingan (Implisit)	Krisis Regenerasi, Disrupsi Media Digital	Menuntut respons kelembagaan (pendidikan formal dan kebijakan).

Sumber: Tjaturrini et al. (2022), Koderi, (1991); Susanto (1987); Tohari (1982); Nafila (2013)

IV. Revitalisasi Bahasa dan Identitas di Ruang Digital

A. Bahasa Ngapak: Dari Stereotip Marginalisasi Menjadi Kebanggaan Kultural

Selama puluhan tahun, dialek Banyumasan, atau "Ngapak," menghadapi marginalisasi dan stereotip negatif di media nasional. Dialek ini sering dilabeli "kampungan," "kurang terpelajar," atau "tidak halus," sebuah pandangan yang terbentuk karena dominasi hegemoni dialek Mataraman (Solo-Jogja)⁴⁷ sebagai bahasa Jawa standar di lembaga formal dan media (Subchan, n.d.). Ironisnya, dari perspektif linguistik, dialek Ngapak justru dianggap heroik karena paling menjaga bentuk lama bahasa Jawa dari pengaruh luar dan gerusan zaman (Subchan, n.d.).

Di era modern, media digital telah menjadi arena kebangkitan dan demokratisasi linguistik bagi Ngapak. Generasi muda Banyumas kini menunjukkan kebanggaan luar biasa terhadap dialek mereka (Subchan, n.d.). **Perjalanan Ngapak, dari dialek yang diejek di media nasional menjadi simbol kebanggaan dan revitalisasi melalui platform digital, adalah salah satu kisah *cultural comeback* paling menawan di Jawa modern.** Platform

⁴⁷ Dialek Mataraman (Jawa Tengah bagian selatan, seperti Solo dan Jogja) secara historis dijadikan acuan bahasa Jawa *standar* dan *halus* karena menjadi pusat Kerajaan Mataram Islam. Hal ini menyebabkan dialek Ngapak (Jawa bagian barat) yang lugas dan egaliter sering dianggap marginal atau tidak halus di kancah nasional dan media *mainstream*.

digital menyediakan ruang demokratis yang melewati institusi tradisional yang sebelumnya meminggirkan Ngapak. Melalui media sosial, para pembuat konten membuktikan bahwa "ngapak ora desa" (ngapak tidak kampung), membalikkan marginalisasi kultural yang dipaksakan oleh hegemoni budaya Mataraman (Subchan, n.d.).

B. Konten Kreatif dan Media Digital sebagai Agen Demokratisasi Dialek

Media digital, seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, telah menjadi agen utama dalam revitalisasi dialek Ngapak (Subchan, n.d.). Ruang ini memungkinkan semua dialek memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa hegemoni satu dialek atas yang lain (Subchan, n.d.).

Konten kreatif berupa sketsa komedi, konten edukatif tentang keunikan dialek, dan diskusi linguistik mulai bermunculan, mengangkat kehidupan sehari-hari menggunakan dialek lokal (Subchan, n.d.). Media digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai alat pelestarian dan revitalisasi bahasa (Subchan, n.d.). Selain itu, dorongan ini didukung oleh lembaga pendidikan yang mulai memberikan ruang bagi dialek lokal dalam kurikulum muatan lokal (Subchan, n.d.).

C. Budaya Populer Ngapak: Musik dan Media Massa Lokal

Kebangkitan Ngapak telah meluas ke ranah budaya populer. Munculnya band Purwokerto yang secara percaya diri menggunakan dialek Ngapak dalam lirik musik mereka, seperti lagu berjudul "Ora-oraha," menunjukkan bahwa dialek ini telah menjadi bagian dari identitas gaya hidup yang menarik bagi generasi muda (Fimela, n.d.). Fenomena ini menjadi viral dan diperbincangkan di kalangan warganet (Fimela, n.d.).

Penggunaan Ngapak dalam musik populer menunjukkan bahwa bahasa tersebut telah bertransformasi menjadi **identitas gaya hidup** dan **produk komersial** yang menarik. Ini membuktikan bahwa dialek lokal dapat bersaing dengan konten berbahasa standar (Indonesia atau Jawa Mataraman) dan menjadi pembeda yang dibanggakan, menjamin relevansi bahasa di masa depan.

V. Kebijakan Kelembagaan dan Infrastruktur Pelestarian Budaya

A. Peran Pemerintah Daerah sebagai Patron dan Fasilitator

Dalam konteks modern, peran pelestarian budaya tidak bisa lagi hanya bergantung pada komunitas adat.

Pemerintah Daerah (Pemda) Banyumas secara aktif mengambil peran sebagai patron, fasilitator, dan pembina seni budaya.

Peran Pemda diwujudkan melalui dukungan finansial—dengan alokasi dana tahunan sekitar satu miliar rupiah untuk *event* dan pembinaan—serta pemberian pelatihan kepada pelaku seni (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.). Pembinaan ini melibatkan tenaga dari dinas terkait maupun akademisi yang direkrut Pemda.

Salah satu upaya Pemda yang paling krusial untuk memprofesionalisasi sektor seni adalah penerbitan **Kartu Seniman**. Inisiatif Kartu Seniman ini sangat menarik karena ia mentransformasi seniman tradisional menjadi profesional yang dilindungi secara legal di tengah tuntutan ekonomi modern, sebuah model pelestarian yang berorientasi masa depan (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.). Kartu ini berfungsi untuk **memberi perlindungan bagi seniman dalam menjalankan karya kreatifnya dalam bidang seni**. Dalam ekonomi modern yang menuntut jaminan legalitas dan sosial, perlindungan ini sangat penting untuk menarik dan mempertahankan talenta muda, mengubah persepsi bahwa seni tradisional adalah karier yang rentan.

B. Pendidikan Formal sebagai Garda Konservasi

Mengingat krisis regenerasi yang melanda sanggar seni informal (Upaya mempertahankan kesenian Lengger, n.d.), peran lembaga pendidikan formal menjadi garda terdepan dalam konservasi budaya. SMK Negeri 3 Banyumas (sebelumnya bernama Sekolah Menengah Karawitan Indonesia/SMKI) bertindak sebagai sarana konservasi budaya yang menyelenggarakan pendidikan seni tradisi, khususnya Calung Banyumasan.

Dengan dukungan Pemda, sekolah ini mengembangkan kurikulum yang sangat dominan dengan muatan lokal budaya Banyumas (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.). Strategi ini memastikan bahwa pewarisan budaya dilakukan melalui mekanisme formal yang terstruktur, yang lebih tahan terhadap disrupsi digital dibandingkan metode pewarisan informal yang telah melemah (Upaya mempertahankan kesenian Lengger, n.d.). Alumni SMKN 3 Banyumas ini kemudian menjadi pemain, pelatih, dan kreator yang mengisi grup-grup kesenian di masyarakat, mengatasi masalah regenerasi secara efektif.

C. Kolaborasi Multistakeholder

Pelestarian budaya di era modern menuntut ekosistem kolaboratif yang melibatkan banyak pihak. Dalam

pengembangan desa wisata, seperti di Desa Cikakak, diperlukan kontribusi dari pemerintah, praktisi, akademisi, tokoh adat, Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (RRI, 2024).

Pola pelestarian seni Calung sendiri menggambarkan ekosistem sirkular yang terintegrasi (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.). Pola ini melibatkan Pemda sebagai fasilitator, seniman, produser rekaman VCD lokal, penjual VCD, dan masyarakat pendukung (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.). Dalam model ini, Pemda menyediakan input (pelatihan dan dana), pendidikan formal menyediakan SDM, dan produser VCD menyediakan **saluran komersial dan ekspresi** di luar panggung fisik (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.). Komersialisasi melalui VCD, misalnya, menunjukkan adaptasi awal terhadap media, yang membantu seniman bertahan secara ekonomi dan menanggapi ancaman pergeseran hiburan (Upaya mempertahankan kesenian Lenggèr, n.d.).

Matriks Peran Multistakeholder dalam Pelestarian Budaya Banyumas Modern

Stakeholder	Peran Strategis	Contoh Implementasi	Koneksi Kritis
Pemerintah Daerah (Pemda)	Patron, Fasilitator, Regulator.	Pembinaan, Kartu Seniman, Dukungan SMK, Anggaran Pariwisata (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.).	Legitimasi dan profesionalisasi sektor seni.
Lembaga Pendidikan Formal (SMKN 3)	Konservasi, Regenerasi, Standardisasi.	Kurikulum Muatan Lokal Dominan Budaya Banyumas (Pelestarian	Mengatasi krisis pewarisan nilai informal (Upaya mempertahankan

Stakeholder	Peran Strategis	Contoh Implementasi	Koneksi Kritis
		Calung Banyumasan, n.d.).	kan kesenian Lengger, n.d.).
Komunitas Lokal (Pokdarwis, Adat)	Pelaksana, Penjaga Ritual, Penggerak Ekonomi.	Pengelolaan Desa Wisata (Cikakak), Antusiasme Pelestarian (RRI, 2024).	Memastikan praktik budaya tetap relevan di tingkat akar rumput.
Akademisi/Peneliti	Tenaga Pembina, Solusi Inovasi, Peningkatan Kapasitas.	Direkrut Pemda sebagai pembina (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.), Pelatihan Literasi Digital	Menghubungkan pelestarian dengan ilmu pengetahuan dan strategi modern.

Stakeholder	Peran Strategis	Contoh Implementasi	Koneksi Kritis
		(Telkom University Purwokerto, 2024).	

Sumber: Berbagai Sumber Data (Upaya mempertahankan kesenian Lengger..., n.d.; Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.; RRI, 2024; Telkom University Purwokerto, 2024).

VI. Budaya Banyumas dalam Lanskap Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Modern

A. Pengembangan Desa Wisata Budaya

Pariwisata budaya telah diakui sebagai sektor penting untuk kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2023). Banyumas mengoptimalkan aset budayanya melalui pengembangan destinasi tematik, terbukti dengan peresmian Desa Wisata Pekunden sebagai salah satu dari 75 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2023).

Dalam konsep pariwisata budaya, budaya dijadikan daya tarik utama, memandu wisatawan untuk mengenali

dan memahami kearifan lokal (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013). Kesenian yang telah dikomodifikasi dan diakulturasi, seperti *Calengsai*, sangat menunjang model pariwisata ini (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013).

B. Integrasi Kuliner dan Ruang Publik (Placemaking)

Infrastruktur kota modern juga diintegrasikan dengan aset budaya takbenda. Pengembangan Taman Kuliner Purwokerto menggunakan pendekatan *placemaking*, yang bertujuan menjadikan ruang tersebut sebagai tempat interaksi, rekreasi, sekaligus destinasi wisata (Wibowo & Mulyani, 2021). Kuliner khas daerah menjadi aset budaya *tangible* yang vital, mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan industri kreatif (Wibowo & Mulyani, 2021). Integrasi ini menunjukkan bahwa budaya bukan hanya warisan yang dipajang, tetapi komponen aktif dalam desain ruang publik modern.

C. Visi Kota Masa Depan: Keseimbangan Modernitas dan Jiwa Budaya

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi ambisius untuk menyiapkan "Kota Masa Depan" (Integrated City Project), menjadikan pariwisata dan pendidikan sebagai andalan (Metro Jateng, 2025). **Visi ini menawarkan perspektif menarik di tengah pembangunan modern, di**

mana budaya diposisikan sebagai 'jiwa' atau 'infrastruktur lunak' yang esensial, bukan sekadar pelengkap, untuk menciptakan daya tarik dan kualitas hidup yang berkelanjutan (Metro Jateng, 2025). Dalam visi ini, terdapat penekanan yang jelas bahwa pembangunan fisik modern harus disertai dengan upaya menjaga budaya dan alam Banyumas agar kota yang modern tetap memiliki **jiwa** atau karakter (Metro Jateng, 2025).

Visi ini mencerminkan pergeseran paradigma. Budaya tidak lagi dilihat sebagai beban yang harus dipertahankan, melainkan sebagai **infrastruktur lunak** esensial. Budaya yang kuat dan terintegrasi adalah magnet baru yang menarik investasi dan pariwisata, sekaligus menjaga kualitas hidup dan kebanggaan warga (Metro Jateng, 2025).

D. Strategi Pengembangan Wisata Budaya Berkelanjutan

Untuk memastikan manfaat ekonomi dan pelestarian berjalan paralel, strategi pengembangan wisata budaya harus bersifat berkelanjutan (Strategi pengembangan wisata budaya, 2023). Aset budaya yang dikembangkan beragam, mencakup seni pertunjukan (Lengger), permainan tradisional (gangsing, tulupan), dan kerajinan tangan (Batik Gringsing Mas) (Strategi

pengembangan wisata budaya, 2023). Penerapan analisis strategis (SWOT) dalam pengembangan ini penting untuk mengelola potensi dan tantangan, memastikan bahwa komodifikasi tidak menggerus nilai inti budaya.

VII. Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Budaya Banyumas

A. Isu Literasi Digital Kritis dan Etika

Meskipun media digital telah menjadi penyelamat dan alat revitalisasi bagi bahasa Ngapak (Subchan, n.d.), platform yang sama juga membawa tantangan besar. Transformasi literasi di era digital bukan hanya sekadar memindahkan bacaan ke format digital, melainkan tentang kemampuan menavigasi informasi digital secara **kritis dan etis** (Telkom University Purwokerto, 2024).

Di tengah perang nilai global yang intens (Mubah, 2011; Suryanti, 2007; Widiyono, 2019), pelatihan literasi kritis, seperti yang dilakukan melalui inisiatif FESLITMAS dan kolaborasi dengan komunitas literasi lokal (Telkom University Purwokerto, 2024), menjadi kebutuhan strategis. Tanpa kemampuan literasi digital yang kritis, platform yang memberdayakan identitas lokal dapat dengan mudah menjadi agen homogenisasi yang menggerus nilai-nilai kultural asli. Pelestarian sejati harus mencakup kemampuan

masyarakat untuk menyaring dan memilah antara konten lokal yang bernilai dan tren global yang bersifat dangkal.

B. Prospek Resiliensi Kultural dan Inovasi Berbasis Kearifan Lokal

Resiliensi budaya Banyumas di era modern memiliki prospek yang kuat, didukung oleh nilai filosofis *cablaka* yang memungkinkannya mempertahankan orientasi ganda (masa lalu dan masa depan) (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013), membuktikan bahwa komodifikasi dan institusionalisasi, jika dikontrol dan didukung oleh *multistakeholder*, dapat menjadi sarana pelestarian yang efektif secara finansial dan struktural.

C. Rekomendasi Kebijakan untuk Abad Berikutnya

Berdasarkan analisis transformasi dan tantangan, direkomendasikan beberapa fokus kebijakan untuk keberlanjutan budaya:

1. Ekspansi Fokus ke Ekosistem Digital-Kultural:

Pemda perlu memperluas program pembinaan seni budaya dari fokus pada panggung fisik ke **produksi konten digital dan narasi** berbahasa Ngapak dan budaya Banyumas. Hal ini harus memanfaatkan energi kreatif generasi muda di platform digital (Subchan, n.d.).

2. **Modernisasi Perlindungan Seniman:** Kebijakan Kartu Seniman (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.) perlu diperbarui dan diperluas untuk mengintegrasikan perlindungan hukum dan ekonomi bagi *content creator* dan seniman digital yang menggunakan dialek lokal sebagai media ekspresi dan mata pencaharian, mengakui peran krusial mereka dalam pelestarian di era modern.

BAB 10

Banyumas dalam Arus Globalisasi

I. Kontestasi Lokalitas dan Globalitas di Banyumas

A. Latar Belakang Globalisasi dan Relevansinya bagi Karesidenan Banyumas

Globalisasi, yang didefinisikan sebagai proses integrasi yang cepat antara pasar, budaya, dan teknologi lintas batas negara (Kotler, Keller, & C., 2022, dikutip dalam),⁴⁸ telah memberikan dampak multidimensi terhadap Kabupaten Banyumas. Sebagai salah satu simpul regional penting di Jawa Tengah bagian selatan, Banyumas berada dalam posisi unik di mana upaya pelestarian identitas budaya lokal yang kuat (terutama Dialek Ngapak) bersinggungan langsung dengan dorongan modernisasi ekonomi yang berpusat di Purwokerto.

Karesidenan Banyumas kini terpapar pada dinamika global melalui beberapa jalur utama: investasi langsung (baik asing maupun domestik), migrasi tenaga kerja produktif (Pekerja Migran Indonesia/PMI), dan penetrasi

⁴⁸ Philip Kotler, Kevin Lane Keller, dan A. C., *Marketing Management* (Pearson, 2022), dikutip dalam D. A. Maharani & R. R. Hasibuan, "Peningkatan Kemampuan Pemasaran Digital pada UMKM di Desa Sumbang Purwokerto" (ABDI, 2024).

budaya digital. Bab ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana interaksi antara kekuatan global dan resiliensi lokal membentuk struktur ekonomi, memperburuk atau meredakan kesenjangan sosial, dan mendorong adaptasi budaya di wilayah Banyumas.

B. Tinjauan Historis Singkat Dinamika Ekonomi Banyumas

Secara historis, ekonomi Banyumas didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan tradisional. Dalam konteks modern, wilayah ini mengalami transisi struktural yang didorong oleh berkembangnya Purwokerto sebagai pusat jasa dan pendidikan regional. Untuk bersaing dalam arena global, Banyumas membutuhkan modernisasi fundamental, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bab ini akan membagi analisis dampak globalisasi ke dalam tiga dimensi utama—Ekonomi, Sosial/Spasial, dan Budaya—untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kontestasi dan adaptasi yang terjadi. Analisis ekonomi akan berfokus pada kekuatan PDRB, pola investasi, dan kesiapan infrastruktur, sementara analisis sosial akan mengkaji ketimpangan pendapatan dan peran migrasi tenaga kerja. Terakhir, analisis budaya akan

menyoroti strategi resiliensi budaya lokal di tengah penetrasi media dan pola konsumsi global.

II. Globalisasi Ekonomi: Struktur, Investasi, dan Infrastruktur Kritis

A. Peta Kekuatan Ekonomi Regional: Analisis Sektor Unggulan PDRB

Pemahaman mendalam mengenai struktur ekonomi Banyumas sangat penting untuk memetakan bagaimana wilayah ini berinteraksi dengan pasar global. Data PDRB Banyumas yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga periode 2022 menunjukkan adanya sektor-sektor yang menjadi penggerak utama.

Analisis Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) periode 2015–2022 memberikan gambaran yang jelas mengenai sektor unggulan (Basis - memiliki keunggulan komparatif regional) dan sektor prospektif (memiliki potensi pertumbuhan cepat).⁴⁹ Hasil kajian menunjukkan bahwa sektor Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah (LQ 1.26, DLQ 1.48) serta sektor

⁴⁹ LQ (Location Quotient) adalah alat analisis untuk mengukur keunggulan komparatif suatu sektor di wilayah regional dibandingkan dengan nasional/provinsi. DLQ (Dynamic Location Quotient) mengukur potensi pertumbuhan sektor tersebut di masa depan.

Konstruksi (LQ 1.24, DLQ 1.92) adalah sektor-sektor Unggulan (Basis dan Prospektif).

Analisis ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banyumas saat ini sangat ditopang oleh spending domestik dan proyek pembangunan, bukan didominasi oleh produksi barang untuk pasar ekspor. Keunggulan sektor Konstruksi secara khusus menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur fisik adalah motor utama pertumbuhan, yang dapat ditafsirkan sebagai fase persiapan internal menuju integrasi global yang lebih luas.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran diklasifikasikan sebagai Basis (LQ 1.14) tetapi Tidak Prospektif (DLQ 0.19). Hal ini mengindikasikan bahwa Purwokerto berfungsi sebagai pusat jasa dan perdagangan regional yang penting, namun apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan sektor manufaktur yang kuat, sektor perdagangan ini berisiko mengalami stagnasi dalam jangka panjang.

Menariknya, sektor Industri Pengolahan diklasifikasikan sebagai Non-Basis (LQ 0.97) tetapi Prospektif (DLQ 6.12). Sektor ini memiliki potensi besar untuk tumbuh di masa depan meskipun kontribusinya saat ini terhadap PDRB provinsi masih relatif kecil. Diversifikasi ke sektor industri pengolahan adalah langkah

krusial untuk mengurangi ketergantungan pada sektor jasa yang berisiko stagnan, serta untuk meningkatkan daya saing global Banyumas melalui produk manufaktur.

Tabel 10.1 di bawah merangkum temuan penting dari analisis sektor PDRB:

Table 10.1 Klasifikasi Sektor Unggulan Berdasarkan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Kabupaten Banyumas (2015–2022)

Sektor	LQ Rata-rata	Klasifikasi LQ	Klasifikasi DLQ	Status Sektor	Sumber Data/Literasi
Industri Pengolahan	0.97	Non-Basis	Prospektif	Potensial (Tertinggal)	Taufiqqurrahman & Jayadi (2023)

Sektor	L Q R at a- R at a	Klasifikasi LQ	Klasifikasi DLQ	Status Sektor	Sumber Data/Literasi
Pengadaa n Air, Pengelolaa n Sampah	1. 26	Basis	Prospektif	Unggulan	Taufiqq urrach man & Jayadi (2023)
Konstruksi	1. 24	Basis	Prospektif	Unggulan	Taufiqq urrach man & Jayadi (2023)

Sektor	L Q R at a- R at a	Klas ifikasi LQ	Klas ifikasi DLQ	Stat us Sekt or	Sumber Data/Li terasi
Perdagangan Besar dan Eceran	1. 14	Basis	Tidak Prospektif	Potensial	Taufiqq urrach man & Jayadi (2023)

B. Realisasi Investasi (PMA/PMDN) dan Peran Pusat Pertumbuhan Purwokerto

Realisasi investasi di Kabupaten Banyumas menunjukkan dinamika yang didominasi oleh modal domestik dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data realisasi investasi Triwulan I Tahun 2023 menunjukkan bahwa investasi Non-Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (Non-LKPM) mencapai Rp 120.283.675.956, melibatkan 6.279 unit usaha dan menyerap 12.596 tenaga kerja.⁵⁰ Sementara itu, total investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang tercatat dalam LKPM mencapai Rp 384.513.430.000 (Rp 162.729,70 Juta dari PMA dan Rp 227.666,56 Juta dari PMDN).

Tingginya jumlah unit usaha yang terserap melalui investasi Non-LKPM (lebih dari 6.000 unit) mengindikasikan bahwa modal lokal berskala kecil dan menengah merupakan pendorong utama penciptaan lapangan kerja jangka pendek di Banyumas. Pertumbuhan ini mencerminkan resiliensi UMKM lokal dalam merespons pasar.

Secara spasial, perkembangan investasi swasta (yang dapat diukur melalui hak tanggungan) menunjukkan adanya kecenderungan pengelompokan di area peralihan atau berkembang (Edge) Perkotaan Purwokerto. Pola ini berkorelasi dengan fenomena urbanisasi yang cepat dan perluasan kawasan non-pertanian. Meskipun modal besar

⁵⁰ Investasi Non-LKPM umumnya merujuk pada investasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak wajib lapor melalui sistem LKPM, dan tingginya jumlah unit usaha yang terlibat (6.279 unit) mengindikasikan bahwa modal lokal berskala kecil dan menengah merupakan pendorong utama penciptaan lapangan kerja jangka pendek di Banyumas.

(nilai tanggungan tinggi) masih terpusat di kawasan inti kota (Central Business District/CBD), investasi yang menyebar di pinggiran mengisyaratkan bahwa modernisasi ekonomi dan pertumbuhan di Banyumas didominasi oleh ekspansi fisik Purwokerto sebagai pusat jasa dan hunian, bukan melalui penyebaran investasi industri yang merata di seluruh kabupaten.

Tabel 10.2 menyajikan ringkasan realisasi investasi pada Triwulan I Tahun 2023:

**Table 10.2 Realisasi Investasi Kabupaten Banyumas
Triwulan I Tahun 2023**

Jenis Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Unit Usaha (NIB)	Tenaga Kerja Terse- rap (Orang)	Sumber Data
Non- LKPM	120.283.67 5.956	6.27 9	12.59 6	DPMP TSP Jawa Tengah

Jenis Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Unit Usaha (NIB)	Tenaga Kerja Terse- rap (Orang)	Sumber Data
				h (2023)
LKPM - PMA	162.729.70 0.000	Tidak Spesifik	Tidak Spesifik	DPMP TSP Jawa Tengah (2023)
LKPM - PMDN	227.666.56 0.000	Tidak Spesifik	Tidak Spesifik	DPMP TSP Jawa Tengah

Jenis Investasi	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Unit Usaha (NIB)	Tenaga Kerja Tersekap (Orang)	Sumber Data
				h (2023)

C. Konektivitas Abad ke-21: Infrastruktur Fisik dan Digital

Kesiapan infrastruktur merupakan prasyarat esensial bagi Banyumas untuk dapat berintegrasi sepenuhnya dalam rantai pasok global. Dalam konteks infrastruktur fisik, proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan Tol Pejagan-Cilacap, sangat menentukan. Separuh ruas tol ini dilaporkan akan melintasi Kabupaten Banyumas. Merespons peluang ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyiapkan kawasan industri seluas 1.500 hektar.

Strategi alokasi lahan industri yang besar ini adalah upaya makro untuk menarik Industri Pengolahan (sektor yang Prospektif tetapi masih Non-Basis) dan mendiversifikasi struktur ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Konektivitas tol akan menjadi faktor kunci dalam mengintegrasikan pasokan bahan baku dan hasil produksi Banyumas ke jaringan logistik nasional dan global.

Di sisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), fondasi digital Banyumas tergolong kuat. Telkom Purwokerto telah memastikan bahwa jaringan internet di Banyumas 100% menggunakan fiber optik. Ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai ini adalah pondasi bagi pengembangan ekonomi digital.

Sejalan dengan perkembangan ini, Banyumas mengadopsi konsep Smart City dengan menggunakan prinsip agile governance, memungkinkan pemerintah daerah merespons perubahan secara cepat dan melibatkan publik dalam pengembangan program. Implementasi nyata dari inisiatif ini terlihat pada Smart Mobility melalui layanan Trans Banyumas. Meskipun secara umum penumpang puas, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi layanan digitalnya, seperti aplikasi Teman Bus dan sistem pembayaran e-money. Hal ini menggarisbawahi adanya

kesenjangan antara ketersediaan infrastruktur TIK fisik yang prima dan pemanfaatan layanan digital yang belum optimal.

III. UMKM sebagai Agen Global: Inovasi, Digitalisasi, dan Ekspor Komoditas Kunci

A. Revitalisasi Komoditas Berbasis Lokal untuk Pasar Internasional

Globalisasi membuka peluang bagi UMKM lokal Banyumas untuk menembus pasar internasional, terutama melalui komoditas unggulan berbasis agroindustri. Sekitar 170 pelaku UMKM Banyumas menyatakan komitmen untuk "naik kelas" dan menargetkan pasar internasional. Komoditas yang terbukti memiliki daya saing global meliputi gula kelapa, minyak atsiri, batok kelapa, dan daun ketapang.

Keberhasilan ekspor Banyumas sangat bergantung pada produk-produk niche market yang memiliki nilai tambah tinggi, sejalan dengan permintaan global akan produk alami dan organik. Studi kasus keberhasilan yang menonjol adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabul Ciptaku di Desa Langgongsari, yang berhasil mengekspor gula kelapa ke Hungaria (18,5 ton senilai USD 35.000). Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(LPEI/Eximbank) juga aktif mendorong gula kelapa Banyumas untuk menembus ekspor ke 10 negara.

Keterlibatan BUMDes dalam aktivitas ekspor membuktikan bahwa manfaat globalisasi dapat didistribusikan hingga ke tingkat desa. Pendampingan kelembagaan dan logistik juga berperan penting, di mana Bea Cukai memberikan asistensi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Namun, para pelaku usaha menghadapi tantangan utama, yaitu menjaga kontinuitas produksi dan kualitas produk yang konsisten untuk memenuhi standar dan volume permintaan global.

B. Adaptasi Pemasaran: Strategi Go Digital dan Tantangan Adopsi

Meskipun fondasi TIK Banyumas telah didukung oleh 100% fiber optik, tantangan terbesar dalam ekosistem UMKM adalah adopsi teknologi digital. Data Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa dari sekitar 90.000 pelaku UMKM, hanya 5.400 yang telah memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran daring (go digital). Angka penetrasi yang rendah ini

mengindikasikan adanya jurang digital (digital divide) yang signifikan di tingkat kemampuan dan kemauan adopsi.

Padahal, pemasaran digital menawarkan kesempatan transformatif bagi UMKM untuk mengatasi keterbatasan pasar tradisional dan bersaing secara efektif. Pemerintah daerah merespons dengan merancang berbagai pelatihan digital dan meluncurkan program-program dukungan, seperti layanan GoFood PAS untuk area Purwokerto, guna mendorong UMKM mengembangkan bisnis secara digital. Di tingkat komunitas, inisiatif seperti Program Literasi Digital Desa Plangkapan juga fokus pada peningkatan keterampilan digital warga, mulai dari dasar komputer hingga pemasaran produktif.

Kesenjangan digital yang ada di Banyumas bukan disebabkan oleh minimnya infrastruktur keras (karena fiber optik sudah mencakup seluruh wilayah), melainkan oleh faktor literasi, keterampilan, dan modal adopsi. Intervensi kebijakan yang paling efektif saat ini adalah fokus pada pelatihan dan pendampingan untuk menjembatani jurang ini, sehingga ribuan unit usaha Non LKPM yang ada dapat memaksimalkan jangkauan pasar global yang ditawarkan oleh platform digital.

IV. Konsekuensi Sosial Globalisasi: Kesenjangan, Migrasi, dan Perubahan Spasial

A. Analisis Kesenjangan Pendapatan (Gini Ratio)
Periode Pasca-Pandemi

Salah satu konsekuensi sosial yang paling krusial dari globalisasi dan modernisasi ekonomi adalah potensi peningkatan ketimpangan pendapatan. Analisis Gini Ratio di Kabupaten Banyumas menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan pada periode pasca-pandemi.

**Table 10.3 Tren Gini Ratio Kabupaten Banyumas
(2021–2023)**

Tahun	Gini Ratio Banyumas	Interpretasi Ketimpangan (BPS)	Sumber Data
2021	0.364	Sedang	BPS Jawa Tengah (2024)
2022	0.353	Sedang	BPS Jawa Tengah (2024)

Tahun	Gini Ratio Banyumas	Interpretasi Ketimpangan (BPS)	Sumber Data
2023	0.397	Mendekati Tinggi	BPS Jawa Tengah (2024)

Data Gini Ratio menunjukkan angka 0.364 pada 2021 dan 0.353 pada 2022. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan tajam menjadi **0.397**. Nilai ini berada sangat dekat dengan batas 0.400, yang merupakan ambang batas untuk klasifikasi ketimpangan tinggi menurut standar Badan Pusat Statistik.⁵¹

Lonjakan Gini Ratio yang signifikan pada tahun 2023 merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi yang tidak inklusif. Manfaat dari pertumbuhan yang didorong oleh investasi dan sektor Konstruksi (sektor unggulan) tampaknya terkonsentrasi pada kelompok

⁵¹ Data Gini Ratio Kabupaten Banyumas periode 2021–2023 diambil dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2024). Lonjakan dari 0.353 (2022) menjadi 0.397 (2023) merupakan indikasi serius adanya pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi yang tidak inklusif, dengan manfaat yang terkonsentrasi di wilayah pusat Perkotaan Purwokerto.

masyarakat atau wilayah tertentu, yang kemungkinan besar adalah pusat Perkotaan Purwokerto. Hal ini memperburuk ketimpangan yang secara historis sudah ada antara kecamatan-kecamatan maju dan berkembang pesat (seperti Purwokerto Timur, Barat, Selatan) dengan kecamatan yang relatif tertinggal.

Secara historis, analisis ketimpangan antar-kecamatan di Banyumas pada periode 1993-2000 menunjukkan kecenderungan peningkatan, menegaskan validitas Hipotesis Kuznets (ketimpangan meningkat pada fase awal pertumbuhan ekonomi). Untuk mengatasi jurang ketimpangan yang semakin lebar ini, kebijakan harus diarahkan pada pemerataan pendapatan, termasuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal, memberikan pelatihan peningkatan skill gratis, dan memberikan subsidi bagi sektor pertanian.

B. Fenomena Migrasi Tenaga Kerja (PMI) dan Peran Remitansi

Dalam konteks pasar tenaga kerja global, Banyumas memiliki peran penting sebagai daerah penghasil Pekerja Migran Indonesia (PMI). Banyumas menyumbang 16.824 PMI, menjadikannya salah satu kontributor terbesar (5.9% dari total Jawa Tengah). Fenomena migrasi tenaga kerja

yang masif ini adalah cerminan dari kegagalan pasar tenaga kerja lokal dalam menyerap seluruh penduduk produktif ke dalam sektor dengan upah yang memadai, sehingga mereka mencari peluang di pasar global.

Remitansi, atau dana kiriman dari PMI, telah menjadi fenomena keuangan yang penting. Di tingkat makro, remitansi terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan secara langsung mendorong peningkatan konsumsi per kapita daerah asal. Dengan dominasi sektor Perdagangan di PDRB Banyumas, remitansi berfungsi sebagai "katup pengaman" sosial dan pendorong utama aktivitas konsumsi.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa remitansi tidak terbukti berdampak signifikan secara langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar remitansi digunakan untuk konsumsi, bukan investasi produktif. Oleh karena itu, optimalisasi dampak positif globalisasi melalui PMI harus mencakup upaya peningkatan kualitas PMI dan sosialisasi penggunaan remitansi untuk tujuan investasi, sejalan dengan rekomendasi penelitian sebelumnya.

C. Transformasi Spasial: Ekspansi Kawasan Urban Purwokerto

Globalisasi, yang diinternalisasi melalui arus investasi dan populasi, secara fundamental mengubah tata ruang Banyumas. Data menunjukkan percepatan proses urbanisasi, terutama di sekitar Purwokerto. Jumlah desa di kawasan ini yang memiliki persentase penduduk non-pertanian lebih dari 85% meningkat tajam, dari hanya 5 desa pada 2009 menjadi 15 desa pada 2019.

Perluasan kawasan non-pertanian ini mencerminkan perluasan fungsi kota ke desa-desa penyangga. Transformasi spasial ini didukung oleh pola investasi yang cenderung mengelompok di area pinggiran Purwokerto. Implikasi dari perluasan urbanisasi yang cepat ini adalah tingginya permintaan untuk pengembangan properti, terutama properti terjangkau yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat yang bermigrasi ke pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, tata ruang di Banyumas harus beradaptasi untuk mengakomodasi pertumbuhan urban yang berkelanjutan sambil memitigasi dampak perluasan lahan non-pertanian.

V. Resiliensi dan Kontestasi Budaya Lokal di Ruang Digital

A. Pelestarian Identitas Linguistik: Dialek Ngapak dalam Ranah Digital

Identitas budaya lokal Banyumas, terutama Dialek Ngapak, menghadapi tantangan berat di tengah arus globalisasi. Mahasiswa asal Banyumas yang merantau sering mengalami fenomena rasa malu menggunakan bahasa daerah mereka di luar komunitas asalnya. Hal ini menunjukkan adanya tekanan budaya populer yang mengarah pada homogenitas linguistik.

Namun, globalisasi dan teknologi digital, yang seringkali dianggap sebagai ancaman, kini dimanfaatkan sebagai katalisator efektif untuk pelestarian. Kelompok mahasiswa merantau menyikapi tekanan ini dengan membentuk komunitas seperti IWAKMAS⁵² sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan identitas budaya mereka melalui interaksi dengan sesama perantau.

Selain itu, upaya pelestarian juga difasilitasi melalui media digital. Rancangan buku digital ilustrasi interaktif, yang dilengkapi dengan audio dan visual pengucapan Dialek

⁵² Komunitas seperti IWAKMAS (Ikatan Warga Banyumas) berfungsi sebagai ruang aman (safe space) bagi perantau untuk mempraktikkan Dialek Ngapak tanpa rasa malu (fenomena yang disebut linguistic shame) yang muncul akibat tekanan budaya populer di luar daerah asal.

Banyumasan, telah dikembangkan. Media ini dirancang khusus agar menarik bagi generasi muda yang terbiasa mengonsumsi konten visual di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa adaptasi teknologi—yang dimungkinkan oleh fondasi digital yang kuat—adalah kunci untuk menjaga identitas linguistik tetap relevan di era modern.

B. Dinamika Kesenian Tradisional: Ebeg dan Lengger dalam Industri Budaya Populer

Kesenian tradisional seperti Tari Lengger Lanang dan Ebeg (kuda lumping) dipaksa untuk berdinamika di tengah budaya populer global agar tetap relevan di kalangan generasi muda. Agar dapat bertahan, seni tradisional harus menyeimbangkan antara mempertahankan otentisitas ritualistik dan menyesuaikan format untuk konsumsi massa.

Dalam pertunjukan Ebeg, babak ritualistik seperti ndadi (trance) tetap menjadi elemen yang menarik minat penonton. Elemen otentik dan "aneh" ini berfungsi sebagai daya tarik unik di tengah homogenitas hiburan yang ditawarkan oleh media global. Proses ini menunjukkan bahwa globalisasi memaksa kesenian lokal untuk bertransformasi menjadi produk industri budaya, di mana mereka harus secara strategis memilih elemen mana yang

harus dipertahankan sebagai otentisitas dan elemen mana yang harus dikemas ulang. Keberhasilan dalam menyeimbangkan komodifikasi dan otentisitas menjadi penentu resiliensi seni tradisional Banyumas.

C. Gastronomi dan Ancaman Budaya Makanan Western

Globalisasi memiliki dampak langsung pada pola konsumsi masyarakat Banyumas. Masuknya budaya makanan western yang serba cepat dan mengikuti tren, yang disebarkan melalui media sosial dan restoran internasional, telah menyebabkan pergeseran minat, terutama di kalangan generasi muda, dari makanan tradisional menuju makanan modern.

Kuliner lokal, seperti Tempe Mendoan, Soto Sokaraja, dan Getuk Goreng, merupakan "artefak budaya hidup" yang merekam nilai historis dan sosial masyarakat Banyumas. Kehilangan daya tarik kuliner lokal bukan hanya masalah selera, tetapi juga ancaman terhadap warisan budaya.

Untuk melindungi dan melestarikan kekayaan gastronomis ini, diperlukan strategi perlindungan yang proaktif. Strategi tersebut meliputi peningkatan literasi gastronomi, yang fokus pada penguatan nilai historis dan sosial makanan lokal, serta formalisasi perlindungan

melalui branding budaya dan regulasi pangan (seperti Indikasi Geografis/Hak Kekayaan Intelektual - GI/HAI). Upaya ini harus mengubah persepsi, menjadikan makanan khas daerah sebagai identitas yang dibanggakan di tengah arus globalisasi.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Prospektif

A. Sintesis Dampak Globalisasi terhadap Dinamika Banyumas

Analisis mendalam menunjukkan bahwa Banyumas saat ini berada dalam fase kontestasi yang intens antara aspirasi global dan realitas lokal.

Dampak Positif dan Kesiapan:

- a) **Ekonomi yang Dinamis:** Terdapat tingkat investasi lokal (Non-LKPM) yang tinggi, menunjukkan resiliensi dan potensi penciptaan lapangan kerja UMKM yang kuat.
- b) **Keunggulan Niche Ekspor:** UMKM Banyumas berhasil memanfaatkan produk berbasis agroindustri (gula kelapa) untuk menembus pasar ekspor global, didukung oleh pendampingan institusional (LPEI, Bea Cukai).
- c) **Fondasi Digital Kuat:** Infrastruktur fisik TIK (100% fiber optik) telah disiapkan, menjadi pondasi

esensial untuk pembangunan Smart City dan ekonomi digital.

Dampak Negatif dan Tantangan Kritis:

- a) **Ketidakadilan Pembangunan:** Peningkatan Gini Ratio yang tajam hingga 0.397 pada 2023 adalah indikator serius dari pertumbuhan yang tidak inklusif, di mana manfaat ekonomi terkonsentrasi di pusat Purwokerto, memperburuk ketimpangan spasial.
- b) **Kesenjangan Adopsi Digital:** Meskipun infrastruktur tersedia, hanya sebagian kecil UMKM (5.400 dari 90.000) yang go digital. Kesenjangan ini mengancam daya saing lokal.
- c) **Ketergantungan Migrasi:** Ketergantungan pada remitansi PMI yang masif mencerminkan ketidakmampuan pasar kerja lokal menyediakan lapangan kerja yang setara.

B. Rekomendasi Kebijakan untuk Mitigasi Kesenjangan dan Penguatan Resiliensi Budaya

Berdasarkan temuan-temuan di atas, terdapat lima rekomendasi kebijakan strategis yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas:

- a) **Industrialisasi yang Inklusif:** Memastikan bahwa pengembangan Kawasan Industri 1.500 hektar yang disiapkan untuk menyambut Tol Pejagan-Cilacap diwajibkan menggunakan tenaga kerja lokal secara maksimal. Hal ini harus didukung dengan program pelatihan skill gratis yang terfokus pada kebutuhan sektor industri pengolahan (sektor prospektif) untuk memitigasi lonjakan Gini Ratio.
- b) **Menjembatani Kesenjangan Digital (Digital Divide):** Mengalihkan fokus sumber daya dari pembangunan infrastruktur keras (yang sudah memadai) ke pembangunan literasi digital dan pendampingan aplikasi teknologi untuk UMKM. Tujuannya adalah secara kuantitatif meningkatkan jumlah UMKM yang mampu bertransaksi dan memasarkan produknya secara daring, jauh melampaui angka 5.400 saat ini.
- c) **Formalisasi Perlindungan Gastronomi Lokal:** Pemerintah perlu segera memfasilitasi perlindungan kuliner khas (Mendoan, Soto Sokaraja) melalui pengajuan Indikasi Geografis (GI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAI). Upaya ini akan menguatkan branding budaya kuliner sebagai

artefak hidup yang dibanggakan, melindunginya dari ancaman homogenitas budaya makanan western.

- d) **Optimalisasi Remitansi Produktif:** Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada PMI dan keluarganya agar remitansi tidak hanya digunakan untuk konsumsi (yang mendorong sektor Perdagangan yang tidak prospektif), tetapi dialihkan untuk investasi produktif, misalnya melalui penyertaan modal di UMKM atau BUMDes.

- e) **Pengelolaan Transformasi Spasial:** Mengembangkan kebijakan tata ruang yang adaptif untuk mengendalikan perluasan kawasan non-pertanian yang cepat di pinggiran Purwokerto, sambil memastikan penyediaan perumahan terjangkau dan infrastruktur publik di area urban baru untuk mencegah timbulnya slum di kawasan penyangga.

BAB 11

Evaluasi Komprehensif Empat Setengah Abad Dinamika Banyumas (Abad Ke-16 – Kontemporer)

Temuan paling menarik dari evaluasi komprehensif ini terletak pada Paradoks Egalitarianisme Struktural Banyumas. Secara historis, watak egaliter Cablaka lahir dari otonomi geopolitik (Mancanegara Kilèn) dan fondasi ekonomi petani merdeka yang independen.

Namun, semangat luhur ini secara sistematis digerus oleh polarisasi spasial yang diwarisi dari eksploitasi kolonial (menciptakan kelas Mondok) dan sentralisme Orde Baru (Growth Pole Purwokerto). Kontradiksi ini berujung pada lonjakan Gini Ratio yang mengkhawatirkan di era kontemporer, menjadi bukti nyata bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Di tengah konflik struktural ini, narasi kebudayaan menampilkan resiliensi yang adaptif: Dialek Ngapak bertransformasi dari simbol marginalisasi menjadi kebanggaan digital, sementara seni tradisi (Lengger, Ebeg) bertahan melalui komodifikasi strategis yang menjadikannya aset pariwisata berorientasi masa depan.

Empat setengah abad perjalanan Kabupaten Banyumas adalah narasi tentang paradoks: perjuangan abadi antara semangat egaliter internal melawan tekanan ketimpangan struktural yang diwarisi dari kekuatan eksternal. Dari statusnya sebagai Mancanegara Kilèn yang otonom hingga menjadi *growth pole* regional yang terpolarisasi, Banyumas telah membuktikan resiliensi kulturalnya. Bab evaluasi ini menyintesis pencapaian, kegagalan, dan pelajaran krusial dari dinamika ekonomi, sosial, dan budaya Banyumas, merumuskan peta jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

I. Evaluasi Perkembangan Ekonomi: Pencapaian dan Kegagalan

Perkembangan ekonomi Banyumas dapat dibagi menjadi tiga fase kritis: fondasi agraria mandiri, ekstraksi kolonial/sentralistik, dan modernisasi kontemporer yang diwarnai ketimpangan.

A. Pencapaian Historis dan Kontemporer

Secara historis, fondasi ekonomi Banyumas dibangun di atas kekuatan agraria yang egaliter, ditandai dengan **fondasi petani merdeka** yang menguasai hampir 80% lahan dan mampu mencapai tiga kali panen padi tahunan sejak 1585. Kemandirian ini berfungsi

sebagai buffer sosial, mengurangi ketergantungan pada patronase feodal.

**Perbandingan Struktur Pertanahan: Banyumas
(Mancanegara Kilèn) vs. Surakarta (Pusat Mataram)
(Estimasi 1820)**

Parameter	Banyumas	Surakarta
Lahan Dikelola Petani Langsung	78%	35%
Lahan Apanage Bangsawan	15%	50%
Tanah Langsung Milik Kerajaan	7%	15%
Sumber Data/Literasi: Disintesis dari rekonstruksi Babad Banyumas dan data kolonial (Estimasi 1820) (Priyadi, 2007; Sukardi, 2015)		

Intensitas intervensi kolonial secara fundamental menggerus fondasi ini, mengubah Banyumas menjadi mesin ekstraksi sumber daya yang melahirkan kelas **buruh tani**

tanpa tanah (Mondok/Numpang) akibat pajak yang jauh lebih tinggi daripada pendapatan bersih.

Tabel Kronologi Kunci Krisis dan Perubahan Struktural di Banyumas (1830–1949)

Tahun Kunci	Peristiwa Utama	Implikasi Struktural
1830	Penyerahan Banyumas ke Hindia Belanda	Berakhirnya status Mancanegara Kilèn, awal status Sapi Perah kolonial, pembentukan Karesidenan
1838	Pendirian Pabrik Gula Kalibagor	Awal industrialisasi gula, perampasan tanah komunal, penciptaan kelas Mondok
1930–1940	Krisis Malaise (Depresi Besar)	Penutupan 14 pabrik gula, PHK massal, migrasi darurat [1, 1]

Tahun Kunci	Peristiwa Utama	Implikasi Struktural
1937	Perpindahan Ibu Kota ke Purwokerto	Dominasi spasial Purwokerto sebagai pusat ekonomi/logistik, awal polarisasi pembangunan [1, 1]
1945–1949	Revolusi Fisik	Banyumas menjadi basis militer strategis (Jenderal Soedirman), mobilisasi laskar (IMAM), transisi kekuasaan
Sumber Data/Literasi: Disintesis dari data historis masa kolonial (Arinda et al., 2017; Comission, 2016; Sukardi, 2015) [1, 1, 1]		

Dalam periode kontemporer, Banyumas menunjukkan **resiliensi makroekonomi** yang kuat, dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar **5,19%** (2005–2022) dan pemulihan yang cepat

pasca-pandemi COVID-19. Struktur PDRB didominasi oleh **Sektor Tersier (Jasa, Perdagangan, Transportasi)**, yang berkontribusi lebih dari 50% , didukung oleh investasi dan pembangunan Kawasan Industri 1.400–1.500 hektar di Wangon-Lumbir.

B. Kegagalan dan Warisan Struktural

Kegagalan utama terletak pada **ketimpangan struktural** yang persisten, sebagaimana tercermin dari **lonjakan Gini Ratio** Banyumas menjadi **0.397** pada 2023, mendekati ambang batas ketimpangan tinggi. Fenomena **pertumbuhan non-inklusif** (decoupling) terjadi karena sektor yang menyerap banyak tenaga kerja miskin (seperti pertanian) mengalami penurunan kontribusi, sementara pertumbuhan terkonsentrasi di Purwokerto (sektor jasa). Kegagalan lain meliputi:

- a) **Biaya Eksternal:** Konversi lahan pertanian yang masif (rata-rata **112 Ha/tahun** pada 1990-2015) dan degradasi lingkungan (tingkat Chemical Oxygen Demand/**COD** rata-rata **62,52 mg/L** di DAS Serayu, melampaui baku mutu).
- b) **Kerentanan Fiskal:** Kabupaten Banyumas menunjukkan **Kemandirian Keuangan Daerah yang Rendah** dan **Rasio Ketergantungan**

terhadap dana transfer pusat yang Sangat Tinggi (2019–2023).

II. Evaluasi Dinamika Sosial: Transformasi Masyarakat

Masyarakat Banyumas bertransformasi dari komunitas agraris kolektif menuju masyarakat urban-industrial yang dihadapkan pada individualisme dan ketidaksetaraan.

Tabel Indikator Kesenjangan dan Resiliensi Sosial-Ekonomi Kontemporer Banyumas

Indikator Kesenjangan/Resiliensi	Nilai Kuantitatif/Karakteristik	Signifikansi Kritis	Sumber Data/Literasi
Gini Ratio (2023)	0.397 (Lonjakan, Mendekati Tinggi)	Bukti pertumbuhan pasca-pande	BPS Jawa Tengah

Indikator Kesenjangan/Resiliensi	Nilai Kuantitatif/Karakteristik	Signifikan Kritis	Sumber Data/Literasi
		mi yang tidak inklusif , konsen trasi manfaa t di Purwo kerto.	(2024)
Anak Tidak Sekolah (ATS)	13.426 Anak	Kegagalan sistemik (leaky pipeline)	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu

Indikator Kesenjangan/Resiliensi	Nilai Kuantitatif/ Karakteristik	Signifikan Kritis	Sumber Data/ Literasi
		e) pada transisi jenjang menengah akibat faktor ekonomi.	mas (2025)
Pertumbuhan LPE (2005–2022)	Rata-rata 5.19%	Resilience Makroekonomi dan pemulihan cepat	Pemkab Banyumas (Dinas Kominfo, 2023)

Indikator Kesenjangan/Resiliensi	Nilai Kuantitatif/Karakteristik	Signifikan Kritis	Sumber Data/Literasi
		pasca-COVID-19.	
Tingkat Adopsi Digital UMKM	5.400 dari 90.000 UMKM (Go Digital)	Kesenjangan digital yang signifikan, menghambat potensi UMKM menembus pasar global.	DPMP TSP Jawa Tengah (2023)

Indikator Kesenjangan/Resiliensi	Nilai Kuantitatif/ Karakteristik	Signifikan Kritis	Sumber Data/ Literasi
Sumber Data/Literasi: Disintesis dari data BPS (2023), Dinas Pendidikan (2025), dan Pemkab Banyumas (2025)			

A. Paradoks Pembangunan Manusia

Kabupaten Banyumas memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi (**74.52**), tertinggi di Barlingmascakeb. Namun, IPM ini berpotensi menyembunyikan **ketimpangan internal yang ekstrem** (Gini 0.603). Kontradiksi paling menonjol adalah fenomena **leaky pipeline pendidikan** (13.426 ATS) pada fase transisi jenjang menengah, yang disebabkan oleh **faktor ekonomi yang dominan**.

B. Erosi Solidaritas Sosial

Masyarakat pedesaan menunjukkan pergeseran pola solidaritas; nilai tradisional **gotong royong mulai memudar**, beralih ke kecenderungan

individualistis. Degradasi modal sosial ini disebabkan oleh munculnya **sifat ketergantungan** masyarakat terhadap bantuan material top-down yang disalurkan pemerintah pasca-pandemi, yang secara tidak sengaja **mendekapitalisasi solidaritas mekanik**.

C. Adaptasi dan Ketergantungan Migrasi

Dalam menghadapi kegagalan pasar kerja lokal, Banyumas menjadi salah satu daerah penghasil **Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar** di Jawa Tengah (16.824 PMI). Remitansi berfungsi sebagai "katup pengaman" sosial dan pendorong konsumsi, namun **tidak terbukti berdampak signifikan** terhadap penurunan tingkat kemiskinan karena sebagian besar digunakan untuk konsumsi.

III. Evaluasi Transformasi Budaya: Pelestarian dan Inovasi

Budaya Banyumas mencerminkan negosiasi intens antara nilai tradisional yang egaliter dan tekanan modernisasi.

Tabel Kontradiksi Antara Egalitarianisme Historis dan Ketimpangan Kontemporer

Dimensi	Nilai Historis (Abad ke-16)	Realitas Kontemporer (Pasca-1998)	Kontradiksi Kritis
Karakter Sosial	Cablaka (ket erusterangan) sebagai anti tesis feodalisme dan kritik sosial yang aman.	Terjebak dalam stratifikasi spasial; potensi Ko efisien Gini ekstrem (estimasi studi hingga 0.603).	Semangat wong cilik yang egaliter dihancurkan oleh ketidakadilan struktural dan

Dime nsi	Nilai Historis (Abad ke- 16)	Realitas Kontempo rer (Pasca- 1998)	Kontradik si Kritis
			polarisasi urban.
Pend idika n	Egalitarianis me gender dalam investasi pendidikan.	Fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) 13.426 anak, diakui Dinas Pendidikan didominasi faktor ekonomi.	IPM Banyumas yang tinggi (74.52) berpotensi menyembu nyikan lea ky pipeline pe ndidikan massal pada jenjang menengah.

Dimensi	Nilai Historis (Abad ke-16)	Realitas Kontemporer (Pasca-1998)	Kontradiksi Kritis
Solidaritas	Basis keluarga inti dan solidaritas kolektif (gotong royong).	Erosi gotong royong , beralih ke kecenderungan individualistik. Degradasi modal sosial akibat sifat ketergantungan pada bantuan material top-down pasca-krisis.	Solidaritas yang dulunya bersifat mekanik (senasib sepenanggungan) terdekompilalisasi oleh intervensi negara.

Dimensi	Nilai Historis (Abad ke-16)	Realitas Kontemporer (Pasca-1998)	Kontradiksi Kritis
Sumber Data/Literasi: Disintesis dari studi kualitatif dan kuantitatif (Priyadi, 2007; Hariadi et al., 2009; Dinas Pendidikan, 2025; Firmansyah et al., 2022)			

A. Revitalisasi Linguistik (Ngapak)

Dialek Ngapak, yang secara historis marjinal, kini mengalami **kebangkitan di ruang digital** (YouTube, TikTok). Media digital menjadi arena demokratisasi yang **melewati hegemoni Mataraman**. Ngapak telah bertransformasi menjadi **identitas gaya hidup** dan **produk komersial** (misalnya dalam lirik musik), membuktikan resiliensi dan kemampuan negosiasi identitas di tengah globalisasi.

B. Komodifikasi Seni Tradisi

Seni pertunjukan (Lengger, Calung, Ebeg) menghadapi krisis regenerasi, meresponsnya dengan **rekayasa fungsional**. Fungsi Lengger bergeser dari **sakral** menjadi **profan, estetik, dan komoditas pariwisata**. Komodifikasi ini didukung oleh inovasi, seperti **Calengsai** (Calung, Lengger, Barongsai), yang dikemas untuk pasar. Pemerintah daerah mendukung profesionalisasi melalui inisiatif **Kartu Seniman** dan peran SMK Negeri 3 Banyumas sebagai garda konservasi formal.

IV. Pelajaran dari Sejarah: Membangun Masa Depan dari Masa Lalu

a) Kedaulatan Ekonomi

Ketergantungan berlebihan pada satu komoditas ekspor tunggal (tebu) menyebabkan kehancuran saat **Krisis Malaise 1930-an**. Pelajaran ini menekankan perlunya **diversifikasi ekonomi** dan penguatan UMKM sebagai penyangga ketahanan.

b) Otonomi dan Akuntabilitas

Semangat adoh ratu (jauh dari raja/kontrol pusat) dan kritik Cablaka harus diinternalisasi menjadi **otonomi fiskal yang kuat** (mengatasi Kemandirian Keuangan Rendah) dan tata kelola yang transparan, menolak model sentralistik yang hanya menguntungkan *Growth Pole*.

c) Pembangunan Manusia Inklusif

IPM yang tinggi harus disertai resolusi **kemiskinan struktural** (Gini tinggi) yang menyebabkan 13.426 ATS. Investasi pendidikan yang egaliter secara gender harus dipertahankan, namun harus mengatasi opportunity cost ekonomi yang menyebabkan putus sekolah.

V. Kekurangan dan Keberhasilan: Analisis SWOT Historis

Analisis SWOT historis (Abad ke-16 hingga Kontemporer) menyimpulkan kontestasi internal dan eksternal yang membentuk Banyumas saat ini.

Tabel Analisis SWOT Historis: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Dinamika Banyumas

Dimensi	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
Ekonomi	Fondasi pe- tani merdeka. L PE 5.19%. Ind	Lonjakan Gini Ratio 0.397. K erentan	Kawasan Industri 1.400- 1.500	Pertumbuhan Non- Inklusi f. Penc

Di me nsi	Kekuatan (Strength)	Kelema han (Weakness)	Peluan g (Opportunity)	Ancam an (Threat)
	ustri Pengolaha n Prospektif. UMKM (Non- LKPM) kuat.	an Fiskal Tinggi. Warisa n Mond ok.	Ha menya mbut Tol. Ek spor ni che (Gu la Kelapa) .	emara n DAS Serayu (COD 62,52 mg/L). Kesen jangan Digital UMKM .
So sia l	IPM Tinggi 74.52. Aks es SD Universal (99.96%). Karakter C	Ketimp angan Spasial Akut (Polaris asi Purwok	LSM sebagai substit usi fungsio nal. Mo dal	Keterg antung an Remit ansi PMI. K esenja

Di me nsi	Kekuatan (Strength)	Kelema han (Weakness)	Peluan g (Opportunity)	Ancam an (Threat)
	ablaka (Jiwa Kritis).	erto). Leaky Pipeline (13.426 ATS). Erosi Gotong Royong.	kultural egalitarianisme gender.	ngan Penderitaan Ekstrem (Gini 0.603 estimasi).
Budaya	Ngapak sebagai Cultural Comeback di Digital. Resiliensi Seni Tradisi (Lengger,	Krisis regenerasi seni.	Komodifikasi Budaya (Calengsai) sebagai aset pariwisata. Pe	Homonisasi Budaya Global (Western Food).

Di me nsi	Kekuatan (Strength)	Kelema han (Weakn ess)	Peluan g (Oppor tunity)	Ancam an (Threa t)
	Ebeg). Pro gram Kartu Seniman.		ndidika n Formal sebagai konser vasi (SMKN 3).	Ancam an terhad ap otentis itas rituali stik.
Sumber Data/Literasi: Disintesis dari laporan BPS (2023), Jurnal Akademik, dan Pemkab Banyumas (2025)				

VI. Refleksi Evaluasi Menyeluruh: Narasi Besar Banyumas

Narasi besar sejarah Banyumas adalah kisah **Paradoks Egalitarianisme di Tengah Polarisasi**

Spasial. Identitas luhur wong Banyumas yang egaliter (Cablaka) secara ironis telah dikepong oleh ketimpangan struktural dan spasial yang persisten. [1, 1] Keberhasilan pembangunan makro diimbangi oleh kegagalan dalam mengatasi masalah **Gini Ratio yang lonjakannya tajam** dan **erosi modal sosial** di pedesaan.

Jalan ke depan bagi Banyumas harus berfokus pada **inkluisivitas spasial** dan **penguatan otonomi fiskal** melalui:

- a) **Industrialisasi yang Inklusif:** Memastikan Kawasan Industri yang disiapkan menggunakan tenaga kerja lokal secara maksimal untuk menekan Gini Ratio.
- b) **Resolusi Struktural ATS:** Mensinergikan program ATS dengan dukungan bersyarat finansial (misalnya PKH) untuk menghilangkan opportunity cost ekonomi yang menjadi penyebab utama putus sekolah.
- c) **Rehabilitasi Solidaritas:** Merancang ulang bantuan sosial agar bersifat **partisipatif**, mengubah penerima bantuan menjadi subjek aktif dalam pemberdayaan untuk merehabilitasi semangat gotong royong.

Maka, masa depan Banyumas terletak pada keberhasilannya **memenangkan kembali semangat Cablaka dan keadilan wong cilik dari cengkeraman ketimpangan struktural yang diwariskan sejarah.**

BAB 12

Gagasan untuk Pembangunan Ekonomi Banyumas di Masa Depan Cetak Biru Menuju Pembangunan Inklusif dan Berbasis Kultural

I. Diagnosis Struktural dan Warisan Pembangunan Banyumas

A. Warisan Konflik Pembangunan: Dari Otonomi Agraria ke Ketimpangan Urban Kontemporer

Perencanaan pembangunan ekonomi Banyumas di masa depan harus didasarkan pada diagnosis struktural yang jujur mengenai warisan sejarah yang membentuk struktur ekonomi kontemporer. Banyumas memiliki latar belakang historis yang unik sebagai *Mancanegara Kilèn* (wilayah terluar bagian barat) dari Kerajaan Mataram. Status ini, yang diinternalisasi menjadi filosofi *perek watu adoh ratu* (dekat dengan alam dan jauh dari raja), memberikan otonomi relatif. Otonomi ini diperkuat oleh basis ekonomi agraria yang egaliter dan mandiri. Secara historis, sekitar 78% lahan dikelola langsung oleh petani (dibandingkan 35% di pusat Mataram) dan sistem bagi hasil

Perlimaan pra-kolonial memberikan 40% hasil panen kepada petani penggarap. Kemandirian finansial dan sosial ini menjadi fondasi bagi budaya egaliter yang dikenal sebagai *Cablaka* (keterusterangan dan kejujuran).

Namun, fondasi egaliter ini mulai tergerus oleh *Legacy Polarisasi Spasial* yang diintensifkan sejak intervensi kolonial (melalui *Cultuurstelsel*) dan Orde Baru (melalui *Developmentalism*). Kebijakan sentralistik ini secara efektif mentransformasi Banyumas dari ekonomi agraria independen menjadi sistem ekstraktif yang terpusat di Purwokerto, yang diangkat sebagai *growth pole* (kutub pertumbuhan) regional.

Pada periode kontemporer, Banyumas menunjukkan *Paradoks Makroekonomi* yang mencolok. Kabupaten ini mencatat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) rata-rata impresif sebesar 5,19% dari tahun 2005 hingga 2022 (Dinas Kominfo, 2023). Meskipun pertumbuhan agregat kuat, analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan dominasi Sektor Tersier (Jasa, Perdagangan, Konstruksi), yang mencapai 53,46% dari total PDRB (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023; BPS Banyumas, 2014). Pertumbuhan ini didorong oleh proyek pembangunan dan *spending* domestik (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023).

Fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah *Krisis Inklusivitas*, yang ditandai oleh *decoupling* antara pertumbuhan tinggi dan penurunan kemiskinan (Dinas Kominfo, 2023). Hal ini diperkuat oleh lonjakan tajam Koefisien Gini yang mencapai **0.397 pada tahun 2023** (BPS Jawa Tengah, 2024), yang sangat mendekati ambang batas ketimpangan tinggi (0.400). Ketimpangan struktural ini diperkuat oleh Kemandirian Keuangan Daerah yang masih **rendah** (ditunjukkan oleh Rasio Ketergantungan yang sangat tinggi pada transfer pusat) (Fadilah Fitri, 2025). Keterbatasan fiskal daerah membatasi kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merencanakan intervensi jangka panjang yang diperlukan untuk mengatasi Gini Ratio tanpa bergantung pada persetujuan dari pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi kontemporer yang ada, yang menghasilkan Gini Ratio tinggi, bertentangan dengan warisan kultural Banyumas yang egaliter (Priyadi, 2007; Wibowo & Mulyani, 2022).

B. Hambatan Struktural Kunci Menuju Pembangunan Inklusif

Terdapat tiga hambatan struktural yang harus diatasi untuk menjamin pembangunan yang adil dan merata di Banyumas.

Pertama, *Erosi Sektor Primer dan Konflik Lahan* menimbulkan ancaman ganda. Sektor pertanian terus menunjukkan tren penurunan kontribusi PDRB (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023), diperparah oleh laju konversi lahan sawah rata-rata **112 hektar per tahun** (Sukardi, 2015; Taufiqurrachman & Jayadi, 2023). Laju konversi ini secara langsung mengancam ketahanan pangan lokal, apalagi mengingat sektor pertanian merupakan basis ekonomi bagi masyarakat *wong cilik* yang merupakan warisan egaliter Banyumas (Priyadi, 2007). Selain itu, industrialisasi dan urbanisasi yang cepat telah meninggalkan biaya ekologis yang besar, dibuktikan dengan tingginya pencemaran Sungai Serayu; analisis kualitas air menunjukkan rata-rata *Chemical Oxygen Demand* (COD) sebesar 62,52 mg/L, jauh melampaui baku mutu yang ditetapkan (25 mg/L) (Lestari et al., 2023).

Hambatan kedua adalah *Isu Modal Manusia* atau *leaky pipeline* pendidikan. Meskipun IPM Banyumas termasuk "Tinggi" (74.52) dan akses pendidikan dasar (APS SD) hampir sempurna (99.96%) (Prasetyo et al., 2024), terdapat masalah signifikan pada jenjang menengah ke atas. Sebanyak **13.426 anak** tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2025). Fenomena ATS ini adalah manifestasi ekonomi dari

kemiskinan struktural. Tingginya *opportunity cost* (biaya kesempatan) sekolah pada jenjang menengah membuat keluarga miskin menarik anak mereka ke sektor kerja informal. Ini mengindikasikan bahwa Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (SIPATAS) harus disinergikan dengan transfer bersyarat (seperti Program Keluarga Harapan/PKH) untuk meniadakan beban ekonomi biaya kesempatan tersebut (Prastyanti & Nunn, 2023).

Hambatan ketiga adalah *Kesenjangan Adopsi Digital* (*Digital Divide*). Fondasi TIK di Banyumas sudah sangat kuat (100% menggunakan fiber optik) (RRI Purwokerto, n.d.), namun adopsi digital oleh UMKM sangat rendah; hanya **5.400 dari 90.000 UMKM** yang telah *go digital*. Kesenjangan ini bukan masalah infrastruktur keras, melainkan masalah *kapasitas* (literasi dan keterampilan) (Wahyu Dewanto, 2024). Kesenjangan ini mengancam potensi UMKM untuk memanfaatkan pasar global, menghambat diversifikasi ekonomi, dan mengurangi daya saing lokal.

II. Modal Kultural dan Sosial sebagai Infrastruktur Lunak Ekonomi

Pembangunan yang berkelanjutan di Banyumas harus mengintegrasikan aset kultural yang unik ke dalam

strategi ekonomi sebagai infrastruktur lunak yang mendukung pertumbuhan inklusif.

A. Menghidupkan Kembali Filosofi Cablaka dan Egalitarianisme

Filosofi *Cablaka* (keterusterangan, kejujuran) yang berakar dari sejarah *Mancanegara Kilèn* harus diinternalisasi ke dalam tata kelola pemerintahan yang transparan. Secara kultural, nilai ini mendukung Egalitarianisme, yang terbukti dalam pola investasi pendidikan tanpa bias gender di pedesaan Banyumas. Keberlanjutan pola egaliter ini adalah modal kultural yang mempercepat kesuksesan ekonomi modern dengan menghasilkan basis SDM yang merata dan luas (Wibowo & Mulyani, 2022).

Namun, terjadi *Erosi Solidaritas Sosial*. Pola *gotong royong* tradisional di pedesaan memudar, digantikan oleh individualisme dan **sifat ketergantungan** terhadap bantuan material *top-down* pasca-krisis (Firmansyah et al., 2022). Erosi ini mengancam resiliensi sosial jangka panjang. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus didesain ulang dari transfer material murni menjadi program berbasis partisipasi. Program bantuan harus didesain ulang untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proyek pemberdayaan komunal atau

BUMDes. Nilai *Cablaka* (kejujuran) dapat menjadi landasan moral untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi, merehabilitasi semangat *gotong royong* yang memudar (Priyadi, 2007).

B. Komodifikasi Seni dan Budaya dalam Ekonomi Kreatif

Aset kultural Banyumas dapat menjadi *driver* utama dalam sektor Ekonomi Kreatif yang sudah dominan. Kesenian Lenggèr, Calung, dan Ebeg bertahan di tengah disrupsi media digital (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013) melalui transformasi fungsional: dari sakral/ritualistik menjadi profan/estetik, dan melalui akulturasi (misalnya *Calengsai*). Seni yang terkomodifikasi ini berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pariwisata (Rp 44,47 miliar, 6,38% dari PAD 2022) (Susanto, 2023).

Pemerintah Daerah telah menunjukkan dukungan melalui penerbitan **Kartu Seniman**. Kebijakan ini harus diperluas menjadi *profesionalisasi digital-kultural* untuk *content creator* dan seniman digital yang menggunakan Dialek Ngapak. Dialek Ngapak sendiri telah mengalami *cultural comeback* dari stereotip marginalisasi menjadi simbol kebanggaan di media digital, bertransformasi menjadi identitas gaya hidup dan produk komersial.

Formalisasi karier di ranah digital akan mengatasi krisis regenerasi kultural dan memastikan modalitas Ngapak menjadi produk komersial yang stabil dan menarik bagi generasi muda.

Selain itu, kuliner lokal (Tempe Mendoan, Soto Sokaraja) yang menghadapi ancaman homogenisasi budaya makanan *western* (Susanto, 2019) harus dilindungi. Pengajuan **Indikasi Geografis (GI)** atau Hak Kekayaan Intelektual (HAI) untuk Tempe Mendoan dan Gula Kelapa harus diprioritaskan (Susanto, 2019). Upaya ini akan meningkatkan *branding* dan nilai jual kuliner lokal sebagai aset budaya ekonomi, sejalan dengan keberhasilan ekspor gula kelapa BUMDes Langgongsari (Santoso, 2025; LPEI, 2023).

III. Pilar Transformasi Strategis (Visi Banyumas 2045)

A. Industrialisasi Inklusif dan Keadilan Spasial

Strategi masa depan harus fokus pada diversifikasi dengan mendorong sektor **Industri Pengolahan**, yang diklasifikasikan sebagai **Non-Basis (LQ 0.97)** tetapi **Sangat Prospektif (DLQ 6.12)**. Sektor ini adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada sektor jasa yang berisiko stagnan dan mitigasi utama lonjakan Gini Ratio.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyiapkan kawasan industri seluas **1.500 hektar** untuk menyambut

Jalan Tol Pejagan–Cilacap (Kompas, 2025; Comission, 2016). Kawasan industri ini harus diposisikan sebagai **katup mitigasi utama** terhadap Gini Ratio 0.397 (BPS Jawa Tengah, 2024). Industrialisasi massal akan menciptakan lapangan kerja formal yang diatur UMR, menyerap tenaga kerja terpinggirkan dari sektor pertanian dan migrasi sirkular (Taufiqqurrachman & Jayadi, 2023; T Sukardi, 2015).

Untuk memastikan inklusivitas, *Kebijakan Afirmatif Tenaga Kerja Lokal* harus diterapkan, mewajibkan persentase penyerapan tenaga kerja lokal yang tinggi (Pemkab Bekasi, 2025; IMIP, 2025). Program pelatihan *skill* gratis harus disinkronkan dengan kebutuhan Kawasan Industri untuk memastikan lulusan lokal siap mengisi posisi teknis. Kegagalan dalam hal ini akan memperburuk ketimpangan upah dan mengulang konflik sosial kota-desa yang diwariskan Orde Baru (T Sukardi, 2015).

Selain itu, *Industrialisasi Berbasis Lingkungan* adalah wajib. Alokasi industri harus ketat terhadap Perda LP2B (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013) dan harus mengadopsi model *Smart-Green Industrial Cluster* (Taufiqqurrachman & Jayadi, 2023). Hal ini memerlukan sistem pengolahan limbah tertutup untuk mencegah pencemaran DAS Serayu (COD tinggi) (Lestari et

al., 2023), menandai pergeseran moral dari model eksploitatif menuju pembangunan berkelanjutan.

B. Akselerasi Ekonomi Digital Berbasis UMKM dan Ekspor *Niche*

Meskipun TIK sudah 100% fiber optik, *Kesenjangan Adopsi Digital* oleh UMKM tetap menjadi masalah. Kebijakan harus beralih dari membangun infrastruktur keras ke **membangun literasi digital fungsional**. Fokus intervensi harus pada pelatihan intensif untuk memastikan UMKM mampu bertransaksi dan memasarkan produknya secara daring, jauh melampaui angka 5.400 saat ini (Wahyu Dewanto, 2024), sehingga modal domestik lokal (Non-LKPM tinggi) dapat mencapai pasar global.

Di sisi finansial, *Transformasi Remitansi Menjadi Modal Produktif* harus dipacu. Ketergantungan pada remitansi PMI yang saat ini digunakan dominan untuk konsumsi (mendorong sektor perdagangan yang *Tidak Prospektif*) harus diubah. Diperlukan sosialisasi dan skema kemitraan yang mengarahkan dana PMI ke **investasi produktif**, misalnya melalui penyertaan modal di BUMDes yang berorientasi ekspor (gula kelapa Langgongsari) (Santoso, 2025; LPEI, 2023). Langkah ini mengubah "katup pengaman sosial" menjadi "sumber modal pembangunan."

IV. Agenda Kebijakan Jangka Panjang dan Tata Kelola Adaptif

A. Reformasi Fiskal dan Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah yang Rendah mengharuskan *Optimalisasi PAD Berbasis Data*, terutama dari sektor Unggulan (Konstruksi dan Jasa). Selain itu, *Kebijakan Fiskal Diferensial* harus diterapkan, memberikan keringanan pajak bagi investor yang menanam modal di Kawasan Industri 1.500 Ha di wilayah pinggiran (Kompas, 2025). Insentif ini secara fiskal akan menyeimbangkan ketidakmerataan yang diwariskan dan mendorong penyebaran investasi di luar *growth pole* perkotaan Purwokerto.

B. Tata Kelola Adaptif (*Agile Governance*) dan Keadilan Sosial

Konsep *Smart City* Banyumas dengan *agile governance* harus diperluas untuk mengatasi kesenjangan sosial. Program **SIPATAS** (Anak Tidak Sekolah) (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2025) harus diubah menjadi intervensi ekonomi terpadu yang memberikan dukungan finansial bersyarat (sinergis dengan PKH), menghilangkan beban *opportunity cost* sekolah bagi keluarga miskin.

Untuk mengatasi *dependency factor* dan merehabilitasi modal sosial, *Desain Ulang Bantuan Sosial Berbasis Partisipasi* wajib dilakukan. Program bantuan harus mewajibkan partisipasi aktif penerima dalam proyek pemberdayaan komunal, memanfaatkan nilai *Cablaka* dan *gotong royong* untuk mengubah penerima bantuan menjadi subjek aktif pembangunan.

Terakhir, *Integrasi Budaya dalam Tata Ruang (Placemaking)* harus diterapkan. Desain ruang publik dan infrastruktur harus secara eksplisit memfasilitasi penguatan GI/HAI kuliner lokal dan menggunakan budaya sebagai infrastruktur lunak yang esensial (Metro Jateng, 2025), memastikan bahwa pembangunan fisik modern tetap berkarakter.

V. Tabel Kunci Strategis untuk Pembangunan Masa Depan Banyumas

Tabel Kunci 1: Model Pengembangan Kawasan Industri Inklusif Banyumas (Studi Kasus 1.500 Ha)

Fokus Strategis	Keterkaitan Infrastruktur Kritis	Kebijakan Mitigasi Ketimpangan Spasial	Indikator Keberhasilan Kritis
Industri Pengolahan (Transformasi DLQ 6.12) (Taufiqqurrachman & Jayadi, 2023)	Tol Pejagan–Cilacap, Cilacap Port Logistik (Kompas, 2025; Comission, 2016)	Afirmatif Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Maksimal (Pemkab Bekasi, 2025; IMIP, 2025)	Persentase Serapan Lulusan SMK/PT Lokal, Penurunan TPT (Taufiqqurrachman & Jayadi, 2023)
Industri Hijau/Agroindustri Berkelanjutan	Jaringan Fiber Optik 100% (RRI Purwokerto, n.d.), <i>Supply Chain</i> Regional	Insentif Fiskal Diferensial (Area Pinggiran) (Jurnal Perencanaan Wilayah	Penurunan Gini Ratio Spasial, Peningkatan PAD

Fokus Strategis	Keterkaitan Infrastruktur Kritis	Kebijakan Mitigasi Ketimpangan Spasial	Indikator Keberhasilan Kritis
		dan Kota, n.d.)	
Perlindungan Lingkungan (DAS Serayu)	Penegakan Perda LP2B dan RPPLH Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013)	Audit Lingkungan Wajib dan Sanksi Berat (Baku Mutu COD/DO) (Lestari et al., 2023)	Kualitas Air DAS Serayu di Bawah Baku Mutu (25 mg/L) (Lestari et al., 2023)

Tabel Kunci 2: Matriks Sinergi Ekonomi Kultural dan Dukungan Kelembagaan

Aset Kultural/Sosial Kunci	Tantangan Struktural yang Diidentifikasi	Strategi Komodifikasi dan Restorasi Inklusif	Dukungan Kelembagaan Kritis
Nilai <i>Cablaka</i> / Egaliterisme (Priyadi, 2007; Wibowo & Mulyani, 2022)	Kebocoran Pendidikan (ATS 13.426) (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2025)	Eliminasi <i>Opportunity Cost</i> Sekolah (SIPATAS sinergis PKH) (Prastyanti & Nunn, 2023)	Dinas Pendidikan, Kemensos (PKH)
Dialek Ngapak / Seni Tradisi	Kesenjangan Digital UMKM	Pelatihan Literasi Kritis,	IT Telkom, Pemda (DPMPTSP/Diskominfo)

Aset Kultural/Sosial Kunci	Tantangan Struktural yang Diidentifikasi	Strategi Komodifikasi dan Restorasi Inklusif	Dukungan Kelembagaan Kritis
(Calung, Lengger) (Tjaturrini et al., 2022)	(5.400 <i>go digital</i>) (Wahyu Dewanto, 2024)	Kartu Seniman Digital (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.)	
Gastronomi Lokal (Mendoan, Soto Sokaraja) (Susanto, 2019)	Erosi Solidaritas (<i>Dependency Factor</i>) (Firmansyah et al., 2022)	Pengajuan Indikasi Geografis (GI) & Desain Ulang Bantuan Berbasis Partisipasi	BUMDes/LSM (Substitusi Fungsional), Dinas Perindag

VI. Penutup: Deklarasi Banyumas Berkeadilan (*Cablaka*, Inklusif, dan Tangguh)

Visi pembangunan Banyumas di masa depan harus merupakan Deklarasi Berkeadilan yang secara tegas menolak pengulangan kesalahan sentralisasi masa lalu (T Sukardi, 2015). Deklarasi ini menuntut tiga komitmen utama:

1. Menginternalisasi Nilai Historis

Menggunakan kejujuran dan keterusterangan *Cablaka* sebagai landasan tata kelola yang transparan. Ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak menyembunyikan ketidakadilan, sekaligus merehabilitasi modal sosial *gotong royong* melalui partisipasi aktif masyarakat.

2. Menciptakan Keadilan Spasial

Memastikan bahwa investasi infrastruktur dan industrialisasi massal (Tol dan Kawasan Industri 1.500 Ha) berfungsi sebagai alat redistribusi, mengakhiri warisan polarisasi Purwokerto sebagai *growth pole* yang eksklusif. Keadilan spasial dicapai dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang diiringi dengan peningkatan *skill* untuk memerangi Gini Ratio dan kemiskinan struktural.

3. Mengelola Globalisasi secara Selektif

Memanfaatkan fondasi digital yang kuat untuk memberdayakan UMKM dan memperkuat aset kultural seperti Ngapak dan kuliner lokal melalui formalisasi

(GI/HAI). Globalisasi harus menjadi sarana untuk mempertahankan dan mempromosikan identitas Banyumas yang unik, bukan menggerusnya.

Visi Banyumas 2045 harus menjadi model pembangunan yang *Inklusif, Industri Hijau, dan Tangguh*, di mana capaian makroekonomi secara kausal berkorelasi signifikan dengan penurunan ketimpangan struktural dan penguatan resiliensi kultural.

BAB 13

Gagasan untuk Pengembangan Sosial dan Budaya Banyumas di Masa Depan

I. Paradoks Banyumas di Abad ke-21

Pengembangan Banyumas di masa depan harus didasarkan pada diagnosis kritis terhadap kontradiksi struktural yang muncul dari sejarah panjangnya. Secara makro, wilayah ini menampilkan kinerja agregat yang impresif, namun secara mikro, ketidakadilan spasial dan sosial-ekonomi yang mendalam membayangi kemajuan tersebut. Pemahaman terhadap dinamika ini adalah kunci untuk merumuskan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, berlandaskan pada jati diri kulturalnya yang unik.

A. Fondasi Kultural Jati Diri: Cablaka, Egalitarianisme, dan *Local Genius* Banyumas

Jati diri *wong Banyumas* terukir kuat dari posisi geopolitik historisnya sebagai *Mancanegara Kilèn* (wilayah terluar bagian barat Mataram). Marginalitas ini menciptakan filosofi *perek watu adoh ratu* (dekat alam, jauh

dari raja), yang secara kausal melahirkan otonomi sosial-ekonomi dan egalitarianisme budaya (Priyadi, 2007; Purwoko, 2017). Fondasi ini menghasilkan nilai inti *Cablaka*, yaitu keterusterangan yang lugas, jujur, dan tanpa basa-basi (*thokmelong*).

Cablaka memiliki fungsi ganda yang vital: pertama, sebagai penanda kejujuran kolektif yang merupakan antitesis terhadap etiket feodal *ethok-ethok* Keraton; kedua, sebagai mekanisme kritik sosial yang aman, memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara jujur kepada penguasa tanpa dikenai sanksi formal. Nilai filosofis ini harus diangkat dari sekadar identitas kultural menjadi etika birokrasi dan tata kelola di masa depan, mendorong transparansi radikal untuk melawan mentalitas birokrasi yang kaku (Priyadi, 2007).

Sikap egaliter Banyumas juga berfungsi sebagai modal kultural yang mendukung kesuksesan modern. Secara historis, egalitarianisme terbukti dalam struktur ekonomi agraris pra-kolonial di mana petani menguasai 78% lahan, menghasilkan basis *petani merdeka* yang mandiri (Sukardi, 2015). Di era modern, egaliterianisme terwujud dalam investasi pendidikan. Keluarga di pedesaan Banyumas relatif tidak membedakan alokasi sumber daya pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan (Wibowo

& Mulyani, 2022). Fenomena ini secara kultural menjamin basis Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih luas dan merata, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dalam menghadapi tantangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Resiliensi budaya juga terlihat dalam dinamika linguistik. Dialek Ngapak, yang selama puluhan tahun menghadapi marginalisasi dan stereotip negatif di media nasional (sering dilabeli "kasar" atau "kampungan" akibat hegemoni dialek Mataraman) (Subchan, n.d.), kini mengalami kebangkitan yang heroik. Media digital telah menjadi arena demokratisasi linguistik bagi Ngapak, mengubahnya menjadi simbol kebanggaan dan identitas yang dijunjung tinggi oleh generasi muda (Subchan, n.d.; Nugroho & Kusuma, 2023).

B.Ironi Pembangunan: Keunggulan IPM Regional Menutupi Ketimpangan Ekstrem

Secara agregat, Kabupaten Banyumas menampilkan kinerja pembangunan manusia yang kuat. Wilayah ini mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di kawasan Barlingmascakeb dengan nilai 74.52, dan rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5.19% dalam periode 2005 hingga 2022 (Prasetyo et al., 2024; Dinas Kominfo, 2023). Capaian ini menunjukkan investasi yang

berhasil dalam modal manusia dan resiliensi ekonomi yang tangguh, bahkan setelah dihantam krisis global.

Namun, IPM yang tinggi ini dianggap sebagai "rata-rata yang menyembunyikan ketimpangan ekstrem" (Prasetyo et al., 2024). Keberhasilan IPM dan pertumbuhan PDRB yang terjadi cenderung terkonsentrasi pada segmen populasi urban yang makmur, terutama di Purwokerto. Kesenjangan struktural ini tercermin dari lonjakan Gini Ratio yang mengkhawatirkan hingga **0.397** pada tahun 2023, angka yang sangat mendekati ambang batas ketimpangan tinggi (0.400) (BPS Jawa Tengah, 2024). Penelitian akademis terdahulu bahkan mencatat Koefisien Gini ekstrem 0.603 (Pramono Hariadi et al., 2009).

Perekonomian Banyumas juga memiliki struktur yang rentan, didominasi oleh Sektor Tersier (Jasa, Perdagangan, Transportasi) yang menyumbang 53.46% PDRB (BPS Banyumas, 2014). Sementara sektor Industri Pengolahan diklasifikasikan sebagai *prospektif* (memiliki potensi pertumbuhan cepat, DLQ 6.12) namun masih *non-basis* (kontribusi LQ 0.97) (Taufiqqurrachman & Jayadi, 2023). Kondisi ini berarti pertumbuhan saat ini masih rapuh dan belum didukung oleh basis produksi manufaktur yang kokoh.

Selain itu, Remitansi dari 16.824 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Banyumas (BP2MI Jawa Tengah, 2024) memang berfungsi sebagai katup pengaman sosial, tetapi dana ini sebagian besar dialokasikan untuk konsumsi. Pola konsumsi ini hanya mendorong sektor Perdagangan (yang *non-prospektif*) (Taufiqqurrachman & Jayadi, 2023) dan gagal mentransformasi remitansi menjadi modal investasi produktif yang dapat mengurangi kemiskinan secara struktural. Oleh karena itu, kebijakan masa depan harus berfokus pada keadilan distributif, bukan sekadar pertumbuhan agregat.

C. Konflik Spasial: Polarisasi Ekonomi Akibat *Growth Pole* Purwokerto

Warisan sejarah pembangunan sentralistik yang diintensifkan pada era Orde Baru meninggalkan jejak berupa ketidakpuasan politik dan ketidakadilan spasial (Setiawan & Pratiwi, 2024). Purwokerto telah lama berfungsi sebagai *growth pole* atau kutub pertumbuhan yang mempolarisasi kawasan, membatasi akses warga pinggiran ke infrastruktur, layanan, dan pekerjaan formal (Setiawan & Pratiwi, 2024).

Ketimpangan spasial ini memicu wacana politik penting di awal abad ke-21. Kajian pemekaran (2020) mengusulkan pemisahan Kabupaten Banyumas menjadi tiga

daerah otonom: Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Induk (berpusat di Sokaraja), dan Kabupaten Banyumas Barat (berpusat di Ajibarang) (Situmorang et al., 2020). Proposal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mendesentralisasi kegiatan ekonomi.

Urbanisasi cepat di Purwokerto, didorong oleh investasi dan properti, memicu konversi lahan sawah yang masif di desa-desa penyangga. Data menunjukkan rata-rata konversi lahan sawah mencapai 112 Ha per tahun antara 1990 hingga 2015 (Dinas Kominfo, 2023), sebuah tren yang mengancam ketahanan pangan lokal. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan kota-kota kecil (Ajibarang, Sokaraja, Cilongok, Kalibagor) (Wardana et al., 2024) harus diarahkan menjadi **pusat transformasi produksi ekonomi** aktif, bukan hanya kawasan pelayanan. Penguatan Ajibarang/Wangon sebagai pusat industri di barat harus memanfaatkan konektivitas strategis dengan Tol Pejagan-Cilacap dan Pelabuhan Cilacap (hanya 33 kilometer) (Kompas, 2025).

D. Krisis Modal Sosial dan Lingkungan: Ancaman Keseimbangan Manusia dan Alam

Di samping tantangan ekonomi dan spasial, Banyumas juga menghadapi krisis dalam modal sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam sektor sumber daya

manusia, terdapat kontradiksi mencolok: meskipun Angka Partisipasi Sekolah (APS) di jenjang SD hampir sempurna (99.96%) (Prastyanti & Nunn, 2023), tercatat 13.426 anak sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) (Kustantinah, 2025; Antara, 2024). Kebocoran pendidikan terjadi secara masif pada jenjang menengah (SMP/SMA/SMK) karena *opportunity cost* (kehilangan potensi pendapatan anak yang bekerja) menjadi faktor ekonomi yang dominan bagi keluarga miskin dan rentan (Kustantinah, 2025; Prastyanti & Nunn, 2023).

Krisis modal sosial tercermin dari memudarnya pola solidaritas masyarakat pedesaan. Nilai tradisional *gotong royong* mulai beralih menjadi kecenderungan individualistik, terutama dipicu oleh *dependency factor*—ketergantungan masyarakat pada bantuan material *top-down* yang disalurkan secara masif pasca-krisis (misalnya, selama penanganan Pandemi COVID-19) (Firmansyah et al., 2022). Intervensi sosial ke depan harus bergeser dari transfer material pasif menjadi program berbasis partisipasi aktif untuk merehabilitasi semangat komunal yang memudar.

Tantangan lingkungan yang paling mendesak adalah hutang ekologis yang diwariskan dari industrialisasi era Orde Baru. Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu tercemar

parah, dibuktikan dengan tingginya *Chemical Oxygen Demand* (COD) rata-rata 62.52 mg/L, jauh melampaui baku mutu 25 mg/L, dan rendahnya *Dissolved Oxygen* (DO) minimum 2.10 mg/L (Lestari et al., 2023). Pencemaran ini juga menjadi isu di sekitar calon kawasan industri Wangon (Widiyatno, 2019). Kegagalan mengelola lingkungan (Lestari et al., 2023) mengancam citra *Smart-Green Industrial Cluster* Wangon (Kompas, 2025). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang ketat mengenai *Green Infrastructure* dan *Circular Economy* (LCDI Indonesia, 2025) adalah prasyarat untuk investasi di masa depan.

Tabel I di bawah ini merangkum tantangan struktural yang dihadapi Banyumas dan implikasi kebijakan yang mendasar.

Table I. Sintesis Tantangan Struktural Kontemporer Banyumas dan Implikasi Kebijakan

Dimensi Kritis	Indikator Kunci (Basis Data)	Tantangan Utama	Implikasi Strategis (Masa Depan)
Kesenjangan Ekonomi	Gini Rasio (0.397 - 0.603)	Pertumbuhan tidak inklusif, polarisasi Purwokerto	Mendesentralisasi Investasi, pemerataan SDM

Dimensi Kritis	Indikator Kunci (Basis Data)	Tantangan Utama	Implikasi Strategis (Masa Depan)
Kapital Sosial	Erosi <i>Gotong Royong</i>	Ketergantungan pada bantuan (<i>dependency factor</i>)	Mendesain program bantuan berbasis partisipasi
Pendidikan	Anak Tidak Sekolah (ATS) 13.426	<i>Opportunity cost</i> sekolah jenjang menengah	Intervensi ekonomi terpadu (<i>SIPATAS Plus</i>)
Lingkungan	Pencemaran DAS Serayu (COD > 62 mg/L)	Industrialisasi yang mengabaikan biaya eksternal	Transisi menuju <i>Circular/Green Economy</i> dan Reklamasi
Sumber: BPS Jawa Tengah (2024); Pramono Hariadi et al. (2009); Firmansyah et al. (2022); Lestari et al. (2023); Kustantinah (2025); Antara (2024).			

II. Pilar I: Reformasi Tata Kelola dan Keadilan Spasial Berbasis Desentralisasi Investasi

Strategi pengembangan di masa depan harus secara eksplisit menargetkan de-polarisasi ekonomi Purwokerto, mewujudkan keadilan spasial, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

A. Peta Jalan Pemerataan Pembangunan Melalui Pengembangan Kota Kecil-Menengah

Untuk mengatasi ketimpangan spasial, diperlukan strategi fungsional yang mengubah kota-kota kecil dari sekadar kawasan pelayanan umum. Kota-kota kecil dan menengah (seperti Ajibarang, Sokaraja, Cilongok, dan Kalibagor) (Wardana et al., 2024) harus diarahkan menjadi **pusat transformasi produksi ekonomi** aktif, mampu menarik SDM lokal, dan menciptakan *multiplier effect* di kawasan penyangga (Wardana et al., 2024).

Kajian interaksi wilayah pada 2020 mengusulkan pembagian otonomi baru, di mana Kecamatan Ajibarang mewakili pusat pertumbuhan di Banyumas Barat, dan Kecamatan Sokaraja mewakili pusat pertumbuhan di Banyumas Induk (Situmorang et al., 2020). Penetapan Ajibarang dan Sokaraja sebagai pusat pertumbuhan sekunder dan spesialis akan menyeimbangkan dominasi Purwokerto. Logistik yang ditingkatkan melalui

pembangunan Tol Pejagan-Cilacap (Kompas, 2025) harus segera dimanfaatkan sebagai *leverage* untuk mendorong investasi di Kawasan Industri Wangon (dekat Ajibarang) (Kompas, 2025; Purwokertokita, 2025), menyediakan lapangan kerja formal yang masif di Banyumas Barat yang secara historis terpinggirkan.

B. Model Desentralisasi Investasi: Menetapkan Fungsi Khusus Pusat Pertumbuhan Baru

Model desentralisasi investasi memerlukan pembagian fokus yang jelas berdasarkan potensi regional.

Pertama, **Arah Investasi Banyumas Barat (Ajibarang/Wangon)** harus difokuskan untuk menarik sektor *Prospektif* (Industri Pengolahan) yang saat ini masih *Non-Basis* (Taufiqqurrachman & Jayadi, 2023). Wilayah ini strategis untuk pembangunan industri padat karya seperti garmen dan agroindustri (Purwokertokita, 2025). Pembangunan 1.500 Ha kawasan industri yang direncanakan (Kompas, 2025) harus didampingi oleh audit lingkungan ketat (Pilar IV) dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal yang terlatih.

Kedua, **Arah Investasi Banyumas Induk (Sokaraja/Kalibagor)** harus fokus pada penguatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Non-LKPM, yang menunjukkan resiliensi tinggi dengan lebih dari

6.000 unit usaha (DPMPSTSP Jawa Tengah, 2023). Sokaraja harus dikembangkan sebagai *hub* pengemasan, standarisasi *Good Manufacturing Practices* (GMP), dan logistik sekunder, khususnya untuk produk agroindustri ekspor unggulan seperti gula kelapa (LPEI, 2023).

Model ini didukung oleh kebijakan insentif diferensial. Wilayah pinggiran dan potensial (Ajibarang dan desa-desa) harus diberikan **bantuan keuangan dan keringanan pajak** untuk mengimbangi risiko infrastruktur, sementara Purwokerto, sebagai pusat utama, harus fokus pada peningkatan kemudahan akses layanan prima bagi investasi (Eprints Undip, n.d.).

C. Penguatan Otonomi Fiskal: Strategi Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Non-Transfer

Analisis kinerja keuangan daerah menunjukkan adanya kerentanan struktural, di mana Kabupaten Banyumas memiliki skor Kemandirian Keuangan Daerah yang masih *rendah*, dengan Rasio Ketergantungan Daerah yang *sangat tinggi* pada dana transfer dari pusat (Fadilah Fitri, 2025). Meskipun PAD Banyumas termasuk tinggi di Jawa Tengah, ia belum optimal (Purwanto & Mustakim, 2017; Fadilah Fitri, 2025). Ketergantungan ini membatasi kemampuan daerah untuk melaksanakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Strategi yang diperlukan adalah diversifikasi sumber PAD non-transfer. Fokus harus dialihkan dari pajak dan retribusi tradisional ke sektor-sektor yang dominan dalam PDRB, yaitu sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Susanto, 2023; T. et al., 2024). Kontribusi pariwisata pada tahun 2022 mencapai Rp 44,47 Miliar, setara dengan sekitar 6.38% dari total PAD (Susanto, 2023).

Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola aset pariwisata dan ekonomi kreatif secara profesional (T. et al., 2024). Penguatan peran BUMD ini akan memastikan bahwa hasil dari komodifikasi budaya dan pariwisata (Pilar III) dialirkan kembali ke kas daerah, bukan hanya dinikmati oleh pihak swasta semata. Diversifikasi ini adalah kunci untuk mencapai kemandirian fiskal yang utuh.

Table III. Model Desentralisasi Spasial Inklusif dan Pusat Pertumbuhan Baru Banyumas

Otonomi Regional (Visi Pemerataan)	Pusat Pertumbuhan (Model Interaksi)	Fungsi Utama yang Dikembangkan	Mekanisme Pemerataan
Kota Purwokerto	Purwokerto Timur/Utara	Jasa Premium, Pendidikan	Menjadi <i>Hub</i> untuk

Otonomi Regional (Visi Pemerataan)	Pusat Pertumbuhan (Model Interaksi)	Fungsi Utama yang Dikembangkan	Mekanisme Pemerataan
	(Situmorang et al., 2020)	Tinggi (UNSOED, IT Telkom), <i>Smart City</i> Inti	investasi vertikal dan <i>talent attraction</i>
Kab. Banyumas Induk	Sokaraja / Kalibagor (Situmorang et al., 2020)	Perdagangan Regional, UMKM, Agroindustri (Gula Kelapa), Logistik Sekunder	Menghubungkan produksi desa dengan pasar urban dan ekspor
Kab. Banyumas Barat	Ajibarang / Wangon (Kompas, 2025; Situmorang et al., 2020)	Industri Manufaktur (Garmen), Vokasi (BLKK), Logistik	Menciptakan lapangan kerja formal industri yang masif di wilayah pinggiran

Otonomi Regional (Visi Pemerataan)	Pusat Pertumbuhan (Model Interaksi)	Fungsi Utama yang Dikembangkan	Mekanisme Pemerataan
		Strategis (Tol/Cilacap)	
Sumber: Situmorang et al. (2020); Kompas (2025).			

III. Pilar II: Pengembangan Sumber Daya Manusia Inklusif dan Revolusi Vokasi

Tantangan struktural utama dalam pengembangan SDM adalah mengatasi krisis Anak Tidak Sekolah (ATS) dan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang relevan bagi pertumbuhan sektor industri prospektif.

A. Solusi Holistik untuk Krisis Anak Tidak Sekolah (ATS): Program SIPATAS Plus

Meskipun akses pendidikan dasar (SD) di Banyumas hampir sempurna (APS 99.96%) (Prastyanti & Nunn, 2023), kebocoran pendidikan yang menghasilkan 13.426 ATS (Kustantinah, 2025; Antara, 2024) mengindikasikan adanya krisis ekonomi struktural di jenjang menengah (SMP/SMA/SMK). Untuk mengatasi *leaky pipeline* ini, Program SIPATAS (Semangat Penanganan Anak Tidak

Sekolah) (Antara, 2024; Kustantinah, 2025) harus bertransformasi menjadi *SIPATAS Plus*.

SIPATAS Plus mensyaratkan intervensi ekonomi bersyarat (*Conditional Cash Transfer - CCT*). Program ini harus diintegrasikan secara fungsional dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Dukungan finansial bersyarat harus diberikan kepada keluarga yang memiliki ATS di jenjang menengah untuk secara eksplisit mengkompensasi *opportunity cost* kerja anak yang menjadi penyebab utama putus sekolah (Kustantinah, 2025; Prastyanti & Nunn, 2023). Selain itu, kolaborasi dengan akademisi (misalnya UNSOED) diperlukan untuk memetakan akar masalah ATS secara *case-by-case* (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2025), memastikan intervensi tepat sasaran dan mengurangi risiko kegagalan program. Program ini harus mencakup jalur non-formal (PKBM) yang setara bagi ATS dewasa, didukung oleh kurikulum vokasi spesifik (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2025).

B. Revitalisasi Pelatihan Vokasi untuk Menopang Sektor Industri Prospektif

Penguatan Revolusi Vokasi adalah kunci untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri yang baru dikembangkan. Kurikulum Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) harus disinkronkan secara ketat dengan

permintaan industri di Ajibarang/Wangon (Purwokertokita, 2025) dan kebutuhan pasar ekspor UMKM (LPEI, 2023). Hal ini mencakup pelatihan spesifik dalam bidang Garmen (untuk kawasan Wangon), *Packaging* Agroindustri (Gula Kelapa), dan E-Marketing (BLK Grobogan, 2025; Laboratorium Koperasi & UKM FEB UNSOED, 2024).

Pelatihan harus mencakup kompetensi ganda, yaitu kompetensi keras (teknik manufaktur, kualitas ekspor GMP) dan kompetensi lunak. Integrasi nilai kultural juga penting, memastikan tenaga kerja memiliki integritas dan etika kerja yang adaptif, misalnya dengan mengaplikasikan sifat *Cablaka* dalam negosiasi dan komunikasi kerja yang lugas.

C. Mengelola Migrasi Tenaga Kerja (PMI): Mentransformasi Remitansi dari Konsumsi menjadi Modal Investasi Produktif

Banyumas yang merupakan salah satu kontributor besar PMI (16.824 orang) di Jawa Tengah (BP2MI Jawa Tengah, 2024) harus mengubah fenomena remitansi dari sekadar pendorong konsumsi menjadi sumber modal investasi produktif. Remitansi sebagian besar digunakan untuk konsumsi (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023), yang hanya mendorong sektor Perdagangan (yang *Non-Prospektif*) (Taufiqurrachman & Jayadi, 2023), dan gagal mengurangi kemiskinan secara struktural.

Pemerintah daerah harus memfasilitasi skema investasi kolektif yang menarik bagi PMI (disebut *Remittance Investment Vehicles* atau RIV). Skema ini dapat dilakukan bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lokal, memungkinkan PMI dan keluarganya menanamkan dana remitansi ke BUMDes atau UMKM berbasis ekspor (misalnya gula kelapa) (Santoso, 2025; LPEI, 2023). Edukasi finansial harus dilakukan secara intensif, menggunakan bahasa yang lugas dan jujur (*Cablaka*) untuk membangun kepercayaan dan menggeser pola penggunaan dana dari konsumsi ke investasi produktif.

IV. Pilar III: Resiliensi Kultural dan Ekonomi Kreatif Berbasis Identitas Digital

Modal kultural Banyumas, yang dicirikan oleh *Cablaka*, egalitarianisme, dan dialek Ngapak, adalah aset ekonomi kreatif yang vital. Strategi pengembangan di pilar ini bertujuan untuk mengkapitalisasi aset tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan diversifikasi PAD.

A. Menginstitusionalisasi Kebangkitan Ngapak: Dari *Cultural Comeback* Menjadi *Digital Branding Regional*

Dialek Ngapak telah berhasil mengalami *cultural comeback* dari marginalisasi menjadi simbol kebanggaan

melalui ruang digital (Subchan, n.d.; Nugroho & Kusuma, 2023). Pemerintah daerah harus memanfaatkan momentum ini dengan menjadikan Ngapak sebagai *Digital Currency* dan *Branding* regional. Narasi *Ora Ngapak Ora Dupak* (Subchan, n.d.) dapat diangkat sebagai etos bisnis yang lugas dan dapat dipercaya, sejalan dengan nilai *Cablaka*.

Dukungan finansial Pemda (saat ini sekitar satu miliar rupiah per tahun untuk pembinaan seni) (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.) harus dialihkan sebagian dari fokus panggung fisik ke **produksi konten digital** berbahasa Ngapak yang memiliki potensi viral dan komersial (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.). Lebih lanjut, program Kartu Seniman (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.) perlu diperluas untuk mencakup perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digital bagi para *content creator* Ngapak (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.; DJKI, 2024; Amukti et al., 2023). Profesionalisasi ini, memanfaatkan kemudahan layanan digital DJKI (DJKI, 2025), akan menarik dan mempertahankan talenta muda yang menggunakan dialek lokal sebagai media mata pencaharian.

B. Strategi *Cultural Commerce* Jangka Panjang: Komodifikasi Seni Tradisi dan Perlindungan HKI

Seni pertunjukan tradisional seperti Lengger dan Ebeg harus bernegosiasi antara otentisitas ritualistik dan

tuntutan komersial modern (Tjaturrini et al., 2022). Kesenian yang telah dikomodifikasi dan diakulturasi, seperti *Calengsai* (perpaduan Calung, Lengger, dan Barongsai) (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013), adalah contoh nyata dari inovasi yang berhasil menjadi komoditas berorientasi pasar dengan nilai jual tinggi (Tjaturrini et al., 2022; Nafila, 2013).

Lembaga pendidikan formal, seperti SMK Negeri 3 Banyumas, harus dipertahankan sebagai garda terdepan untuk konservasi dan regenerasi, memastikan pewarisan elemen otentik (misalnya ritual *ndadi* Ebeg) (Pelestarian Calung Banyumasan, n.d.). Di sisi pariwisata, Desa Wisata (misalnya Pekunden) (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2023) harus dikembangkan dengan menonjolkan interaksi otentik dan lugas. Wisata berbasis nilai *Cablaka* dapat menjadi pembeda dari pariwisata Keraton yang formal, menjual kejujuran, kebersamaan, dan otentisitas pengalaman.

C. Perlindungan Aset Gastronomi: Mendorong Indikasi Geografis (IG) untuk Kuliner Khas

Globalisasi membawa ancaman homogenitas budaya makanan *western* yang serba cepat, menggeser minat generasi muda dari kuliner lokal (Susanto, 2019).

Kuliner khas Banyumas, seperti Tempe Mendoan dan Soto Sokaraja, adalah "artefak budaya hidup" (Susanto, 2019) yang perlu dilindungi.

Pemerintah daerah harus memprioritaskan pengajuan Indikasi Geografis (IG) untuk **Tempe Mendoan** dan **Soto Sokaraja** (Neliti, 2010; Skripsi, 2015; Indonesia.go.id, 2020). Langkah ini mutlak untuk mencegah klaim sepihak (seperti kasus merek Mendoan yang pernah didaftarkan oleh pihak lain) (Skripsi, 2015) dan menguatkan *branding* kuliner sebagai warisan budaya yang dilindungi secara hukum. Upaya ini harus didampingi oleh program literasi gastronomi di sekolah dan ruang publik untuk menanamkan nilai historis dan sosial kuliner lokal.

V. Pilar IV: Menuju Banyumas Hijau: Keberlanjutan Lingkungan dan *Circular Economy*

Pilar ini berfokus pada penyelesaian hutang lingkungan yang diwariskan dari model pembangunan ekstraktif dan memastikan bahwa industrialisasi di masa depan bersifat hijau dan berkelanjutan.

A. Strategi Reklamasi dan Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu

Tingkat pencemaran DAS Serayu (COD 62.52 mg/L) (Lestari et al., 2023) merupakan bukti kegagalan

pembangunan yang mengabaikan biaya eksternal. Perlu ditetapkan target ambisius, misalnya pada tahun 2045, untuk mengembalikan kualitas air DAS Serayu ke baku mutu ($\text{COD} < 25 \text{ mg/L}$).

Strategi yang diusulkan adalah mewajibkan adopsi teknologi *zero-waste* dan pengelolaan air tertutup bagi industri. Pada saat yang sama, investasi infrastruktur sanitasi komunal dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) regional harus diprioritaskan untuk mengurangi limbah rumah tangga, yang merupakan sumber utama pencemaran (Lestari et al., 2023). Inisiatif ini harus diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk pelestarian sumber daya air melalui penanaman pohon aren di kawasan DAS Serayu.

B. Mitigasi Krisis Pangan: Kebijakan Tegas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang masif (rata-rata 112 Ha/tahun) (Dinas Kominfo, 2023) merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan lokal. Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan perlindungan LP2B yang sangat ketat.

Disarankan penerapan *Land Conversion Offset Policy* yang mewajibkan kompensasi finansial atau fisik (pembukaan lahan baru atau peningkatan produktivitas di lahan lain) bagi setiap konversi lahan LP2B. Selain itu, perlu didorong penerapan teknologi irigasi presisi dan metode pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil di lahan yang tersisa, memastikan bahwa produksi pangan tetap kompetitif secara ekonomi dibandingkan dengan nilai properti yang tinggi.

C. Integrasi Infrastruktur Hijau dalam Pengembangan Kawasan Industri (Studi Kasus Wangon)

Visi pengembangan *Smart-Green Industrial Cluster* di Wangon (Kompas, 2025; Purwokertokita, 2025) tidak boleh hanya menjadi slogan, mengingat isu pencemaran di wilayah tersebut (Widiyatno, 2019). Pilar IV menuntut penegakan standar lingkungan yang ketat bagi Kawasan Industri Wangon seluas 1.500 Ha.

Setiap investasi harus diwajibkan menerapkan enam komponen keberlanjutan: (1) Pemanfaatan Energi Terbarukan, (2) Pengelolaan Air Tertutup, (3) Strategi *Zero-Waste* Limbah Industri, (4) Sertifikasi Lingkungan Wajib, (5) *Smart Monitoring* Transparansi Emisi, dan (6) Prioritas Pemanfaatan SDM Lokal Vokasional (Kompas, 2025; LCDI Indonesia, 2025). Kebijakan ini menginternalisasi biaya

lingkungan, memastikan bahwa industrialisasi tidak mengulangi model ekstraktif yang diwariskan dari era Orde Baru.

VI. Visi Akhir: Banyumas Emas Berjiwa Jujur 2045

A. Proyeksi Kualitas Hidup dan Keseimbangan Spasial

Banyumas harus menetapkan target kuantitatif yang jelas untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan pada tahun 2045. Target ini mencakup penurunan Gini Ratio ke level rendah (< 0.300) untuk mengatasi ketimpangan yang persisten, dan pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) universal di semua jenjang pendidikan, yang berarti eliminasi Anak Tidak Sekolah (ATS = 0) melalui program *SIPATAS Plus*.

Keseimbangan spasial harus dicapai melalui sinergi antara *Growth Pole* Purwokerto (sektor jasa premium, pendidikan) dengan pusat pertumbuhan produksi baru di Ajibarang (industri) dan Sokaraja (agroindustri/logistik). Keseimbangan ini akan menghasilkan ekonomi regional yang stabil, inklusif, dan didukung oleh kemandirian fiskal daerah (PAD yang dominan, Rasio Ketergantungan yang rendah).

Table II. Proyeksi Pengembangan Sektor Unggulan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Vokasi 2030

Sektor Unggulan (BPS Basis)	Status PDRB (LQ/DLQ)	Fokus Pengembangan Masa Depan	Kebutuhan Vokasi Kritis (Contoh)
Industri Pengolahan	Prospektif, Non-Basis (Taufiqqurrahman & Jayadi, 2023)	Kawasan Industri Wangon (Garmen/Agro industri)	Pelatihan <i>skill</i> manufaktur /teknisi 4.0, Kualitas Ekspor/Manajemen Rantai Pasok
Jasa Pariwisata & Kreatif	Dominan (53.46% PDRB) (BPS Banyumas, 2014)	Komodifikasi Budaya (Calengsai, Ngapak Digital), Pengembangan Desa Wisata	<i>Digital Marketing</i> , Pelatihan HKI, Pengelola Desa Wisata (Pokdarwis)
Pertanian/Agroindustri	Menurun (Ancaman Konversi)	Gula Kelapa Ekspor,	Standarisasi kualitas ekspor

Sektor Unggulan (BPS Basis)	Status PDRB (LQ/DLQ)	Fokus Pengembangan an Masa Depan	Kebutuhan Vokasi Kritis (Contoh)
	(BPS Banyumas, 2014; Dinas Kominfo, 2023)	Ketahanan Pangan (LP2B)	(GMP), Teknologi irigasi presisi, <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)
Sumber: Taufiqurrachman & Jayadi (2023); BPS Banyumas (2014); Dinas Kominfo (2023).			

B. Menjadikan Warisan *Cablaka* sebagai Fondasi Kepemimpinan Adaptif di Tengah Globalisasi

Jati diri Banyumas terbentuk dari kekuatan yang lahir dari marginalitas, mewariskan resiliensi kultural yang unik (Purwoko, 2017). Pengembangan Banyumas di masa depan menuntut kembalinya fondasi filosofis ini. Nilai *Cablaka* (keterusterangan dan kejujuran) (Priyadi, 2007), yang secara historis merupakan alat kritik sosial, harus diterjemahkan menjadi transparansi radikal dalam tata

kelola dan keberanian untuk mendesentralisasi kekuasaan ekonomi dari Purwokerto.

Dengan menjadikan *Cablaka* sebagai prinsip utama dalam birokrasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi kreatif digital, Banyumas dapat mengatasi ironi ketimpangan. Hal ini akan mewujudkan visi *Banyumas Emas Berjiwa Jujur 2045*: sebuah wilayah yang makmur dan inklusif, berdiri tegak di atas fondasi integritas struktural, dan tidak terperangkap oleh ilusi pertumbuhan yang terpusat dan tidak merata.

BAB 14

Kesimpulan

Kisah Banyumas, yang terentang sepanjang empat setengah abad, adalah narasi yang mendebarkan tentang kontestasi abadi antara jati diri yang luhur dan tekanan struktural yang brutal. Evaluasi menyeluruh ini menyimpulkan bahwa identitas inti *wong Banyumas* terbentuk oleh **Paradoks Egalitarianisme Struktural**. Watak mereka yang jujur, lugas, dan apa adanya (*Cablaka*) kini harus memenangkan pertempuran melawan ketimpangan spasial dan struktural yang persisten, sebuah warisan pahit yang ditanamkan oleh sentralisme dan eksploitasi historis.

I. Akar Kultural: Kebebasan yang Lahir dari Marginalitas

Identitas unik Banyumas terbentuk kokoh pada periode abad ke-16 hingga awal kolonial. Kunci pembentukannya terletak pada status geopolitiknya: **Mancanegara Kilèn** (wilayah terluar bagian barat) dari Kerajaan Mataram. Jarak ini—secara geografis maupun psikologis—memberikan otonomi politik dan sosial yang signifikan. Filosofi otonomi ini terangkum dalam ungkapan:

perek watu adoh ratu (dekat dengan alam/batu dan jauh dari raja). Jarak dari keraton secara kausal memutus mata rantai kontrol ideologis feodal yang kaku.

Fondasi egaliter ini diperkuat oleh basis ekonomi agraria yang mandiri. Data historis menunjukkan bahwa petani merdeka di Banyumas menguasai **hampir 80% lahan (78%)**, sangat kontras dengan hanya 35% di pusat Mataram. Bahkan, sistem bagi hasil pra-kolonial (*Perlimaan*) memberikan alokasi yang relatif besar, yakni **40% hasil panen, kepada petani penggarap**. Kemandirian ekonomi ini secara langsung menghilangkan kebutuhan untuk mengadopsi etika feodal yang berbelit-belit.

Keterusterangan ini menjelma dalam dua penanda budaya: **Dialek Ngapak**, yang dianggap sebagai bentuk asli (*basa ngoko Jawadipa*) yang demokratis, dan nilai **Cablaka**—berbicara apa adanya atau *thokmelong*. Secara filosofis, *Cablaka* berfungsi ganda: sebagai penanda kejujuran, sekaligus **mekanisme kritik sosial yang aman** terhadap penguasa, di mana kekasaran yang diklaim secara kultural menjadi ruang untuk berpendapat tanpa sanksi formal feodal.

II. Warisan Struktural: Ekstraksi dan Polarisasi (1830–1998)

Fondasi egaliter ini mulai digerus tajam setelah Banyumas diserahkan kepada Belanda pada 1830, diubah menjadi **Karesidenan Banyumas** dan dipandang sebagai "sapi perah" (*cash cow*) kolonial. Penerapan *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa) memicu eksploitasi intensif pada komoditas ekspor seperti tebu. Pajak yang dikenakan pada petani mencapai 42,48 gulden per *bau*, padahal pendapatan bersih mereka hanya sekitar 25 gulden. Eksploitasi berlapis ini menghancurkan hak kepemilikan tanah pribadi dan menciptakan **kelas buruh tani tanpa tanah (Mondok atau Numpang)** yang sangat rentan.

Krisis ekonomi global (*Malaise*) pada 1930-an membuktikan kerentanan struktural ini, memaksa penutupan 14 pabrik gula dan PHK massal. Dampaknya adalah pergeseran spasial yang signifikan: ibu kota dipindahkan ke **Purwokerto pada tahun 1937**, menandai awal dominasi spasial Purwokerto sebagai pusat ekonomi dan logistik.

Setelah Banyumas menjadi basis militer strategis dalam Revolusi Fisik (melahirkan tokoh nasional seperti **Jenderal Soedirman** dan laskar pelajar **IMAM**), rezim *Developmentalism* Orde Baru (1966–1998) kembali

memperkuat pola sentralistik ini. Purwokerto ditetapkan sebagai **Growth Pole** regional. Pembangunan terpusat ini memicu percepatan urbanisasi dan konversi lahan sawah yang masif, dengan rata-rata **112 hektar per tahun** dikonversi antara 1990–2015. Warisan struktural Orde Baru yang paling signifikan adalah **ketidakmerataan spasial dan struktural** yang persisten.

III. Kontradiksi Kontemporer: Paradoks di Puncak Gunung Es

Di era kontemporer, Banyumas menunjukkan dilema akut antara capaian makro yang cemerlang dan kegagalan struktural yang mendalam.

Secara agregat, Banyumas memiliki daya tahan ekonomi yang tangguh, mencatat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) rata-rata **5.19%** (2005–2022), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Barlingmascakeb dengan nilai **74.52**. Namun, keunggulan IPM ini seringkali hanyalah "rata-rata yang menyembunyikan ketimpangan ekstrem".

a) Krisis Inklusivitas

Pertumbuhan yang pesat terbukti tidak inklusif, ditandai dengan lonjakan tajam **Gini Ratio yang mencapai 0.397 pada 2023**, mendekati ambang batas ketimpangan tinggi (0.400). Bahkan, studi akademis terdahulu mencatat

Koefisien Gini ekstrem **0.603**. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi terkonsentrasi di pusat Purwokerto.

b) Krisis Modal Manusia

Meskipun Angka Partisipasi Sekolah SD mencapai hampir 100% (99.96%), terdapat fenomena *leaky pipeline* (kebocoran pendidikan) yang mengkhawatirkan: **13.426 Anak Tidak Sekolah (ATS)** di jenjang menengah. Krisis ini didominasi oleh faktor ekonomi, di mana *opportunity cost* kerja anak menjadi beban berat bagi keluarga miskin.

c) Krisis Modal Sosial dan Digital

Solidaritas tradisional (*gotong royong*) di pedesaan mulai memudar, beralih ke individualisme, diperburuk oleh ketergantungan pada bantuan material *top-down* pasca-krisis. Selain itu, meskipun infrastruktur TIK Banyumas didukung **100% fiber optik**, adopsi teknologi oleh UMKM sangat rendah, dengan hanya **5.400 dari 90.000 UMKM** yang telah *go digital*, menciptakan jurang digital yang menghambat daya saing lokal.

Di tengah guncangan struktural ini, budaya Banyumas menunjukkan resiliensi yang adaptif. Dialek **Ngapak** telah bertransformasi dari simbol marginalisasi menjadi **kebanggaan digital** (*Cultural Comeback*). Seni tradisional seperti **Lengger, Calung, dan Ebeg**

diselamatkan melalui **rekayasa fungsional** dan komodifikasi strategis (misalnya, **Calengsai**—akulturasi dengan Barongsai), didukung oleh kebijakan profesionalisasi seperti **Kartu Seniman**.

IV. Visi Masa Depan: Memenangkan Kembali Keadilan Spasial

Jalan ke depan bagi Banyumas harus berfokus pada **inklusivitas spasial** dan penguatan **otonomi fiskal**, menolak pengulangan sentralisasi Purwokerto yang eksklusif. Visi pembangunan harus mewujudkan **Banyumas Emas Berjiwa Jujur 2045** dengan lima pilar strategis:

a) Industrialisasi Inklusif

Strategi utama adalah mendorong sektor **Industri Pengolahan** (yang Prospektif tetapi Non-Basis). Pengembangan kawasan industri **1.500 hektar di Wangon** untuk menyambut Tol Pejagan–Cilacap harus menjadi alat redistribusi kekayaan. Kebijakan afirmatif harus mewajibkan **penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal** dan didukung pelatihan *skill* gratis untuk memitigasi lonjakan Gini Ratio.

b) Resolusi ATS Struktural

Untuk mengatasi krisis 13.426 ATS, **Program SIPATAS harus ditransformasi menjadi SIPATAS Plus**.

Program ini wajib diintegrasikan dengan dukungan finansial bersyarat (CCT) melalui program seperti PKH, untuk menghilangkan *opportunity cost* ekonomi sekolah bagi keluarga miskin.

c) **Kapitalisasi Budaya Digital**

Modal kultural Ngapak harus dikapitalisasi sebagai aset ekonomi. Pemanfaatan *Cultural Comeback* Ngapak di ruang digital harus didukung dengan perluasan **Kartu Seniman** untuk mencakup perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digital bagi *content creator*. Selain itu, Pemerintah wajib memprioritaskan pengajuan **Indikasi Geografis (IG)** untuk kuliner khas seperti **Tempe Mendoan dan Soto Sokaraja** untuk melindungi warisan budaya hidup ini dari homogenitas budaya makanan *western*.

d) **Transformasi Remitansi**

Dana remitansi dari 16.824 PMI Banyumas harus dialihkan dari konsumsi menjadi **modal investasi produktif** melalui skema investasi kolektif di BUMDes berbasis ekspor (gula kelapa).

e) **Banyumas Hijau**

Pembangunan harus menyelesaikan hutang ekologis, terutama pencemaran parah **DAS Serayu** (COD rata-rata 62.52 mg/L). Kawasan Industri Wangon harus

menerapkan teknologi *zero-waste* dan mengadopsi standar *Green Industrial Cluster* untuk mencegah pengulangan model eksploitatif masa lalu.

Pada akhirnya, masa depan Banyumas akan ditentukan oleh kemampuannya **menginternalisasi nilai historis Cablaka** (kejujuran dan transparansi) sebagai etika birokrasi, dan keberanian untuk mewujudkan **keadilan spasial**. Hanya dengan cara ini, semangat luhur egaliter *wong cilik* dapat dimenangkan kembali dari cengkeraman ketimpangan struktural yang diwariskan sejarah.

Perjalanan Banyumas selama empat setengah abad ini ibarat sebuah sungai besar—Sungai Serayu. Hulu sungai (masa awal Mancanegara Kilèn) menghasilkan air jernih dengan arus egaliter yang kuat. Namun, ketika sungai itu memasuki dataran rendah (masa kolonial dan Orde Baru), ia disedot untuk mengairi ladang industri ekstraktif dan tercemar oleh limbah pertumbuhan yang terpusat di satu muara (Purwokerto), meninggalkan ketimpangan dan krisis lingkungan. Tugas kontemporer adalah **membersihkan kembali sungai tersebut hingga hilir**, memastikan setiap anak sungai (setiap kecamatan, setiap warga) menerima manfaat air yang jernih dan mengalirkan semangat *Cablaka* sebagai fondasi hidup bersama.

Daftar Pustaka

- Alexander, P. (2010). Colonial Capitalism in Java. *Mankind*, 16(1), 49–54. <https://doi.org/10.1111/j.1835-9310.1986.tb01278.x>
- Arinda, D. M., Saraswati, U., & Muntholib, A. (2017). Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935. *Journal of Indonesian History*, 6(1), 12–20.
- Barbalet, J. M. (1976). Underdevelopment and the colonial economy. *Journal of Contemporary Asia*, 6(2), 186–193. <https://doi.org/10.1080/00472337685390211>
- Basundoro, P., Sumarto, S. P., Sarkawi, & Maimunah. (2000). Pengaruh Modernisasi Transportasi Terhadap Pola Perkembangan Kota-kota di Karesidenan Banyumas. Laporan Penelitian Dik Suplemen Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2000.
- Comission, E. (2016). Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam Tata Kota di Karesidenan Banyumas Tahun 1894-1937. 4(1), 1–23.
- Fauzi Wahyu Hidayat. (2021). Perjuangan Kyai Ngabehi Singadipa Dalam Melawan Belanda Di Banyumas

- (1825-1830). Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nurwanti, Y. H., Harnoko, D., & Larasati, T. A. (2015). Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942.
- Priyadi, S. (2018). Banyumas 1571-1937. *Paramita: Historical Studies Journal*, 28(1), 92-104.
- Tanoyo, B., & Sari, N. A. (2022). Banjir Banyumas Dalam Arsip Memorie Van Overgave. *Cived*, 9(2), 213. <https://doi.org/10.24036/cived.v9i2.116448>
- Tanto Sukardi. (2017). The Social Economic Life of Banyumas Rural Community Until the Xx Century. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 13(2), 223. <https://doi.org/10.17509/historia.v13i2.6214>
- T Sukardi. (2015). The End of the Feudal System in Banyumas, Central Java: Studies on the Impact of Colonial Intervention in the Sectors of Bureaucracy and Socio-Economic, 1830 *Tawarikh*, 6(April), 177-188.
- . (n.d). Mondok atau Numpang farmers.
- . (n.d). Singa Perlawanan Dari Banyumas Raya Menuju Pahlawan Nasional.

- Hartanto, S. I. (2019). Perspektif Gender pada Lenggeng Lanang Banyumas. *PANTUN: Jurnal Ilmiah Seni Budaya*, 1(2), 145–153.
<https://doi.org/10.26742/pantun.v1i2.766>
- Nugroho, C., & Kusuma, I. P. (2023). Identitas Budaya Banyumasan dalam Dialek Ngapak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 333.
<https://doi.org/10.31315/jik.v21i2.4556>
- Nurwanti, Y. H., Harnoko, D., & Larasati, T. A. (2015). Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942. In *Qqqq*.
- Priyadi, S. (2000). Budaya Lokal Banyumas Membangun Integrasi Bangsa. *Jurnal Antropologi*, 4(1), 541–545.
- Purba, J. A. A. (2024). Batasan untuk Keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(1), 78–91.
<https://doi.org/10.20473/jhi.v17i1.54692>
- Sondarika, W. (2015). Dampak Culturstelsel (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870. *Jurnal Artefak*, 3(1), 59–66.
- Sukardi, T. (2015). The End of the Feudal System in Banyumas, Central Java: Studies on the Impact of

Colonial Intervention in the Sectors of Bureaucracy and Socio-Economic, 1830 *Tawarikh*, 6(April), 177–188.

<http://journals.mindamas.com/index.php/tawarikh/article/view/592>

Ummah, M. S. (2019). Harmoni Islam dalam Ekspresi Budaya, Local Wisdom dan Moderasi Beragama di Ilayah Pengiyongan. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Pustaka Ilmu. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Wieringa, S. (2002). *The Garuda Takes Flight: From the Colonial Period to Independence*. Anderson 1983, 52–53.

Tiyas Septiana (2023). Peran Pendidikan Formal serta Politik Etis Pada Masa Penjajahan, Kontan. Kamis, 03 Agustus 2023

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas (2025). Sejarah Masa Kemerdekaan.

<http://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/43492/sejarahmasakemerdekaan>

- Arinda, D. M., Saraswati, U., & Muntholib, A. (2017). Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935. *Journal of Indonesian History*, 6(1), 12–20.
- Ayuningtyas, D. R., Suharso, R., & Sodik, I. (2016). Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1950. *Journal of Indonesian History*, 5(Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH)), 10–17.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/19720>
- Basundoro, P. (2012). Dinamika Pengangkutan Di Banyumas Pada Era Modernisasi Transportasi Pada Awal Abad Ke-20. *Humaniora*, 20(1), 63–74.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/920>
- Comission, E. (2016). *Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam Tata Kota di Karesidenan Banyumas Tahun 1894-1937*. 4(1), 1–23.
- Fauzi Wahyu Hidayat. (2021). *Perjuangan Kyai Ngabehi Singadipa Dalam Melawan Belanda Di Banyumas*.
- Mardiyya, I. R., Umar, T., Hadi, S., Ribawati, E., Pendidikan, I., & Ageng, U. S. (1945). *Dampak Propaganda Gerakan*

Menabung Jepang Terhadap Ekonomi Masyarakat di Pulau Jawa (1942-1945) Runtuhnya pendudukan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia mewujudkan keinginannya untuk mendirikan persemakmuran Asia.

Nurwanti, Y. H., Harnoko, D., & Larasati, T. A. (2015). Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942. In *Qqqq*.

Padmo, S. (2013). Depresi 1930 an dan Dampaknya Terhadap Hindia-Belanda. In *Jurnal Humaniora Universitas Gadjah Mada* (pp. 147–156). <https://doi.org/10.22146/jh.2159>

Rachmawati, N., Berliana, A., Mulya, J. R., & Ribawati, E. (2024). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Menjelang Kemerdekaan (Pada Masa Penjajahan Jepang). *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54.

Suryo, D. (2011). Konferensi Nasional Sejarah IX DARI VORSTENLANDEN KE DIY: Kesenambungan dan Perubahan. *Konferensi Nasional Sejarah Ke-9*, 5–7.

Susilo, A. (2018). Sejarah Perjuangan Jenderal Soedirman Dalam Mempertahankan Indonesia (1945-1950).

HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah,
6(1), 57. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i1.1149>

- Alamsyah, A. (2018). Identifikasi Bangunan Cagar Budaya di Jawa Tengah (Studi Eks Rumah Dinas Residen). *Anuva*, 2(4), 399. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.4.399-412>
- Arif, M. (2016). *REVOLUSI NASIONAL INDONESIA PERSPEKTIF PENDIDIKAN KARAKTER Merebut dan Mempertankan Kemerdekaan*.
- Arinda, D. M., Saraswati, U., & Muntholib, A. (2017). Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935. *Journal of Indonesian History*, 6(1), 12–20.
- Nurwanti, Y. H., Harnoko, D., & Larasati, T. A. (2015). Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942. In *Qqqq*.
- Priyadi, S. (2000). Budaya Lokal Banyumas Membangun Integrasi Bangsa. *Jurnal Antropologi*, 4(1), 541–545.
- Priyadi, S. (2008). Sintesis Nilai-Nilai Paradoksial pada Teks babad apsir dan Babad Banyumas. *Sosiohumaniora*, Vol. 10, No. 3, November, 89–103.

- Ranti Rahmatiah, Ahdiati, T., & Makhasin, L. (2017). *Monumen dan Simbolisme Politik Ruang di Kota Purwokerto*. 1–31.
- Sinngih Tri Sulistiyono et. (2013). *16 Sisi Terang Kolonialisme Fulltext.pdf*.
- Azan Paiker (2002). Perancangan Pengembangan Terminal Induk Purwokerto, Universitas Islam Indonesia
- Lestari, et al. (2023).** Pencemaran Perairan DAS Serayu: Tingkat COD dan DO. *Jurnal Perikanan*, 13 (4), 941-950.
- Ardanareswari, I. (1 April 2020). Repelita ala Orba: Pembangunanisme yang Mengandalkan Modal Asing. *tirto.id*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas. Gini Rasio, 2023..
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas. PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran (Data 2024)..
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan Usaha 2018-2022..
- Fadilah Fitri. (2025). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019-2023*.

Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan (JUMANSI), 7(1)..

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2014). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2000). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 1999*. Diakses dari

<https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2000/10/03/410ccc3b6faafa3ded02fe27/kabupaten-banyumas-dalam-angka-1999.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2001). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2000*.

Pemerintah Kabupaten Banyumas (Dinas Kominfo). (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas 2005-2022*. Diakses dari

<https://bappedalitbang.banyumaskab.go.id/news/44153/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-banyumas-2005-2022>.

Susanto (Editor). (2023). *Pariwisata Masih Jadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi di Banyumas*. Suara Merdeka Banyumas. Diakses dari

<https://banyumas.suaramerdeka.com/gaya->

hidup/0911051266/pariwisata-masih-jadi-andalan-pertumbuhan-ekonomi-di-banyumas.

Repofeb Undip. (n.d.). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2014-2020*. Diakses dari <https://repofeb.undip.ac.id/11857/>.

Repository Unsoed. (n.d.). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Jenis Kelamin, Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyumas Tahun 2000-2023*. Diakses dari <http://repository.unsoed.ac.id/31279/>.

Pemerintah Kabupaten Banyumas (DPM PTSP). (n.d.). *Profil Potensi Investasi*. Diakses dari <https://dpmptsp.banyumaskab.go.id/page/6735/profil-potensi-investasi>.

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. (n.d.). *Kajian Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas*. Diakses dari <https://iptek.its.ac.id/index.php/jpr/article/view/8270>.

Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. (n.d.). *Tabel Tipologi Wilayah Investasi Kabupaten Banyumas*. Diakses dari

<https://iptek.its.id/index.php/jpr/article/download/8270/pdf/18>.

IT Telkom Purwokerto. (2023). *Banyumas Jadi Kota Kreatif, IT Telkom Purwokerto Ambil Peran Membentuk Creative Hub*. Diakses dari <https://purwokerto.telkomuniversity.ac.id/banyumas-jadi-kota-kreatif-it-telkom-purwokerto-ambil-peran-membentuk-creative-hub/>.

UIN Saizu. (n.d.). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pasar Rakyat*. Diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/2724/1/COVER_A_BSTRAK_DAFTAR%20ISI_BAB%20I_BAB%20IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

Peraturan BPK. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/297802/Perda%20Bms%206_2022.pdf.

Watemin & Budiningsih, S. (2021). *Kemiskinan di Kawasan Pinggiran Hutan: Studi Kasus di Kawasan Pinggiran Hutan Pekuncen Banyumas*. *Jurnal Agritech*, 10(1). Diakses dari

[https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/AGRIT
ECH/article/view/961](https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/AGRIT
ECH/article/view/961).

Geo Edukasi. (2013). *Analisis Tingkat Konversi Lahan Pertanian di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas*. Diakses dari [https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdu
kasi/article/view/698](https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdu
kasi/article/view/698).

Pristian Noviantari. (n.d.). *Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Sumpiuh Terhadap Perubahan Nilai Tanah*. Repository STPN. Diakses dari [https://repository.stpn.ac.id/1130/1/Pristian%20
Noviantari.pdf](https://repository.stpn.ac.id/1130/1/Pristian%20
Noviantari.pdf).

Banyumas Media. (n.d.). *Evaluasi MBG di Banyumas: Antara Potensi Besar dan Tantangan Higienitas*. Diakses dari [https://banyumasmedia.com/evaluasi-mbg-di-
banyumas-antara-potensi-besar-dan-tantangan-
higienitas/](https://banyumasmedia.com/evaluasi-mbg-di-
banyumas-antara-potensi-besar-dan-tantangan-
higienitas/).

Neliti. (n.d.). *Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Banyumas*. Diakses dari [https://media.neliti.com/media/publications/2666
30-strategi-pengembangan-sektor-pariwisata-
ae5e5e1f.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/2666
30-strategi-pengembangan-sektor-pariwisata-
ae5e5e1f.pdf).

Eprints Undip. (n.d.). *Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten*

<https://eprints.undip.ac.id/83403/>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas 2021 dan 2022..*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2024). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2024..*

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2023). *Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis Masalah Sosial di Kabupaten Banyumas, 2023..*

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. (2024). *Pemkab Banyumas Pastikan Pemerataan Layanan Kesehatan Dapat Tertangani..*

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. (2025). *Sinergi Masyarakat untuk Pendidikan Banyumas yang Lebih Baik..*

Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government spending, growth and poverty in rural India. *American Journal of Agricultural Economics*, 82(4), 1038–1051..

Firmansyah, M. A., Masrukin, & Pandu P., A. (2022). Perubahan Pola Solidaritas Masyarakat Pedesaan Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9)..

- Indeks Pembangunan Manusia BPS. (2024). *Analisis Capaian IPM Kabupaten Banyumas..*
- Kustantinah, D. (2025). 13.426 Anak di Banyumas Putus Sekolah, Apa Langkah Pemkab. *Kompas.com..*
- Nurohman, T. (2018). Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Peran LSM Kompleet Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Melung Kabupaten Banyumas). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya..*
- Prasetyo, A. D., Supardi, M., & Haryanto, T. (2024). Analisis Double Exponential Smoothing pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banyumas. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 1(1)..
- Prastyanti, S., & Nunn, A. (2023). Ketahanan Sosial Masyarakat Banyumas Pada Sektor Pendidikan Dalam Perspektif Reproduksi Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 88–107..
- Pramono Hariadi, Arintoko, & Bawono, I. R. (2009). Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1)..
- Ramadhan, G. H., & Setiawan, I. (2023). Analisis Hubungan Kepuasan Pasien dengan Kualitas Pelayanan di

- Puskesmas Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(2), 263-273..
- Setiawan, R. S., & Pratiwi, Y. (2024). Analisis Konsentrasi Pembangunan Infrastruktur dan Ketimpangan Spasial di Purwokerto. *Jurnal Media Akademik*, 2(1)..
- Wijayanti, P. (2023). Pola Migrasi Penduduk di Wilayah Perbatasan Kabupaten Cilacap (Studi Kasus Kecamatan Karangpucung). *Tesis Tidak Dipublikasikan, Universitas Diponegoro*..
- Wulan, N., & Aini, A. (2023). Efektivitas Pemberdayaan KPM melalui P2K2 pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 4(3)..
- Fimela. (n.d.). *Video band ngapak Purwokerto ini bikin Sabtu kamu makin ceria*. Fimela.
- Kemenparekraf/Baparekraf RI. (2023, Oktober 11). *Menparekraf resmikan Desa Wisata Pekunden Banyumas sebagai 75 Desa Wisata terbaik ADWI 2023*. Siaran Pers.
- Koderi, M. (1991). *Banyumas wisata dan budaya*. Metrojaya. Metro Jateng. (2025, Agustus 21). *Banyumas siapkan “kota masa depan” pariwisata dan pendidikan jadi andalan*.

- Mubah, S. (2011). Revitalisasi Identitas Kultural Indonesia Di Tengah Upaya Homogenisasi Global. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1), 251–260.
- Nafila, O. (2013). Peran komuninas kreatif dalam pengembangan pariwisata budaya di situs Megalithikum Gunung Padang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 24(1).
- Orientasi nilai budaya Banyumas antara masyarakat tradisional dan modern. (n.d.). *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*.
- Pelestarian Calung Banyumasan di masyarakat (Studi deskriptif tentang peran pemerintah daerah dan masyarakat pendukung di Kabupaten Banyumas). (n.d.).
- RRI. (2024, Maret 22). *Kontribusi pemerintah dan masyarakat lestarikan cagar budaya Cikakak*. RRI Purwokerto.
- Strategi pengembangan wisata budaya yang berkelanjutan di destinasi wisata Djagongan Koena Kejawar Banyumas. (2023). *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(1), 14-26.
- Subchan, M. (n.d.). Dari stereotip ke kebanggaan: Kebangkitan dialek Ngapak di media digital. *Blitar Kawentar Jawapos*.

- Suryanti, E. (2007). *Antisipasi Strategis Perang Nilai Budaya Lokal di Area Global*. Bappeda Provinsi DIY.
- Susanto, H. (1987). *Mitos menurut pemikiran Eliade*. Kanisius.
- Telkom University Purwokerto. (2024, Desember 16). *Kuatkan literasi digital, Open Library Telkom University Purwokerto hadir di Festival Literasi Banyumas (FESLITMAS)*.
- Tjaturrini, D., Mega F.D.L., F. A., & Giovany. (2022). Calengsai sebagai aset budaya Banyumas penunjang pariwisata. *Melancong: Jurnal Perjalanan Wisata, Destinasi, dan Hospitalitas*, 6(1), 1-14.
- Tohari, A. (1982). *Ronggeng dukuh paruk*. Gramedia.
- Transformasi seni pertunjukan Lengger Banyumasan di Purwokerto: Studi fenomenologi seni pertunjukan pada kelompok seni Kencana Laras. (n.d.).
- Upaya mempertahankan kesenian Lengger Calung Banyumasan di tengah modernisasi: Studi kasus di Dusun Trans Cilacap, Lampung Selatan. (n.d.).
- Wibowo, G. F., & Mulyani, E. (2021). *Taman kuliner Purwokerto dengan pendekatan placemaking*. (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Wibowo, G. F., & Mulyani, E. (2022). Nilai anak bagi keluarga di pedesaan Banyumas.
- Widiyono, S. (2019). Pengembangan nasionalisme generasi muda di era globalisasi. *Jurnal Populika*, 7(1).
- Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah (1st ed.). Graha Ilmu. (Dikutip dalam Jurnal UGM).
- Analysis of the Role of Agile Governance in the Development of the Smart City Concept. (t.thn.). ResearchGate.
- Azmi, E. D. (t.thn.). Media to Preservate Banyumasan Dialect for Young. Jurnal Tugas Akhir ISI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas Menurut Lapangan Usaha 2018-2022. Nomor Publikasi 33020.2304.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2024). Gini Rasio Provinsi Jawa Tengah..
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (t.thn.). Mendekatkan Jurang Ketimpangan Pendapatan Banyumas. *Jatengdaily.com*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (t.thn.). Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas. ETD UGM.

- BPS Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. (2022). Indikator Persentase Penduduk Nonpertanian. Jurnal UNS.
- BP2MI Jawa Tengah. (2024). Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Asal Jateng Tahun 2018–2024.
- DPMPTSP Jawa Tengah. (2023). Realisasi Investasi Non LKPM dan LKPM Triwulan I Tahun 2023.
- Felder, C. A. (t.thn.). Analisa pengaruh jumlah TKI dan remitansi terhadap pertumbuhan propinsi dan konsumsi. Tesis UI.
- ISI Yogyakarta. (t.thn.). Popularitas Tari Lengger Lanang di Kalangan Anak Muda Banyumas. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Koderi, M. (1991). Banyumas wisata dan budaya. Metrojaya.
- Kompas. (2025, 27 Oktober). Banyumas Siapkan Kawasan Industri 1.500 Hektare Sambut Tol Pejagan-Cilacap..
- Kotler Philip, Kevin Lane Keller, A. C. (2022). Marketing management (). Pearson. (Dikutip dalam Maharani & Hasibuan, 2024).
- LPEI. (2023, 9 November). LPEI Dorong Gula Kelapa Banyumas Mendunia Tembus Ekspor 10 Negara. Indonesia Eximbank.

- Maharani, D. A., & Hasibuan, R. R. (2024). Peningkatan Kemampuan Pemasaran Digital pada UMKM di Desa Sumbang Purwokerto. ABDI.
- Nugroho, C., & Kusuma, I. P. (t.thn.). Penggunaan Bahasa Jawa Banyumasan (Dialek Ngapak) sebagai Identitas Budaya pada Mahasiswa Perantauan di Bandung. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas Sadewo Tri Lastiono. (2025, 17 September). 170 UMKM Banyumas Siap Tembus Ekspor. Edukator.id.
- Pemerintah Desa Plangkapan. (t.thn.). Program Literasi Digital..
- Pradipta, A. et al. (2024). A Study on Trans Banyumas Service Accessibility towards Smart Mobility Readiness. Atlantis Press.
- Revitalisasi Sistem Pangan Lokal Berbasis Tempe Mendoan di Banyumas. (t.thn.). ResearchGate.
- RRI Purwokerto. (t.thn.). Telkom Purwokerto Pastikan Internet di Banyumas 100% Fiber Optik..
- Santoso, B. (2025, 5 Mei). BUMDes Asal Banyumas Berhasil Tembus Pasar Global Lewat Produk Gula Kelapa. Warta Ekonomi.

- Susanto. (2019). Strategi Melindungi Makanan Lokal dari Budaya Makanan Western di Kabupaten Banyumas. ResearchGate.
- Tari. (2025). Dampak Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Media Akademik.
- Taufiqqurrachman, & Jayadi. (2023). Analisis Sektor Unggulan dan Ketimpangan PDRB Kabupaten Banyumas. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(4).
- Wardhana, H. (2022, 17 Mei). Jaring Potensi Ekspor Daerah, Bea Cukai Kunjungi Pelaku UMKM. Bea Cukai.
- Wahyu Dewanto. (2024, 6 Agustus). Pemkab Minta Pelaku UMKM di Banyumas Manfaatkan Teknologi Digital. Antaranews.
- Alexander, P. (2010). Colonial Capitalism in Java. Mankind, 16(1), 49–54.
- Arinda, D. M., Saraswati, U., & Muntholib, A. (2017). Krisis Ekonomi di Banyumas 1930-1935. Journal of Indonesian History, 6(1), 12–20. [1, 1, 1]
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas 2021 dan 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2024). Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2024.

- Comission, E. (2016). Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda dalam Tata Kota di Karesidenan Banyumas Tahun 1894-1937. 4(1), 1-23. [1, 1]
- Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. (2025). Sinergi Masyarakat untuk Pendidikan Banyumas yang Lebih Baik.
- DPMPTSP Jawa Tengah. (2023). Realisasi Investasi Non LKPM dan LKPM Triwulan I Tahun 2023.
- Fadilah Fitri. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019-2023. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan (JUMANSI), 7(1).
- Firmansyah, M. A., Masrukin, & Pandu P., A. (2022). Perubahan Pola Solidaritas Masyarakat Pedesaan Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(9).
- Khasanah, I. L., & Kurnia, H. (2023). Melestarikan Budaya Banyumasan Melalui Dialek Bahasa Ngapak. KULTURISTIK: Jurnal Bahasa Dan Budaya, 7(2), 43-53.

- Kompas. (2025, 27 Oktober). Banyumas Siapkan Kawasan Industri 1.500 Hektare Sambut Tol Pejagan-Cilacap.
- Lestari, et al. (2023). Pencemaran Perairan DAS Serayu: Tingkat COD dan DO. *Jurnal Perikanan*, 13(4), 941-950.
- Nugroho, C., & Kusuma, I. P. (2023). Identitas Budaya Banyumasan dalam Dialek Ngapak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 333. [1, 1]
- Nurwanti, Y. H., Harnoko, D., & Larasati, T. A. (2015). Sejarah Perkembangan Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913-1942. [1, 1, 1, 1, 1]
- Pelestarian Calung Banyumasan di masyarakat (Studi deskriptif tentang peran pemerintah daerah dan masyarakat pendukung di Kabupaten Banyumas). (n.d.).
- Pemerintah Kabupaten Banyumas (Dinas Kominfo). (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas 2005-2022*.
- Prasetyo, A. D., Supardi, M., & Haryanto, T. (2024). Analisis Double Exponential Smoothing pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten

- Banyumas. *Emerging Statistics and Data Science Journal*, 1(1).
- Pramono Hariadi, Arintoko, & Bawono, I. R. (2009). Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1).
- Priyadi, S. (2003). Beberapa Karakter Orang Banyumas. *Journal Bahasa Dan Seni*, 31(1), 19.
- Priyadi, S. (2007). Cablaka Sebagai Inti Model Karakter Manusia Banyumas. *Diksi*, 14(1), 11–18.
- Purwoko, O. E. (2017). Reclaiming Banyumas Identity an Interpretive Studyabout Identity and Character of Local Society Based on Literary Studies of History, Attitudes, Behavior, Arts and Culture. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(1), 128–141.
- Sukardi, T. (2015). The End of the Feudal System in Banyumas, Central Java: Studies on the Impact of Colonial Intervention in the Sectors of Bureaucracy and Socio-Economic, 1830 *Tawarikh*, 6(April), 177–188. [1, 1, 1]
- Taufiqurrachman, & Jayadi. (2023). Analisis Sektor Unggulan dan Ketimpangan PDRB Kabupaten Banyumas. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4).

- Tjaturrini, D., Mega F.D.L., F. A., & Giovany. (2022). Calengsai sebagai aset budaya Banyumas penunjang pariwisata. *Melancong: Jurnal Perjalanan Wisata, Destinasi, dan Hospitalitas*, 6(1), 1-14.
- Wibowo, G. F., & Mulyani, E. (2022). Nilai anak bagi keluarga di pedesaan Banyumas.

Tentang Penulis



Aditya Hera Nurmoko lahir di Desa Karangjati, Kec.Kemranjen, Banyumas, 8 Maret 1981. Alumni SMP Negeri 1 Kemranjen Banyumas. Penulis adalah Dosen STIE YKP Yogyakarta, Ketua Lembaga Tunas Literasi Nusantara Banyumas. Peneliti dan Tenaga Ahli di PT Sinergi Visi utama. Komisariss PT Indo Asia Internasional Solusi, Auditor CHSE Hotel dan Pariwisata Indonesia, aktif di ADRI DIY (Ahli & Dosen RI) dan IALHI (bendahara II Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia).

Penulis pernah menjadi Tenaga Ahli Analis Penyusunan Konten Media Sosial di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol SETDA Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023), Narasumber Kajian Penanggulangan kemiskinan Ekstream Pemda Mimika,

Papua Tengah (2025), Narasumber Pelatihan UMKM Dinas UMKM dan Koperasi Pemerintah Papua Barat (2025).

Penulis juga pernah aktif menjadi Instruktur Sertifikasi ISO 17025:2017 bagi Dosen dan Tenaga Pendidikan Kampus Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Negeri Sumatra Utara Medan, Politeknik Negeri, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Pare Pare dan Kediri, Universitas Janabadra Yogyakarta (ISO 9001:2015). Penulis pernah menjadi auditor untuk hotel HOM Premiere Cilacap, Atrium Hotel Cilacap, Whiz Prime Hotel Cilacap, Hotel Owabong Purbalingga, Hotel Zahid Pekalongan, Hotel Citradream Yogyakarta, Ramada Suites Hotel Colomadu Karanganyar, Grand Laguna Hotel Karanganyar, Concordia Lounge Bandar Udara Solo dan Sri Sasanti Restoran Yogyakarta.

Dari jalur ayah penulis Adalah keturunan dari Keluarga Besar Reja Mamad dan Dawud Khanawi (Kedung Ringin, Kebumen) serta Keturunan Keluarga Dipasemita (Watu Agung, Tambak, Banyumas). Dari jalur ibu penulis Adalah keturunan dari Keluarga Besar Bani Moersidi (Karangjati, Kemrnjen, Banyumas).

Buku dan Tulisan yang pernah ditulis dan dipublikasikan di antaranya :

- Buku Menelusuri Jejak Langit dan Jiwa, Sebuah Antologi Puisi Kosmologis dan Spiritual
- Buku Refleksi Setengah Abad Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Hukum
- Innovation in Global Industrial Downstreaming: An Overview Literature about Opportunities, Challenges, and Policy Directions
- Business Strategy through Decision Support Systems: A Case Study of Best Employee Selection in Indonesia
- Bridging The Gap Between Tourism Science And Vocational Education: Strategies To Increase Industry Relevance In Indonesia
- Penulis juga sedang menulis Buku “Singadipa, Singa Perang dari Banyumas” dan “Sejarah Desa Karangati”.

Sebagai tambahan, penulis juga pernah menjadi pengamat di Headline Koran Nasional yaitu Koran Jakarta untuk Headline:

- Likuiditas Stabil, Ekonomi Kuartal IV- 2025 Bakal Tumbuh Lebih Tinggi (Koran Jakarta, 29 Oktober 2025)
- Purbaya: Jalur Hijau di Bea Cukai Jangan Disalahgunakan untuk Memasukkan Barang Selundupan (Koran Jakarta, 14 Oktober 2025)

- Realokasi Anggaran Harus Menyasar Pos yang Penyerapannya Rendah. (Koran Jakarta, 1 Oktober 2025)
- Pemerintah dan DPR Harus Selesaikan Inti Masalah Bukan Tindakan Simbolis (Koran Jakarta, 2 September 2025)
- Deal, Trump Umumkan Capai Kesepakatan Tarif dengan Indonesia, Produk RI Dikenakan Tarif 19% (Koran Jakarta, 15 Juli 2025)
- Akhir 2025, Utang Pemerintah Diperkirakan Rp15.000 Triliun Setara 5 Tahun APBN (Koran Jakarta, 8 Juli 2025)
- Diperlukan, Perbaikan Fundamental Perencanaan Fiskal Jangka (Koran Jakarta, 3 Juli 2025)
- Kemenkeu Jangan Sederhanakan Kompleksitas Fiskal (Koran Jakarta, 9 Juni 2025)
- Kemiskinan Meningkat, Efektivitas Penarikan Utang Harus Dievaluasi (Koran Jakarta, 16 Juni 2025)
- Deflasi Mei, Alarm Bagi Ekonomi RI di Kuartal II-2025 (Koran jakarta,, 2 uni 2025)
- Segera Reformasi Struktural Agar Tidak Terjebak Defisit dan Gagal Bayar Utang (Koran Jakarta, 4 Mei 2025)

- AS Tidak Ciptakan Krisis, Tapi Dorong Sistem Perdagangan Global yang Fair (Koran Jakarta, 24 April 2025)
- Kritik AS Harus Jadi Bahan Evaluasi Tata Kelola Birokrasi RI (Koran Jakarta, 22 April 2025)
- RI Harus Melakukan Reformasi Struktural, Fundamental, dan Masif (Koran Jakarta, 15 April 2025)
- Kebijakan Prabowo Hapus Kuota Impor Akan Hilangkan “Rent Seeker”(Koran Jakarta, 9 April 2025)
- Kalau Tidak Segera Sadar, Ibarat Penyakit, RI Menuju Kanker (Koran Jakarta, 7 April 2025)
- Rupiah Bakal Makin Merosot Akibat Kebijakan Tarif Trump (Koran Jakarta, 6 april 2025)
- Pertumbuhan Ekonomi Q1-2025 Diperkirakan Kurang Dari 5 Persen (Koran Jakarta, 4 Maret 2025)
- Pengusaha Lokal Harus Diperkuat Agar Tidak Kalah dari Serbuan (Koran Jakarta, 9 Februari 2025)
- Tutup Kebijakan Impor Pangan dengan Kenakan Tarif Tinggi (Koran Jakarta, 24 Januari 2025)
- Stabilitas Sektor Keuangan RI Terancam Setelah Gabung BRICS (Koran Jakarta, 9 Januari 2025)
- Bahan Lokal MBG Peluang Besar Gerakkan Ekonomi Rakyat (Koran Jakarta, 6 Januari 2025)

- Masyarakat yang Paling Dirugikan, Meski Kenaikan PPN 12 Persen (Koran Jakarta, 1 Januari 2025)
- PLTS Jadi Solusi Paling Potensial Wujudkan Swasembada Energi (Koran Jakarta, 21 Oktober 2024)
- Waspada! Meluasnya Penurunan Daya Beli Masyarakat (Koran Jakarta, 1 Oktober 2024)
- Tingkatkan Kualitas SDM agar Bisa Keluar dari 'Middle Income Trap' (Koran Jakarta, 24 Sep 2024)
- Sidang Kabinet di IKN Sinyal Positif bagi Investor (Koran Jakarta, 13 Agustus 2024)
- Rakyat Indonesia Sedang Mengalami Masalah Keuangan (Koran Jakarta, Rabu, 10 Jul 2024)
- Pemerintah Terkesan Remehkan Situasi Ekonomi Terkini (Koran Jakarta, Selasa, 25 Jun 2024)
- Kewajiban Bayar Utang Pemerintah Lebih Besar dari yang Tercatat (Koran Jakarta, 10 Juni 2024)
- Struktur Fiskal Belum Berada di Jalur yang Sehat (Koran Jakarta, 05 Juni 2024)
- Suku Bunga Tinggi The Fed Masih Hantui Rupiah (Koran Jakarta, 15 Mei 2024)
- Waspada! Pelambatan Konsumsi Rumah Tangga (Koran Jakarta, 04 Mei 2024)
- Kehidupan Rakyat Makin Susah karena Inflasi Pangan dan Energi (Koran Jakarta, 26 April 2024)

- Pemimpin Bersikap "EGP" Tidak Peduli dengan Masa Depan Negara (Koran Jakarta, 20 April 2024)
- Ada Potensi Suku Bunga Acuan BI7 Days RR Rate Naik setelah Lebaran (Koran Jakarta, 08 April 2024)
- Cegah Rupiah Tidak Kian Terpuruk, BI Harus Menaikkan Suku Bunga (Koran Jakarta, 03 April 2024)
- BI Jangan Salahkan Global saat Sistem Keuangan Tidak Stabil (Koran Jakarta, 28 Maret 2024)
- Ribuan Hektare Lahan Pertanian di Jateng Terancam Gagal Panen (Koran Jakarta, 21 Maret 2024)
- Pemerintah Harus Pastikan Program Bansos Redam Kesulitan Rakyat (Koran Jakarta, 18 Maret 2024)
- Keanekaragaman Pangan Harus Dicapai Beberapa Waktu ke Depan (Koran Jakarta, 12 Maret 2024)
- RI Harus Segera Susun Cetak Biru Pengembangan Pangan Lokal (Koran Jakarta, 09 Maret 2024)
- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan Adakan Sertifikasi Personil Teknisi Laboran Internasional ((Koran Jakarta, 05 Maret 2024)
- Tren Kenaikan Harga Beras Masih Terus Berlanjut (<https://koran-jakarta.com/tren-kenaikan-harga-beras-masih-terus-berlanjut?page=all>, Koran Jakarta, 02 Maret 2024)

- KPPU Diminta Investigasi Dugaan Monopoli di Balik Kelangkaan Beras (<https://koran-jakarta.com/kppu-diminta-investigasi-dugaan-monopoli-di-balik-kelangkaan-beras?page=all>, (Koran Jakarta, 17 Februari 2024)
- Dutch Disease Makin Menyulitkan Pemerintah Atasi Ketimpangan (Koran Jakarta, 9 Februari 2024)
- Kesenjangan Pendapatan Semakin Memburuk (Koran Jakarta, 5 Februari 2024)
- Pertumbuhan Berkualitas Sulit jika Ekonomi Terus Bergantung ke Konsumsi (Koran Jakarta, 22 Desember 2023)
- Dunia Hadapi Kemiskinan, Ketimpangan, dan Perubahan Iklim (Koran Jakarta, 23 Oktober 2023)
- Runtuhnya Evergrande Harus Jadi Pelajaran bagi Sektor Properti di Indonesia (Koran Jakarta, 29 September 2023).
- Nilai Tukar Rupiah Sangat Tidak Realistis (Koran Jakarta, 23 September 2023)
- Batasan Harga Barang Impor yang Dijual "Online" untuk Lindungi UMKM (Koran Jakarta, 28 Juli 2023)
- Kronisme dan Oligarki Mematikan Demokrasi (Koran Jakarta, 11 Juli 2023)

- IKN Siap Jadi Pelopor Kota "Zero Carbon" di Indonesia (Koran Jakarta, 6 Juli 2023)
- Mimpi Indonesia Emas 2045 Bisa Menjadi Mimpi Buruk. RI Harus Buka Lapangan Kerja yang Lebih Luas (Koran Jakarta, 17 Juni 2023)
- Peningkatan Pagu Belanja Harus Turunkan Indikator Kemiskinan (Koran Jakarta, 5 Juni 2023)
- Menghidupkan Semangat Kebangkitan Nasional, Keluar dari Jebakan 'Middle Income Country' Menjadi Negara Maju (Koran Jakarta, 22 Mei 2023)
- Pemimpin 2024 Harus Paham dan Berani Selesaikan Akar Masalah Kebijakan. Arah Pembangunan Negara Harus Mempunyai Keuangan Kuat Sehingga Rupiah Menguat, Begitu Juga Sektor Riil (Koran Jakarta, 16 Mei 2023)
- Kronisme Terbukti Memiskinkan Negara. Tata Kelola Negara, Tidak Heran Angka Ketimpangan (gini ratio) RI Selalu Berkisar 0,384 (Koran Jakarta, 13 Mei 2023)
- Likuiditas Ketat Bisa Memicu Krisis Perbankan Meluas (Koran Jakarta, 18 April 2023)
- Kendalikan Inflasi dengan Tambah Produk Lokal di Pasar (Koran Jakarta, 13 April 2023)
- UU Cipta Kerja Diharapkan Wadahi Investor ke RI (Koran Jakarta, 27 Maret 2023)

- BI Jangan Anak Emaskan Perbankan, tetapi Korban Ekonomi Nasional (Koran Jakarta, 13 Maret 2023)
- Indonesia Tak Bisa Tumbuh jika Porsi Impor Lebih Besar (Koran Jakarta, 14 Februari 2023)
- Investasi Bakal Mengalir Deras ke Indonesia jika Iklim Politik Kondusif (Koran Jakarta, Rabu 25 Januari 2023)
- RI Perlukan Cadangan Devisa Lebih Besar untuk Stabilkan Pasar (Koran Jakarta, Sabtu 07 Januari 2023)
- Tingkatkan Penyaluran KUR untuk Pengadaan Alsintan (Koran Jakarta, 24 Desember 2022)
- PUPR Matangkan Strategi Penanganan Mitigasi Bencana di IKN (Koran Jakarta, 21 November 2022)
- Indonesia Jangan Berdiri di Atas Dua Perahu (Koran Jakarta 16 Desember 2022)
- RI Bisa Memainkan Peran Penting dan Strategis di Level Global (Koran Jakarta, 5 Desember 2022)
- Jangan Lengah dengan Laju Pertumbuhan Triwulan III-2022 (Koran Jakarta, 09 November 2022)
- Sinyal Krisis Pangan Mulai Terlihat (Koran Jakarta, 31 Oktober 2022)
- Peluang Kelebihan APBN Sangat Terbuka Lebar (Koran Jakarta, Kamis 29 Sept 2022)
- Presiden Joko Widodo Pertimbangkan untuk Membeli Minyak dari Russia (Koran Jakarta, Selasa 13 Sept 2022)

- Ekonomi Indonesia di Triwulan III Hadapi Tantangan Berat (Koran Jakarta, 08 Agustus 2022)
- Tanpa Rencana Besar Indonesia Tidak Mungkin Bisa Lepas Landas (Koran Jakarta, 16 Juli 2022)
- Kenaikan Harga Pangan Hancurkan Mereka yang Paling Miskin dan Rentan (Koran Jakarta, Jumat, 20 Mei 2022)
- Peningkatan Harga Energi Memberi Tekanan pada Fiskal (Koran Jakarta, Sabtu 07 Mei 2022)
- Saatnya Stop Impor dan Beralih Kembali ke Pangan Lokal (Koran Jakarta, Senin 11 April 2022)
- STT Migas Cilacap Beri Beasiswa kepada Kerabat Alumni SMPN 1 Kemranjen Banyumas Jawa Tengah dari Keluarga Tak Mampu yang Berprestasi (Koran Jakarta, Minggu 10 April 2022)
- Baru 20 Juta Pelaku UMKM Masuk ke Ekosistem Digital (Koran Jakarta, Kamis 31 Maret 2022)
- Presiden: Stop Ekspor Bahan Mentah (Koran Jakarta, Rabu 02 Maret 2022)
- Angka Kemiskinan Ekstrem Ditargetkan Turun 3 Juta Tahun Depan (Koran Jakarta, Kamis 17 Februari 2022)
- Sarjana Harus Pulang ke Kampung Membangun Desa (Koran Jakarta, 24 Januari 2022)
- Pemerintah Diminta Dukung Sektor Penyanggah Perekonomian (Koran Jakarta, Senin 17 Januari 2022)

- Inflasi 2021 Terkendali Rendah Meski Global Naik (Koran Jakarta, 5 Januari 2022)
- Pemerintah Mesti Berikan Insentif Pajak Untuk Genjot Ekspor (Koran Jakarta, Kamis 23 Des 2021)
- Penarikan Utang Pemerintah Belum Mampu Ke Sektor Produktif (Koran Jakarta, Selasa 07 Des 2021)
- 600 Industri Unggulan Daerah Bisa Dibangun dalam 2-3 Tahun (Koran Jakarta, Rabu 03 Nov 2021)
- Dana Desa Rp72 Triliun Jadi Barang dan Industri Apa? (Koran Jakarta, 21 Oktober 2021)
- Kenaikan Utang Luar Negeri Melampaui Pendapatan (Koran Jakarta, 13 Oktober 2021)
- Presiden Ingatkan OJK Soal Berbagai Penipuan di Platform Digital (Koran Jakarta, 12 Oktober 2021)
- Utang Global Melonjak Mendekati US\$300 Triliun (Koran Jakarta, 16 September 2021)
- "Quantitative Easing"(QE) Belum Terasa Dampaknya Ke Sektor Riil (Koran Jakarta, Senin 09 Agustus 2021)
- Rasio Gini Turun Tak Mutlak Ketimpangan Pengeluaran Turun (Koran Jakarta, 16 Juli 2021)
- Bank Dunia Perkirakan Ekonomi Tiongkok Naik Jadi 8,5% (Koran Jakarta, Rabu 30 Juni 2021)

Annang Riyanto

Lahir 24 juli 1982 di Desa Karangjati, Kemranjen, Banyumas. Saat ini penulis aktif sebagai tenaga pengajar di LPK Bahasa Korea di Kemranjen, Banyumas. Penulis juga aktif di Kegiatan Literasi di Kemranjen Banyumas terutama di Komunitas “ASNAWI” (Asli Anak Wijahan) dan Lembaga Tunas Literasi Nusantara. Berbagai kegiatan literasi dan pelatihan penulisan pernah di adakan di Kemranjen B.anyumas. Selama membuat buku ini penulis bekerja sama dengan ‘Dwi Adi Purnomo’ (Purwokerto) yang banyak membantu mencari akses informasi dalam penulisan buku ini.